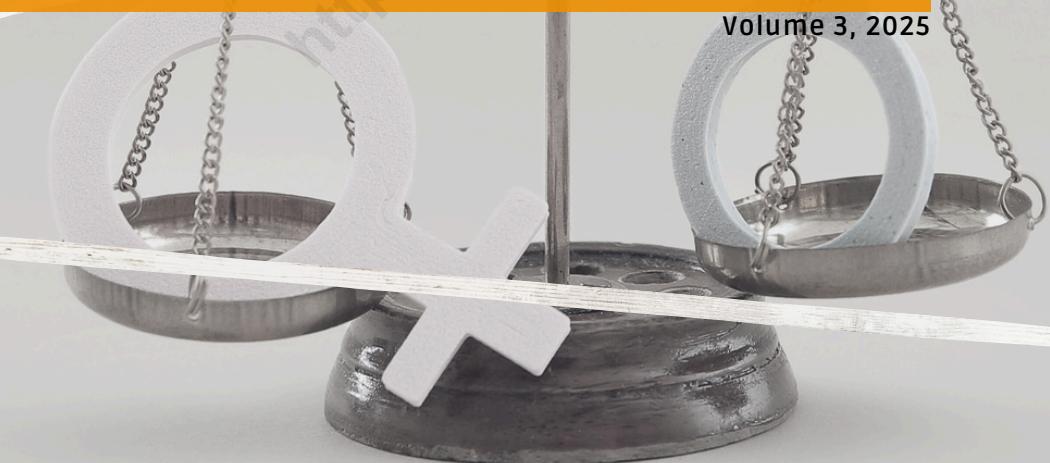




Katalog: 2104029

INDEKS KETIMPANGAN GENDER 2024

Volume 3, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 2104029

INDEKS KETIMPANGAN GENDER

2024

Volume 3, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

INDEKS KETIMPANGAN GENDER 2024

VOLUME 3, 2025

Katalog: 2104029

Nomor Publikasi: 07300.25016

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xxiv+149 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Pembuat Kover:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

shutterstock.com, canva.com

**Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini
untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

Tim Penyusun
INDEKS KETIMPANGAN GENDER 2024

Volume 3, 2025

Pengarah
Moh. Edy Mahmud

Penanggung Jawab
Muchammad Romzi

Penyunting
Indah Budiati · Alvina Clarissa · Dyah Retno Prihatinningsih
· Syukriyah Delyana · Nia Setiyawati

Penulis
Adi Nugroho · Alvina Clarissa · Dyah Retno Prihatinningsih
· Dwi Wahyudi · Ety Kurniati · Farhan Anshari Arsyi ·
Nabila Aurelliza Candrika · Nia Setiyawati ·
Muhammad Ihsan · Syukriyah Delyana ·
Valent Gigih Saputri

Pengolah Data
Adi Nugroho

Penata Letak
Adi Nugroho · Alvina Clarissa · Dwi Wahyudi
· Farhan Anshari Arsyi · Syukriyah Delyana

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) disusun dengan tujuan memberikan gambaran tentang ketimpangan gender di aspek kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Buku ini menyajikan berbagai indikator yang relevan dalam mengukur ketimpangan gender, yaitu tingkat kesehatan reproduksi, representasi politik, akses terhadap pendidikan, dan partisipasi di dunia kerja. Kehadiran publikasi ini mencerminkan komitmen Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyediakan statistik berkualitas dan relevan, guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan, khususnya yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan gender dan peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk.

Melalui indikator strategis seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), BPS mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*) untuk mendorong pembangunan yang lebih setara dan berkeadilan gender. IKG sendiri mengukur sejauh mana ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi ekonomi. Indeks ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai tingkat kesenjangan gender, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender dan inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.



Jakarta, Juli 2025

Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti

Ringkasan

Gender sering kali dipahami sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini perlu diperluas untuk mencakup berbagai identitas gender lainnya. Gender berbeda dengan "sex" yang dikaitkan dengan karakteristik biologis dan fisik saat lahir.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), kesetaraan gender menjadi salah satu fokus/tujuan yang harus segera diatasi. Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Berbagai ukuran yang berusaha memotret kondisi kesetaraan gender telah diperkenalkan oleh berbagai lembaga internasional, salah satunya *Gender Inequality Index* (GII), yang mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP).

Di Indonesia, kesetaraan gender diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengadaptasi ukuran ketimpangan gender dari UNDP dengan nama Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Sama seperti GII, IKG mengevaluasi ketidaksetaraan gender pada tiga dimensi. Ada sedikit perbedaan pada indikator pembentuk pada dimensi kesehatan reproduksi. UNDP menggunakan Angka Kematian Ibu dan Tingkat Fertilitas Remaja, sementara BPS menggunakan proporsi wanita pernah kawin usia 15–49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi wanita pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun. Pada dimensi pemberdayaan, indikator persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan ijazah terakhir yang dimiliki, BPS menggunakan batasan minimal SMA ke atas dan sederajat, sedangkan UNDP minimal SMP dan sederajat. Untuk indikator lainnya sama seperti yang digunakan oleh UNDP.

Hadirnya buku ini dilatarbelakangi permasalahan masih terjadinya kesenjangan gender di Indonesia. Kebijakan yang berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender atau untuk mencapai kesetaraan gender memerlukan data dan langkah-langkah yang kuat. Buku ini menyajikan konsep, tujuan, dan manfaat pengukuran ketimpangan gender. Selain itu, buku ini juga menyajikan gambaran ketimpangan gender Indonesia di tataran global dan ASEAN, serta gambaran ketimpangan gender tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam buku ini juga menyajikan hubungan IKG dengan indikator strategis lainnya serta menyajikan profil ketimpangan gender nasional dan provinsi.

Temuan Utama

Pada 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,421, turun sebanyak 0,026 poin dibandingkan penurunan tahun sebelumnya. Penurunan ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan yang terdalam sejak tahun 2019. Dengan demikian, IKG Indonesia secara konsisten mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejak

2018, IKG Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,013 poin per tahun. Penurunan IKG Indonesia 2024 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, khususnya dimensi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat 1,90 persen poin dari 54,52 persen pada 2023 menjadi 56,42 persen pada 2024. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat 0,40 persen poin dari 84,26 persen pada 2023 menjadi 84,66 persen pada 2024.

Keadaan ketimpangan gender juga penting untuk dicermati di seluruh wilayah. Secara umum, IKG Indonesia pada 2024 mengalami perbaikan di sebagian besar provinsi di Indonesia. Secara total, 26 dari 38 provinsi mengalami penurunan IKG pada 2024. Terdapat lima provinsi yang mengalami peningkatan IKG, yaitu Maluku dengan kenaikan tertinggi sebesar 0,029 poin, disusul Kalimantan Timur (0,027), DI Yogyakarta (0,021), Riau (0,013), dan Kalimantan Tengah (0,008). Hanya Provinsi Jambi yang tidak mengalami perubahan IKG. Sementara itu, penurunan IKG paling signifikan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang turun 0,120 poin, disusul Kep.Bangka Belitung (0,111) dan DKI Jakarta (0,109). Pada tahun 2024, IKG terendah dicapai oleh DKI Jakarta sebesar 0,147, disusul DI Yogyakarta (0,163), dan Bali (0,183). Sedangkan IKG tertinggi pada 2024 terdapat di Papua Pegunungan yang mencapai 0,579, disusul Papua Barat dan Kalimantan Tengah dengan IKG masing-masing 0,558 dan 0,549. Secara keseluruhan, dari 38 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi dengan capaian IKG lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar 0,421 pada 2024. Sementara 22 provinsi lainnya masih lebih tinggi dibandingkan IKG nasional. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas ketimpangan gender antarprovinsi di Indonesia.

Daftar Isi

INDEKS KETIMPANGAN GENDER 2024

Volume 3, 2025

Halaman

Kata Pengantar	v
Ringkasan.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xxiii
Bab 1 Konsep dan Kerangka Pengukuran Ketimpangan Gender.....	1
1.1 Konsep Gender dan Perbedaannya dengan Jenis Kelamin	3
1.2 Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.....	4
1.3 Pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Tingkat Global dan Nasional.....	5
1.4 IKG dalam Agenda Pembangunan Nasional.....	7
Bab 2 Capaian dan Tantangan Ketimpangan Gender Indonesia dalam Tataran Global.....	11
2.1 Agenda dan Komitmen Global untuk Kesetaraan Gender.....	13
2.2 Menakar Posisi Indonesia dalam Lanskap Global.....	14
2.3 Tantangan Global Baru yang Memengaruhi Indonesia.....	17
2.4 Integrasi Strategi Global ke dalam Kebijakan Nasional	19
Bab 3 Potret Ketimpangan Gender Indonesia	21
3.1 Perkembangan IKG Indonesia.....	23
3.2 Perkembangan Dimensi Penyusun Indeks Ketimpangan Gender	25
Bab 4 Dinamika Ketimpangan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	35
4.1 Ketimpangan Antarprovinsi : Distribusi dan Perubahan.....	37
4.2 Ketimpangan Gender Antarkabupaten/kota	41
4.3 Disparitas Ketimpangan Gender Intra-Provinsi	45
Bab 5 Indeks Ketimpangan Gender dalam Konteks Pembangunan dan Strategi Penurunan Ketimpangan.....	47
5.1 Hubungan IKG dengan IPM, IPG, dan IDG	49
5.2 Tantangan dan Peluang Kesetaraan Gender di Indonesia.....	53
5.3 Strategi dalam Memanfaatkan Peluang dan Menjawab Tantangan.....	62
Bab 6 Profil Ketimpangan Gender Nasional dan Provinsi.....	65
Daftar Pustaka	103
Catatan Teknis.....	107
Lampiran	113

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1.1 Dimensi dan Indikator Penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	7
2.1 GII Negara-Negara ASEAN Menurut Komponen Pembentuknya, 2023	15
3.1 Indeks Ketimpangan Gender beserta Komponennya, 2018–2024.....	24
3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas (RLS) dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7–23 Tahun (APS) Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2024.....	30
3.3 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2024.....	32
4.1 Capaian IKG dan Komponen Penyusunnya pada Provinsi dengan Pertumbuhan Tertinggi dan Terendah, 2023 dan 2024	39
4.2 Lima Kabupaten/kota dengan Nilai Capaian Ketimpangan Gender Tertinggi dan Terendah, 2024	42
4.3 Kabupaten/Kota dengan Perlambatan dan Pertumbuhan IKG lebih dari Lima Puluh Persen, 2024.....	43
4.4 Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kategori Ketimpangan, 2018–2024.....	44
5.1 Sepuluh Provinsi Tertinggi pada Indikator Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun, 2024	55
5.2 Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2016 dan 2024.....	57
5.3 Beberapa Indikator Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, 2024.....	58
5.4 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2024	59
6.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Indonesia, 2024	68
6.2 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Aceh, 2024.....	69
6.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sumatera Utara, 2024.....	70
6.4 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sumatera Barat, 2024	71
6.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Riau, 2024	72
6.6 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jambi, 2024.....	73
6.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sumatera Selatan, 2024.....	74
6.8 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Bengkulu, 2024.....	75
6.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Lampung, 2024.....	76
6.10 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kep. Bangka Belitung, 2024	77
6.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kepulauan Riau, 2024.....	78
6.12 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG DKI Jakarta, 2024.....	79
6.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jawa Barat, 2024.....	80
6.14 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jawa Tengah, 2024	81

Tabel		Halaman
6.15	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG D.I. Yogyakarta, 2024	82
6.16	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jawa Timur, 2024.....	83
6.17	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Banten, 2024.....	84
6.18	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Bali, 2024.....	85
6.19	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Nusa Tenggara Barat, 2024.....	86
6.20	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Nusa Tenggara Timur, 2024.....	87
6.21	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Barat, 2024.....	88
6.22	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Tengah, 2024	89
6.23	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Selatan, 2024.....	90
6.24	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Timur, 2024.....	91
6.25	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Utara, 2024	92
6.26	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Utara, 2024.....	93
6.27	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Tengah, 2024.....	94
6.28	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Selatan, 2024.....	95
6.29	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Tenggara, 2024.....	96
6.30	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Gorontalo, 2024.....	97
6.31	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Barat, 2024	98
6.32	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Maluku, 2024.....	99
6.33	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Maluku Utara, 2024	100
6.34	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Papua Barat, 2024	101
6.35	Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Papua, 2024	102

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1.1 Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045	9
2.1 <i>Gender Inequality Index (GII)</i> Menurut Kawasan, 2013 dan 2023.....	14
3.1 Indeks Ketimpangan Gender Indonesia, 2018–2024.....	24
3.2 MTF dan MHPK20 Indonesia, 2018–2024.....	26
3.3 Persentase Anggota Legislatif Menurut Jenis Kelamin, 2018–2024	29
3.4 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas yang Berpendidikan Minimal SMA Menurut Jenis Kelamin, 2018–2024	29
3.5 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah, 2021 dan 2024	31
3.6 TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen), 2018–2024.....	32
4.1 Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2024.....	38
4.2 Peta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2024	40
4.3 Peta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/kota, 2024	44
4.4 Disparitas IKG Antarkabupaten/Kota Menurut Provinsi, 2024.....	46
5.1 Keterkaitan IKG dan IPM, 2024	50
5.2 Keterkaitan IKG dan IPG, 2024	52
5.3 Keterkaitan IKG dan IDG, 2024	53
5.4 Persentase Perempuan Usia 20–24 Tahun yang Usia Perkawinannya di bawah 18 Tahun, 2017	54
5.5 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Komnas Perempuan, 2017–2024.....	56
6.1 Perkembangan IKG Indonesia, 2018–2024.....	68
6.2 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Indonesia, 2018–2024	68
6.3 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Indonesia, 2018–2024	68
6.4 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Indonesia, 2018–2024	68
6.5 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Indonesia, 2018–2024.....	68
6.6 Perkembangan IKG Aceh, 2018–2024.....	69
6.7 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Aceh, 2018–2024..	69
6.8 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Aceh, 2018–2024.....	69
6.9 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Aceh, 2018–2024...	69
6.10 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Aceh, 2018–2024	69

Gambar	Halaman
6.11 Perkembangan IKG Sumatera Utara, 2018–2024	70
6.12 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sumatera Utara, 2018–2024	70
6.13 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sumatera Utara, 2018–2024	70
6.14 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sumatera Utara, 2018–2024	70
6.15 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sumatera Utara, 2018–2024	70
6.16 Perkembangan IKG Sumatera Barat, 2018–2024	71
6.17 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sumatera Barat, 2018–2024	71
6.18 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sumatera Barat, 2018–2024	71
6.19 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sumatera Barat, 2018–2024	71
6.20 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sumatera Barat, 2018–2024	71
6.21 Perkembangan IKG Riau, 2018–2024	72
6.22 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Riau, 2018–2024	72
6.23 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Riau, 2018–2024	72
6.24 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Riau, 2018–2024	72
6.25 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Riau, 2018–2024	72
6.26 Perkembangan IKG Jambi, 2018–2024	73
6.27 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jambi, 2018–2024	73
6.28 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jambi, 2018–2024	73
6.29 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Jambi, 2018–2024	73
6.30 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jambi, 2018–2024	73
6.31 Perkembangan IKG Sumatera Selatan, 2018–2024	74
6.32 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sumatera Selatan, 2018–2024	74
6.33 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sumatera Selatan, 2018–2024	74
6.34 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sumatera Selatan, 2018–2024	74
6.35 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sumatera Selatan, 2018–2024	74

Gambar	Halaman
6.36 Perkembangan IKG Bengkulu, 2018–2024.....	75
6.37 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Bengkulu, 2018–2024	75
6.38 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Bengkulu, 2018–202 ...	75
6.39 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Bengkulu, 2018–2024	75
6.40 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Bengkulu, 2018–2024	75
6.41 Perkembangan IKG Lampung, 2018–2024	76
6.42 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Lampung, 2018–2024	76
6.43 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Lampung, 2018–2024.	76
6.44 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Lampung, 2018–2024	76
6.45 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Lampung, 2018–2024.....	76
6.46 Perkembangan IKG Kep. Bangka Belitung, 2018–2024	77
6.47 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kep. Bangka Belitung, 2018–2024	77
6.48 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kep. Bangka Belitung, 2018–2024	77
6.49 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Kep. Bangka Belitung, 2018–2024	77
6.50 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kep. Bangka Belitung, 2018–2024.....	77
6.51 Perkembangan IKG Kepulauan Riau, 2018–2024	78
6.52 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kepulauan Riau, 2018–2024	78
6.53 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kepulauan Riau, 2018–2024	78
6.54 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Kepulauan Riau, 2018–2024	78
6.55 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kepulauan Riau, 2018–2024.....	78
6.56 Perkembangan IKG DKI Jakarta, 2018–2024	79
6.57 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi DKI Jakarta, 2018–2024	79
6.58 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja DKI Jakarta, 2018–2024	79
6.59 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan DKI Jakarta,	

Gambar	Halaman
2018–2024	79
6.60 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas DKI Jakarta, 2018–2024.....	79
6.61 Perkembangan IKG Jawa Barat, 2018–2024	80
6.62 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jawa Barat, 2018–2024	80
6.63 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jawa Barat, 2018–2024	80
6.64 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Jawa Barat, 2018–2024	80
6.65 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jawa Barat, 2018–2024.....	80
6.66 Perkembangan IKG Jawa Tengah, 2018–2024	81
6.67 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jawa Tengah, 2018–2024	81
6.68 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jawa Tengah, 2018–2024	81
6.69 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Jawa Tengah, 2018–2024	81
6.70 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jawa Tengah, 2018–2024.....	81
6.71 Perkembangan IKG D.I. Yogyakarta, 2018–2024	82
6.72 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi D.I. Yogyakarta, 2018–2024	82
6.73 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta, 2018–2024	82
6.74 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan D.I. Yogyakarta, 2018–2024	82
6.75 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas D.I. Yogyakarta, 2018–2024.....	82
6.76 Perkembangan IKG Jawa Timur, 2018–2024	83
6.77 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jawa Timur, 2018–2024	83
6.78 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jawa Timur, 2018–2024	83
6.79 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Jawa timur, 2018–2024	83
6.80 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jawa Timur, 2018–2024.....	83

Gambar	Halaman
6.81 Perkembangan IKG Banten, 2018–2024	84
6.82 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Banten, 2018–2024	84
6.83 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Banten, 2018–2024	84
6.84 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Banten, 2018–2024	84
6.85 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Banten, 2018–2024.....	84
6.86 Perkembangan IKG Bali, 2018–2024.....	85
6.87 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Bali, 2018–2024....	85
6.88 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Bali, 2018–2024	85
6.89 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Bali, 2018–2024.....	85
6.90 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Bali, 2018–2024	85
6.91 Perkembangan IKG Nusa Tenggara Barat, 2018–2024.....	86
6.92 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Nusa Tenggara Barat, 2018–2024	86
6.93 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Nusa Tenggara Barat, 2018–2024	86
6.94 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Nusa Tenggara Barat, 2018–2024.....	86
6.95 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Nusa Tenggara Barat, 2018–2024.....	86
6.96 Perkembangan IKG Nusa Tenggara Timur, 2018–2024.....	87
6.97 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Nusa Tenggara Timur, 2018–2024.....	87
6.98 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Nusa Tenggara Timur, 2018–2024	87
6.99 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Nusa Tenggara Timur, 2018–2024.....	87
6.100 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Nusa Tenggara Timur, 2018–2024	87
6.101 Perkembangan IKG Kalimantan Barat, 2018–2024	88
6.102 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Barat, 2018–2024	88
6.103 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Barat, 2018–2024	88
6.104 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Kalimantan Barat, 2018–2024	88
6.105 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Barat, 2018–2024.....	88

Gambar	Halaman
6.106 Perkembangan IKG Kalimantan Tengah, 2018–2024	89
6.107 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Tengah, 2018–2024	89
6.108 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Tengah, 2018–2024	89
6.109 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Kalimantan Tengah, 2018–2024	89
6.110 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Tengah, 2018–2024.....	89
6.111 Perkembangan IKG Kalimantan Selatan, 2018–2024.....	90
6.112 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Selatan, 2018–2024	90
6.113 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Selatan, 2018–2024	90
6.114 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Kalimantan Selatan, 2018–2024	90
6.115 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Selatan, 2018–2024	90
6.116 Perkembangan IKG Kalimantan Timur, 2018–2024	91
6.117 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Timur, 2018–2024	91
6.118 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Timur, 2018–2024	91
6.119 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Kalimantan Timur, 2018–2024	91
6.120 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Timur, 2018–2024.....	91
6.121 Perkembangan IKG Kalimantan Utara, 2018–2024.....	92
6.122 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Utara, 2018–2024	92
6.123 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Utara, 2018–2024	92
6.124 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Kalimantan Utara, 2018–2024	92
6.125 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Utara, 2018–2024	92
6.126 Perkembangan IKG Sulawesi Utara, 2018–2024	93
6.127 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Utara, 2018–2024	93
6.128 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Utara,	93

Gambar	Halaman
2018–2024	93
6.129 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sulawesi Utara, 2018–2024	93
6.130 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Utara, 2018–2024.....	93
6.131 Perkembangan IKG Sulawesi Tengah, 2018–2024.....	94
6.132 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Tengah, 2018–2024	94
6.133 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Tengah, 2018–2024	94
6.134 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sulawesi Tengah, 2018–2024	94
6.135 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Tengah, 2018–2024	94
6.136 Perkembangan IKG Sulawesi Selatan, 2018–2024	95
6.137 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Selatan, 2018–2024	95
6.138 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Selatan, 2018–2024	95
6.139 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sulawesi Selatan, 2018–2024	95
6.140 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Selatan, 2018–2024.....	95
6.141 Perkembangan IKG Sulawesi Tenggara, 2018–2024.....	96
6.142 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Tenggara, 2018–2024	96
6.143 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, 2018–2024	96
6.144 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sulawesi Tenggara, 2018–2024	96
6.145 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Tenggara, 2018–2024	96
6.146 Perkembangan IKG Gorontalo, 2018–2024	97
6.147 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Gorontalo, 2018–2024	97
6.148 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Gorontalo, 2018–2024	97
6.149 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Gorontalo, 2018–2024	97

Gambar	Halaman
6.150 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Gorontalo, 2018–2024.....	97
6.151 Perkembangan IKG Sulawesi Barat, 2018–2024.....	98
6.152 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Barat, 2018–2024	98
6.153 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Barat, 2018–2024.....	98
6.154 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Sulawesi Barat, 2018–2024	98
6.155 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Barat, 2018–2024	98
6.156 Perkembangan IKG Maluku, 2018–2024.....	99
6.157 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Maluku, 2018–2024	99
6.158 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Maluku, 2018–2024.....	99
6.159 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Maluku, 2018–2024	99
6.160 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Maluku, 2018–2024	99
6.161 Perkembangan IKG Maluku Utara, 2018–2024.....	100
6.162 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Maluku Utara, 2018–2024	100
6.163 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Maluku Utara, 2018–2024	100
6.164 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Maluku Utara, 2018–2024	100
6.165 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Maluku Utara, 2018–2024	100
6.166 Perkembangan IKG Papua Barat, 2018–2024.....	101
6.167 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Papua Barat, 2018–2024	101
6.168 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Papua Barat, 2018–2024	101
6.169 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Papua Barat, 2018–2024	101
6.170 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Papua Barat, 2018–2024	101
6.171 Perkembangan IKG Papua, 2018–2024	102
6.172 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Papua, 2018–2024	102
6.173 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Papua, 2018–2024	102
6.174 Persentase Anggota Legislatif Laki–Laki dan Perempuan Papua, 2018–2024.	102

Gambar**Halaman**

6.175 Persentase Penduduk Laki–Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Papua, 2018–2024.....	102
--	-----

<https://www.bps.go.id>

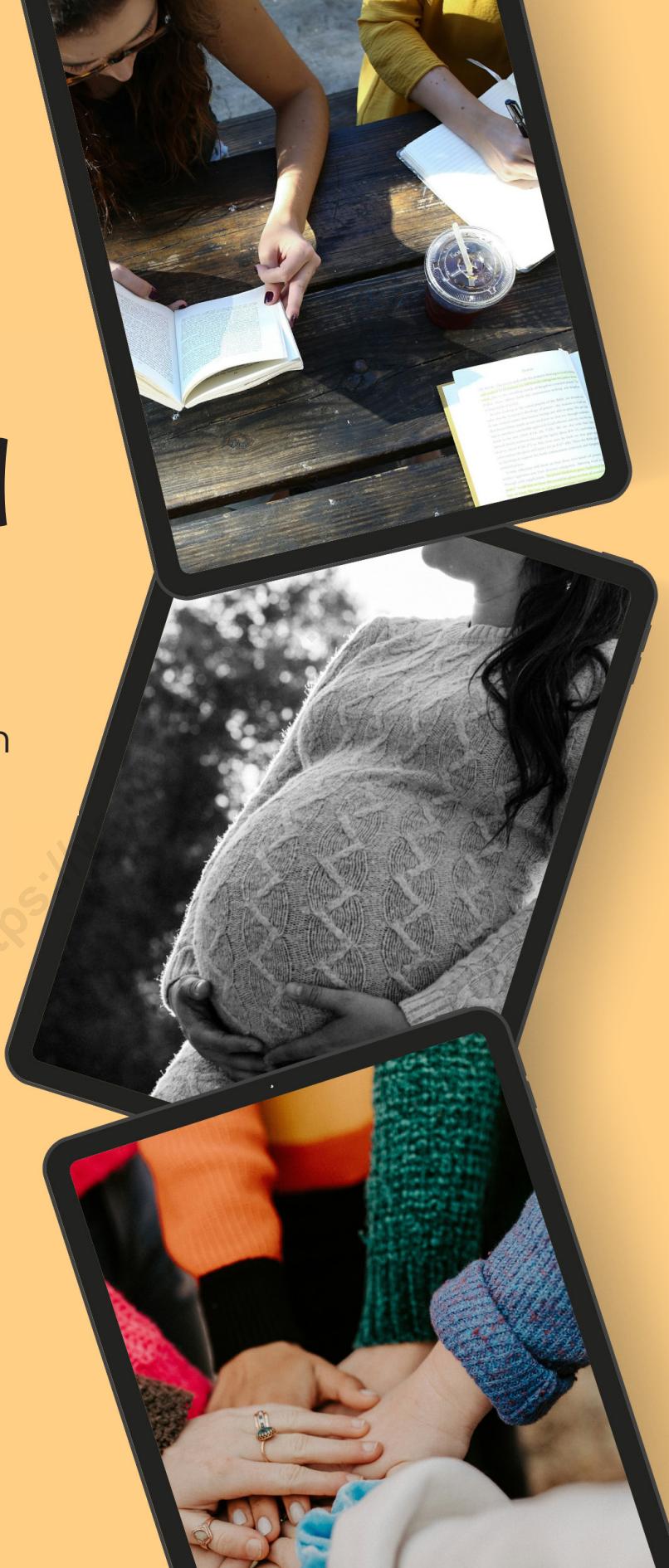
Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2018–2024.....	115
2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, 2018–2024.....	117
3 Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2024.....	132
4 Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, 2024.....	134

https://www.bps.go.id

BAB 1

Konsep dan
Kerangka
Pengukuran
Ketimpangan
Gender



Konsep dan Kerangka Pengukuran Ketimpangan Gender

1.1 Konsep Gender dan Perbedaannya dengan Jenis Kelamin

Gender merupakan konsep yang bersifat kompleks dan memiliki banyak dimensi. Tidak seperti *sex* yang merujuk pada ciri-ciri biologis dan fisik sejak lahir, gender mencakup dimensi biologis, sosial, dan budaya. Judith Butler (1990) menjelaskan bahwa gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan norma budaya. Dengan kata lain, identitas dan peran gender ditentukan oleh bagaimana masyarakat membentuk harapan dan persepsi terhadap perilaku individu berdasarkan jenis kelaminnya.

Umumnya, gender masih dipahami sebatas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini perlu diperluas agar mencakup keberagaman identitas gender lainnya, karena gender berbeda dari jenis kelamin yang hanya didasarkan pada aspek biologis dan fisik sejak lahir. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Candace West dan Don Zimmerman (1987), yang menyatakan bahwa gender adalah “sesuatu yang kita lakukan”, bukan “sesuatu yang kita miliki”. Artinya, gender bersifat performatif yang terus-menerus dibentuk dan didefinisikan ulang melalui tindakan dan interaksi sosial.

Dalam praktiknya, peran gender memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, dunia kerja, dan kesehatan. Laporan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) tahun 2019 mengungkapkan bahwa stereotip gender sering menghambat perempuan dalam mengakses pendidikan tinggi dan mencapai karir di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Di lingkungan kerja, peran gender juga turut memengaruhi peluang karier dan partisipasi perempuan. Studi Catalyst (2020) menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tantangan lebih besar untuk mencapai posisi kepemimpinan yang disebabkan oleh bias gender serta kurangnya dukungan struktural, termasuk dalam proses rekrutmen, promosi, dan akses terhadap mentoring.

Pemahaman tentang gender secara komprehensif dapat mempermudah dalam mengenali dan mengatasi ketidakadilan berbasis gender yang terjadi di masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif.

1.2 Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak dasar manusia, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih makmur dan berkualitas (*World Bank*, 2012). Konsep ini merujuk pada kondisi laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan (*UN Women*, 2018). Ketika kesetaraan ini terpenuhi, seluruh potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa diskriminasi atau marginalisasi (*OECD* 2017).

Kesetaraan gender memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan produktivitas dan kreativitas. Hal ini terjadi karena keberagaman sudut pandang dan pengalaman mendorong munculnya solusi yang lebih inovatif dan efektif (*McKinsey & Company* 2015). Selain itu, kesetaraan gender juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis karena setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkembang (*UNDP* 2021).

Oleh karena itu, penerapan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan akan memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kesetaraan gender bukan hanya tujuan akhir, melainkan bagian penting dari proses menuju pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif (*UNESCO* 2019). Karena itu, komitmen terhadap kesetaraan gender harus menjadi agenda utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional (*United Nations* 2015).

Isu kesetaraan gender berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan menjadi objek kajian penting dalam berbagai literatur akademik. Esther Duflo (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi dapat memperkuat kesetaraan gender, sebaliknya kesetaraan gender akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Pandangan ini juga diperkuat oleh penelitian Doepke, dkk. (2012) dan Doepke & Tertilt (2019), yang menunjukkan bahwa pemberian hak yang lebih luas kepada perempuan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ketika perempuan memiliki lebih banyak hak dan peran dalam pengambilan keputusan, terjadi redistribusi sumber daya dari laki-laki kepada perempuan. Redistribusi ini dapat menghilangkan ketidakafisan dalam perilaku ekonomi dan meningkatkan investasi perempuan dalam pengembangan kapasitas dan pendidikan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi tidak hanya memperkuat kemampuan individu, tetapi juga mengokohkan struktur ekonomi secara keseluruhan (Kabeer 2015; *World Bank* 2018). Artinya, kesetaraan gender tidak hanya menyangkut isu keadilan sosial, tetapi juga merupakan kunci dalam strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Sebagai contoh, ketika perempuan memperoleh hak yang setara dalam pendidikan dan akses kerja, kontribusi mereka terhadap ekonomi meningkat, kemiskinan dapat ditekan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata dan berkelanjutan (*UN Women* 2019).

1.3 Pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Tingkat Global dan Nasional

Kesetaraan gender merupakan elemen strategis dalam pembangunan nasional sehingga untuk mewujudkannya diperlukan pengukuran yang tepat. Pengukuran ini sangat penting karena menyediakan data yang relevan untuk menganalisis, menangani, dan menghapus ketimpangan dari sisi gender. Data tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik yang efektif dan akuntabel demi mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan (WEF 2020). Oleh sebab itu, pengumpulan dan analisis data ketimpangan gender menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan inklusi sosial dan pengurangan kesenjangan (UNDP 2022).

Pengukuran pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak *United Nations Development Program* (UNDP) mengeluarkan laporan berkala, yaitu *Human Development Report* (HDR) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara (BPS 2015). Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDR, faktor kesetaraan gender selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan setiap negara.

Ukuran kesetaraan gender yang disusun UNDP sejak tahun 1995 adalah *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak pada konsep kesetaraan. Perhitungan GDI mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal capaian kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Sedangkan GEM mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam sektor sosial-ekonomi. Di Indonesia, GDI atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan GEM atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) telah dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2009.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi pengukuran GDI disertai dengan penghitungan HDI laki-laki dan perempuan. Menyesuaikan perubahan ini, pada tahun 2015 Indonesia merilis IPG metode baru dengan *backcasting* data hingga tahun 2010. Sementara itu, metode penghitungan IDG belum berubah hingga saat ini meskipun sejak tahun 2010 UNDP telah menghilangkan GEM dalam publikasi tahunan HDR. Pada saat yang bersamaan, UNDP mempublikasikan *Gender Inequality Index* (GII) sebagai salah satu ukuran yang dianggap lebih tepat menggambarkan pemberdayaan sekaligus kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. GII menggambarkan deprivasi pembangunan manusia sebagai dampak dari ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan (UNDP 2016). GII dapat menyempurnakan kelemahan GEM dan GDI yang memiliki berbagai kelemahan baik dalam hal teknis maupun konseptual.

Dalam hal teknis pengukuran, GEM menggunakan bobot yang sama (*equal weighting*) untuk setiap komponen penyusunnya padahal setiap komponen indeks memiliki varians yang berbeda (Dijkstra 2002 dalam Jager & Rohwer, 2009). Dalam hal konsep, GEM merefleksikan *urban elite bias* dengan menggunakan indikator yang hanya relevan bagi negara maju (Klasen 2006). Di sisi lain, kegagalan dalam mengukur kekuatan perempuan

dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga (domestik) juga menjadi salah satu kelemahan GEM (Beteta 2006 dalam Jager & Rohwer, 2009).

Sementara itu GDI memiliki kelemahan dalam mengukur angka harapan hidup yang digunakan sebagai ukuran gender gap padahal ada perbedaan aspek biologis/genetis antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, pendapatan dalam bentuk nilai nominal dapat menarik IPM perempuan menjadi jauh lebih rendah dari IPM laki-laki (Klasen 2006). Selain itu, data pendapatan di beberapa negara tidak tersedia sehingga lebih banyak dilakukan imputasi.

Untuk mengakomodir kelemahan GDI dan GEM, GII menawarkan perbaikan metodologi dan alternatif indikator untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Dimensi pertama (kesehatan reproduksi) adalah isu gender yang timbul akibat adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, yaitu adanya diskriminasi dan kegagalan negara dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan. Aspek inilah yang menjadi ukuran khas dari GII yang tidak terdapat dalam GEM dan GDI.

Dimensi kesehatan dalam GII mengukur ketimpangan gender sebagai perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang berdampak terhadap *outcome* kesehatan. Lebih luas lagi, ketidaksetaraan gender yang dimaksud adalah adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, ketidaksamaan hubungan kekuasaan di antara mereka, sehingga mengakibatkan perbedaan terhadap kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ukuran kesehatan inilah yang kemudian dikembangkan dalam pengukuran GII.

Pada pengukuran GII, komponen pendapatan yang bias negara maju, bias kelompok elit, atau bias daerah perkotaan, tidak lagi dimasukkan. Di samping itu, metode atau formula penghitungan GII sudah mempertimbangkan berbagai komponen seperti pembobotan dan pengagregasian. Pencapaian nilai yang sangat tinggi dalam satu dimensi tidak akan menutup pencapaian yang rendah di dimensi lainnya.

Di Indonesia, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diadaptasi dari GII. Sejak 2017, BPS telah melakukan kajian metodologis untuk menguatkan pengukuran IKG. Meskipun IKG memiliki cakupan yang serupa dengan GII, terdapat beberapa perbedaan indikator khususnya dalam dimensi kesehatan reproduksi. UNDP menggunakan Angka Kematian Ibu dan Tingkat Fertilitas Remaja, sementara BPS menggunakan indikator alternatif yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan, serta perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun. Pilihan ini dilakukan karena Angka Kematian Ibu dan Tingkat Fertilitas Remaja tidak tersedia secara berkala di Indonesia. Pada dimensi pemberdayaan, UNDP menggunakan indikator penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal setara SMP, sementara BPS menggunakan batasan SMA ke atas. Penyesuaian ini dilakukan agar lebih menggambarkan konteks nasional dan menyesuaikan ketersediaan data.

Hal spesifik dalam IKG adalah penggunaan indikator kesehatan reproduksi yang tidak berlaku pada laki-laki. Dalam dimensi ini, indikator kesehatan reproduksi ditujukan untuk

melihat tujuan akhir dari pembangunan kesehatan reproduksi adalah tidak adanya kasus kematian ibu dan kehamilan usia dini. Rasionalisasi dari penggunaan kedua indikator ini adalah bahwa keselamatan ibu hamil dalam melahirkan adalah gambaran dari fungsi kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, kesehatan reproduksi juga sangat berisiko jika terjadi terlalu dini. Risiko ini akan berdampak pada kondisi kesehatan secara umum serta masa depan perempuan di kemudian hari. Kelahiran terlalu dini yang diukur dari tingkat fertilitas remaja, sangat berkaitan dengan risiko kesehatan ibu dan bayinya. Dalam jangka panjang pengaruh kelahiran pada usia muda juga meningkatkan risiko putus sekolah, membatasi akses terhadap pendidikan lanjutan, serta mempersempit peluang kerja yang layak.

IKG menggambarkan besarnya kerugian (*loss*) yang terjadi dalam pembangunan manusia akibat adanya ketimpangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Angka 0 mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya, dan angka 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut. Dengan demikian, nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah (semakin membaik). Sebaliknya, nilai IKG yang semakin besar menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin tinggi (semakin memburuk).

Selanjutnya, IKG menjadi ukuran ketimpangan gender dalam pembangunan manusia dengan menggunakan 3 dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Dimensi tersebut disusun oleh lima indikator seperti tergambar pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Dimensi	Indikator
(1)	(2)
Kesehatan Reproduksi	1. Proporsi perempuan 15–49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF)
	2. Proporsi perempuan 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20)
Pemberdayaan	1. Persentase penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA 2. Persentase anggota legislatif
Pasar Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024

1.4 IKG dalam Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), kesetaraan gender secara eksplisit dituangkan dalam tujuan ke-5, yaitu mencapai

kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam konteks nasional, TPB diterjemahkan ke dalam sembilan target penting seperti yang termuat dalam dokumen metadata TPB 2024 berikut ini:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Pentingnya target kesetaraan gender dalam TPB menggambarkan bahwa tanpa keterlibatan perempuan secara penuh dan setara, berbagai target pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga pertumbuhan ekonomi yang merata tidak akan tercapai secara menyeluruh. Perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi dalam kepemimpinan cenderung memberikan dampak positif bagi keluarga, komunitas, dan ekonomi secara luas.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. IKG digunakan untuk mengukur sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Dalam RPJPN 2025–2045, IKG menjadi salah satu indikator dalam arah pembangunan “Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender”. Target IKG untuk tahun 2045 ditetapkan sebesar 0,150, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan

gender secara signifikan. Pada tahun 2024, IKG Indonesia tercatat sebesar 0,421, yang menunjukkan adanya ketimpangan gender yang perlu diatasi.



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Gambar 1.1 Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045

Dalam RPJMN 2025–2029, IKG juga menjadi salah satu indikator penting dalam misi "Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak". IKG merupakan salah satu indikator dalam Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas. Target IKG untuk tahun 2029 ditetapkan sebesar 0,394, yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan gender dalam periode lima tahun tersebut.

BAB 2

Capaian dan
Tantangan
Ketimpangan
Gender
Indonesia dalam
Tataran Global

https://



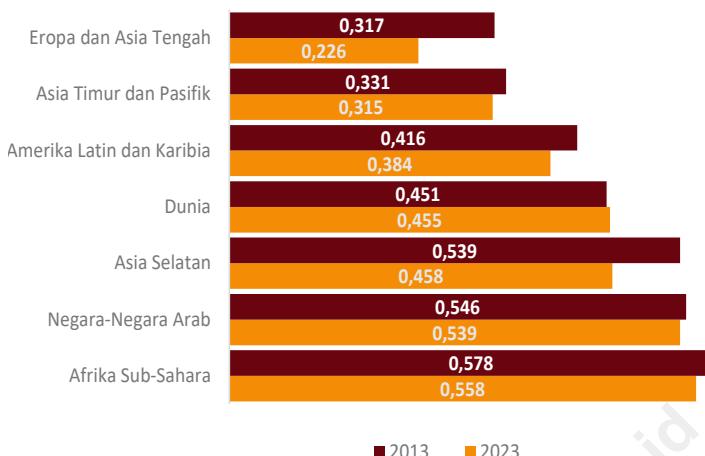
Capaian dan Tantangan Ketimpangan Gender Indonesia dalam Tataran Global

2.1 Agenda dan Komitmen Global untuk Kesetaraan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index* atau GII) tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan statistik, tetapi juga menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan publik, memperkuat akuntabilitas negara, serta mendorong advokasi oleh kelompok masyarakat sipil dan lembaga internasional. GII dinilai unggul dibandingkan indeks-indeks sebelumnya yang dikembangkan oleh UNDP, seperti *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM), karena mencakup dimensi kesehatan reproduksi yang selama ini sering terabaikan dalam pengukuran ketimpangan gender.

Meskipun sejumlah kritik tetap muncul, antara lain karena GII belum mempertimbangkan beban kerja domestik yang tidak dibayar serta kurangnya sensitivitas terhadap konteks sosial budaya dalam indikator pemberdayaan politik dan ekonomi, GII tetap digunakan secara luas dalam pemantauan ketimpangan gender di tingkat global karena cakupan indikatornya yang strategis dan kesesuaianya dengan berbagai komitmen internasional. Salah satu bentuk konkret keterkaitan GII dengan agenda global tertuang dalam SDGs tujuan 5 yang menargetkan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Beberapa indikator dalam SDGs, seperti indikator 5.5 tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan indikator 5.a mengenai akses terhadap sumber daya ekonomi dan kepemilikan aset, sejalan dengan dimensi yang diukur dalam GII. Selain itu, Konsensus Beijing 1995 (*Beijing Platform for Action*) menekankan pentingnya pengumpulan dan penggunaan data terpisah menurut gender untuk memantau kemajuan hak-hak perempuan di berbagai sektor, menjadikan GII sebagai instrumen pendukung dalam pelaporan. Konvensi CEDAW 1979 pun mewajibkan negara anggotanya untuk menyampaikan laporan berkala terkait upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, di mana GII dapat berperan sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan di bidang pemberdayaan, kesehatan reproduksi, dan akses ekonomi. Dalam konteks ini, UN Women dan UNDP melalui *Human Development Report* menegaskan pentingnya integrasi GII dalam sistem pelaporan nasional dan internasional guna memperkuat komparabilitas data lintas negara, meningkatkan transparansi, dan mendukung advokasi kebijakan yang berbasis bukti.

Komitmen global terhadap pengentasan ketimpangan gender mulai membawa hasil. Hal ini tercermin dari membaiknya ketimpangan gender pada tingkat global selama satu dekade terakhir, yang ditandai dengan penurunan GII selama periode 2013–2023 (Gambar 2.1).



Sumber: *United Nations Development Programme, Human Development Report 2014* dan *2023/2024*

Gambar 2.1 Gender Inequality Index (GII) Menurut Kawasan, 2013 dan 2023

Pada tahun 2024, meskipun 96 persen negara menutup lebih dari 60 persen kesenjangan gender pada sub-indikator kesehatan dan pendidikan, kesenjangan pada partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik masih jauh tertinggal. Ketertinggalan itu masing-masing hanya sekitar 60,5 persen dan 22,5 persen yang tertutup (WEF 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan cepat di bidang yang lebih mudah diakses seperti pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Namun demikian, bidang ekonomi dan politik belum menunjukkan kemajuan yang cepat sehingga diperlukan tindakan yang lebih intensif dan terarah. Oleh karena itu, masih sangat dibutuhkan intervensi kebijakan yang tajam dan konsisten untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan dan merata ke depannya.

2.2 Menakar Posisi Indonesia dalam Lanskap Global

Dalam lanskap global, capaian GII menunjukkan kesenjangan yang mencolok antarnegara. Berdasarkan *Human Development Report* UNDP, negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Swedia, Norwegia, Swiss, dan Belanda mencatatkan nilai GII yang sangat rendah (di bawah 0,100). Capaian ini mencerminkan tingginya tingkat kesetaraan gender dalam akses pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan representasi politik. Keberhasilan mereka didukung oleh sistem perlindungan sosial yang kuat, penerapan kuota perempuan dalam parlemen, serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang universal dan inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika kesetaraan gender menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional, ketimpangan dapat ditekan secara signifikan.

Sementara itu, negara-negara berkembang dan berpenghasilan menengah, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam mempersempit kesenjangan gender. Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan nilai GII sebesar 0,423 dan menempati peringkat ke-108 dari 166 negara. Ini berarti Indonesia kehilangan hampir 42 persen potensi pembangunan manusianya akibat ketimpangan gender, khususnya dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan (politik dan pendidikan), serta partisipasi tenaga kerja. Meskipun terdapat perbaikan bertahap dalam satu dekade terakhir, laju peningkatannya belum mampu menyamai negara-negara lain di kawasan maupun negara-negara maju.

Adanya disparitas pencapaian kesetaraan gender ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menutup kesenjangan gender. Diperlukan intervensi terarah dan konsisten yang menyasar akar ketimpangan, seperti akses terhadap layanan dasar, reformasi hukum dan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi perempuan di semua sektor. Negara-negara yang mampu menurunkan GII secara signifikan umumnya memiliki komitmen politik yang tinggi terhadap kebijakan *gender-responsive budgeting*, sistem kuota, serta integrasi gender dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2.1 GII Negara-Negara ASEAN Menurut Komponen Pembentuknya, 2023

Negara	Rangking	GII	Dimensi Kesehatan Reproduksi		Dimensi Pemberdayaan				Dimensi Pasar Tenaga Kerja	
			Angka Kematiian Ibu (per 100.000 lahir hidup)	Tingkat Kelahiran Remaja (per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	Percentase Penduduk Berpendidikan Menengah Keatas		Kontribusi dalam Parlemen (%)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
					Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Singapura	8	0,031	7,453	2,160	87,810	82,900	70,874	29,126	74,900	62,640
Malaysia	47	0,172	21,132	5,962	82,060	79,030	85,348	14,652	81,880	55,790
Brunei Darussalam	66	0,257	44,236	8,518	88,810	86,049	88,235	11,765	72,290	54,380
Thailand	73	0,288	28,600	26,145	56,726	51,934	83,957	16,043	76,610	60,610
Vietnam	78	0,299	45,530	34,277	69,955	61,492	69,739	30,261	76,650	67,920
Timor Leste	99	0,394	203,924	27,406	40,896	35,261	63,077	36,923	52,460	40,870
Indonesia	108	0,423	172,923	26,419	59,865	53,476	78,435	21,565	82,230	53,390
Laos	117	0,475	126,062	81,654	30,951	19,336	78,049	21,951	70,760	61,470
Myanmar	118	0,478	178,674	33,506	47,800	38,510	85,023	14,977	76,700	43,580
Kamboja	136	0,506	217,983	46,890	29,013	16,449	85,561	14,439	83,810	70,480
Dunia		0,455	216,076	39,079	70,197	62,004	73,456	26,544	74,123	48,474

Sumber: <https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indices/GII> (diakses pada 3 Juli 2025)

Di tingkat regional, perbandingan antarnegara Asia Tenggara juga memperlihatkan kesenjangan yang cukup besar. Singapura mencatatkan capaian GII tertinggi di ASEAN, dengan nilai sebesar 0,031 di tahun 2023, menempatkannya di antara negara-negara terbaik dunia dalam hal kesetaraan gender. Rendahnya nilai GII Singapura ditentukan oleh rendahnya angka kematian ibu, rendahnya tingkat kelahiran remaja, tingginya persentase pendidikan penduduk, dan cukup besarnya proporsi perempuan yang duduk di parlemen dan dalam angkatan kerja.

Thailand dan Malaysia mencatat GII di bawah 0,300 menunjukkan ketimpangan yang cukup rendah. Negara Malaysia mempunyai peringkat yang baik dalam mencapai kesetaraan gender setelah Singapura, begitu pula Thailand yang masing-masing berada di peringkat 47 dan 73. Tidak jauh berbeda dengan Singapura, capaian GII kedua negara tersebut didukung dari rendahnya angka kematian ibu, rendahnya tingkat kelahiran remaja, tingginya persentase pendidikan penduduk, dan cukup besarnya proporsi perempuan yang duduk di parlemen dan dalam angkatan kerja.

Timor Leste sebagai negara anggota baru ASEAN memiliki peringkat kesetaraan gender yang lebih baik dari Indonesia dan berada pada peringkat 99. Kinerja yang baik ini tidak terlepas dari indikator kontribusi perempuan pada parlemen yang cukup tinggi, bahkan persentasenya lebih besar dari Singapura. Meskipun demikian, dilihat dari sisi kesehatan reproduksi, pasar tenaga kerja serta pendidikan, Timor Leste masih memerlukan banyak perbaikan.

Posisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan, terutama dalam akses terhadap layanan kesehatan ibu, partisipasi politik, dan kesempatan kerja formal yang setara. Ketertinggalan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat reformasi struktural yang lebih responsif gender. Upaya-upaya seperti peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi, penguatan peran perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan setara bagi perempuan perlu diprioritaskan. Tanpa langkah konkret dan berkelanjutan, Indonesia berisiko terus tertinggal dari negara-negara tetangga dalam mewujudkan kesetaraan gender yang substantif.

Indonesia diklasifikasikan sebagai negara *upper-middle income* oleh Bank Dunia sejak tahun 2020. Dalam kelompok ini, Indonesia seharusnya dapat menunjukkan performa yang lebih kuat dalam indikator sosial, termasuk di dalamnya kesetaraan gender. Namun, jika dilihat dari nilai GII, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara dalam klasifikasi yang sama. Posisi Indonesia yang masih berada di peringkat 108 lebih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menandakan adanya *gap* implementasi kebijakan inklusif berbasis gender.

Penyebab utamanya bukan hanya terkait tingkat pendapatan, tetapi juga efektivitas kebijakan publik dalam menghapus hambatan struktural yang dihadapi perempuan. Sebagai contoh, Malaysia dan Thailand telah menerapkan kebijakan afirmatif dan perlindungan kesehatan ibu secara lebih sistemik, yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian ibu dan peningkatan partisipasi kerja perempuan. Filipina,

sementara itu, dikenal memiliki sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta rendahnya representasi perempuan di posisi pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi kerja perempuan di sektor formal, serta beban kerja domestik yang tidak dibayar, juga menjadi faktor penghambat utama. Untuk meningkatkan posisinya dalam lanskap negara berpendapatan menengah, Indonesia perlu melakukan reformasi lintas sektor yang fokus pada integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

2.3 Tantangan Global Baru yang Memengaruhi Indonesia

Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan global baru yang saling berkaitan dan berdampak lintas sektor. Perubahan iklim, revolusi digital, ketidakpastian geopolitik, hingga krisis ekonomi global tidak hanya mengguncang stabilitas internasional, tetapi juga memperdagai berbagai bentuk ketimpangan sosial. Di antara ketimpangan tersebut, ketimpangan gender menjadi salah satu isu yang semakin kompleks, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam mendorong kesetaraan gender, namun dinamika global yang terus berubah menghadirkan tantangan baru yang kerap bersifat bias gender. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari perkembangan tersebut, mulai dari ketimpangan akses terhadap teknologi, keterbatasan partisipasi dalam ekonomi digital, hingga kerentanan yang lebih besar terhadap krisis iklim dan tekanan sosial-ekonomi. Tantangan-tantangan global ini tidak hanya memperkuat ketidaksetaraan yang telah ada, tetapi juga menciptakan hambatan baru bagi perempuan untuk memperoleh peluang yang setara dalam berbagai bidang.

Salah satu bentuk nyata dari tantangan global tersebut adalah kesenjangan digital berbasis gender, yang masih menjadi isu krusial di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Perempuan cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap infrastruktur digital maupun literasi digital dibandingkan laki-laki (UNCTAD 2021). Kesenjangan ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan perempuan, terutama di daerah perdesaan dan kelompok usia lanjut (Long et al., 2023). Adanya kesenjangan keterampilan digital, khususnya dalam bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) juga menghambat partisipasi perempuan di bidang teknologi (OECD 2018). Tantangan yang lebih mengkhawatirkan yaitu kekerasan berbasis gender *online*, di mana perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan, intimidasi, hingga praktik *doxing*, yang pada gilirannya akan membatasi kebebasan berekspresi dan ruang partisipasi mereka di ranah digital serta menciptakan rasa tidak aman yang berkelanjutan (Henry & Powell 2018).

Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Teknologi seperti *e-commerce* dan platform media sosial telah memungkinkan perempuan untuk memulai dan

mengembangkan usaha yang memberikan fleksibilitas, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memperluas jejaring sosial. Dengan adanya teknologi digital, perempuan dapat melakukan pekerjaan berbasis digital seperti pekerjaan jarak jauh atau *freelancing* yang dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dengan jadwal yang lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga (ILO 2020a).

Selain tantangan dalam ranah digital, tantangan global lainnya yang tak kalah serius dan semakin mendesak adalah krisis iklim. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap bencana iklim, Indonesia tidak terlepas dari risiko besar, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi paling rentan terhadap dampaknya. Perubahan pola cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan banjir, secara langsung memengaruhi mata pencaharian tradisional yang banyak digeluti perempuan, seperti pertanian dan perikanan (Terry 2009). Hal ini dapat menyebabkan kerawanan pangan dan gizi, di mana perempuan lebih rentan terhadap malnutrisi saat produksi pangan terganggu (UN Women, 2020). Selain itu, masih melekatnya peran gender tradisional pada perempuan di Indonesia membuat beban kerja perempuan meningkat. Dalam banyak masyarakat, perempuan merupakan penanggung jawab utama dalam pengadaan air, makanan, dan energi rumah tangga. Adanya krisis iklim membuat beban perawatan keluarga yang dikerjakan perempuan meningkat akibat penyakit yang berhubungan dengan iklim dan cedera dari bencana (UN Women 2025).

Dampak perubahan iklim semakin besar bagi perempuan pada kelompok rentan, termasuk perempuan miskin, perempuan penyandang disabilitas, serta perempuan adat. Krisis iklim yang menyebabkan kerusakan lingkungan memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan, seperti mendorong mereka ke dalam jurang kemiskinan, menurunkan harapan hidup mereka, dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (UN Women 2025). Laporan dari Oxfam International (2020) menyebutkan bahwa bencana terkait iklim berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi berbasis gender, karena perempuan umumnya bekerja di sektor informal yang tidak terlindungi oleh jaminan sosial dan rentan kehilangan pekerjaan pasca-bencana.

Tantangan global selanjutnya yang dapat memengaruhi Indonesia yaitu urbanisasi dan migrasi. Dalam arus perpindahan, perempuan memainkan peran yang sentral pada keduanya. Perempuan bermigrasi, baik ke perkotaan maupun antarnegara, untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik (Castles et al. 2014). Perempuan yang melakukan migrasi seringkali mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor-sektor pertanian, industri, atau pelayanan (ILO 2025). Namun, hal ini diwarnai dengan kerentanan dan risiko yang tinggi bagi perempuan. Di perkotaan, perempuan migran rentan terhadap kondisi kerja yang tidak layak, upah rendah, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap perumahan yang aman dan terjangkau (UN Women 2016). Mereka juga menghadapi risiko kekerasan dan eksplorasi di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal yang tidak aman. Migrasi internasional, terutama bagi pekerja migran perempuan, membawa risiko perdagangan manusia, penipuan rekrutmen, dan pelecehan (MOLISA et al. 2023). Kurangnya perlindungan hukum dan jaringan sosial yang memadai memperburuk kerentanan mereka.

Indonesia telah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial, namun banyak di antaranya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan gender. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 64,25 persen perempuan bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh tani, atau pekerja rumah tangga, yang umumnya tidak tercakup dalam program jaminan sosial formal. Sebagian besar program perlindungan sosial yang tersedia belum mempertimbangkan kondisi dan risiko spesifik yang dihadapi oleh kelompok ini. Misalnya, perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sering kali tidak mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan atau perlindungan saat hamil dan melahirkan. Hal ini membuat perempuan tidak mendapatkan jaminan saat sakit, hamil, atau pensiun (ILO 2020b).

Beberapa program bantuan sosial tunai sering kali tidak mempertimbangkan masalah gender dan memberdayakan perempuan. Uang tunai yang diberikan sebagai program bantuan mungkin tidak sepenuhnya dipegang atau dikelola perempuan sehingga program tersebut gagal mengatasi penyebab utama ketidaksetaraan gender (Duflo, 2012). Selain itu, perlindungan bagi korban kekerasan juga masih sangat terbatas di banyak negara sehingga para korban kekerasan berbasis gender sulit untuk mengakses perlindungan sosial yang terintegrasi dan mendapatkan keamanan (UN Women 2021).

2.4 Integrasi Strategi Global ke dalam Kebijakan Nasional

Indonesia telah berkomitmen untuk mengintegrasikan strategi global ke dalam kebijakan nasional sebagai upaya mengurangi ketimpangan gender. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender menjadi landasan bagi semua kementerian dan lembaga untuk memasukkan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional (Azis & Azarine 2023). Komitmen terhadap kesetaraan gender juga diwujudkan melalui aksi nyata dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 5 (kesetaraan gender).

Indonesia aktif dalam berbagai kerangka kerja internasional, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Beijing Platform for Action*, dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Implementasi strategi ini terlihat dalam berbagai program, seperti strategi *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) dari UNDP Indonesia yang bertujuan mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan meningkatkan inklusi sosial (UNDP Indonesia 2025).

Namun, meskipun berbagai strategi global seperti SDGs, CEDAW, dan *Beijing Platform for Action* telah diadopsi ke dalam kebijakan nasional, masih terdapat beberapa tantangan besar yang muncul dalam memastikan integrasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Pertama, dalam konteks teknologi digital, pemerintah Indonesia perlu memperkuat program-program literasi dan inklusi digital yang berfokus pada perempuan. Strategi ini harus diperkuat dengan cara mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam pendidikan STEM, memberikan beasiswa khusus, dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi perempuan di sektor teknologi (OECD 2018). Selain itu, kerangka hukum dan regulasi yang kuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender *online* harus diimplementasikan secara efektif, dengan penegakan

hukum yang tegas dan penyediaan layanan dukungan bagi korban. UN Women (2021) menyoroti lonjakan kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi secara daring, dan perlunya respon kebijakan yang adaptif.

Kedua, terkait krisis iklim, Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (PRK-KI) Indonesia perlu lebih mengintegrasikan perspektif gender secara eksplisit. Hal ini bermaksud untuk memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal, serta mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang secara khusus memberdayakan perempuan dalam menghadapi banyak perubahan iklim (Terry 2009). Partisipasi perempuan sangat penting dalam tata kelola iklim dan akses terhadap sumber daya (UNDP 2025).

Ketiga, dalam isu urbanisasi dan migrasi, kebijakan nasional harus memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia perempuan, baik pekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini mencakup perbaikan sistem rekrutmen, perlindungan hukum dari eksplorasi, penyediaan tempat penampungan yang aman, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan migran dan keluarganya. Selain itu, dibutuhkan juga kerangka kebijakan yang sensitif terhadap gender bagi pekerja migran perempuan. Untuk mencegah kekerasan dan pelecehan berbasis gender pada pekerja migran, dibutuhkan strategi dengan pendekatan multi-level yang menangani ketidaksetaraan gender dan diskriminasi jangka panjang di negara asal, transit, dan tujuan, serta intervensi yang lebih terarah (UN Women 2022b).

Keempat, mengenai perlindungan sosial, Indonesia perlu mengembangkan sistem perlindungan sosial yang responsif gender. Hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan jaminan sosial bagi perempuan di sektor informal, mengakui pekerjaan domestik yang tidak dibayar, dan merancang program bantuan tunai yang tidak hanya mencapai perempuan tetapi mampu memberdayakan mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga (Duflo 2012). Strategi program perlindungan sosial yang lebih inklusif gender dan program transfer tunai yang ditargetkan pada perempuan harus didukung oleh data terpisah gender yang kuat untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memantau dampak intervensi.

Integrasi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Mekanisme koordinasi yang efektif, pengalokasian anggaran yang responsif gender, dan pemantauan serta evaluasi yang berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan bahwa strategi global kesetaraan gender dapat terinternalisasi dan memberikan dampak nyata di tingkat nasional.

BAB 3

Potret
Ketimpangan
Gender
Indonesia



Potret Ketimpangan Gender Indonesia

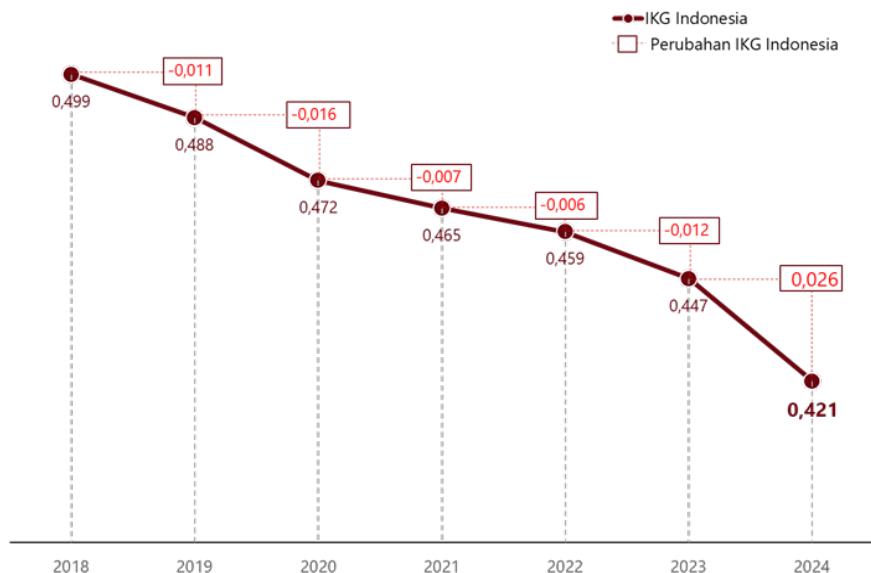
Posisi capaian kesetaraan gender Indonesia dibandingkan negara-negara lain hanya menduduki peringkat ke-108. Dibanding negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di bawah Timor Leste dan hanya unggul dari Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ini menandakan capaian kesetaraan gender Indonesia tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya akar ketimpangan gender di Indonesia didasari kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia. Budaya patriarki ini berkembang karena adanya keyakinan bahwa laki-laki memiliki otoritas dan peran yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Akibatnya, laki-laki diberikan ruang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, serta pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Dalam budaya patriarki, peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan juga dibedakan berdasarkan sistem sosial. Laki-laki dianggap memiliki fungsi produktif sebagai pencari nafkah di sektor publik, sementara perempuan memiliki fungsi reproduktif sebagai pengelola urusan domestik atau rumah tangga (Anto dkk. 2023). Hal ini menyebabkan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek lebih mendapat banyak hambatan dan tantangan dibandingkan laki-laki. Meskipun perkembangan capaian kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan arah yang positif, namun perkembangannya belum menunjukkan hasil yang optimal.

3.1 Perkembangan IKG Indonesia

Pada tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,421. Hal ini menunjukkan Indonesia kehilangan 42,1 persen potensi pembangunan manusianya akibat ketimpangan gender. IKG turun sebesar 0,026 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan penurunan terdalam selama periode 2018–2024 (Gambar 3.1). IKG juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2018. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam capaian kesetaraan gender di Indonesia. Semakin kecil IKG maka ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah (semakin membaik).

Indeks Ketimpangan Gender 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 3.1 Indeks Ketimpangan Gender Indonesia, 2018–2024

Penurunan IKG pada tahun 2024 didukung oleh perbaikan yang konsisten dari ketiga dimensi penyusunnya, terutama dimensi pasar tenaga kerja (Tabel 3.1). Dibanding tahun 2023, peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki menunjukkan adanya perbaikan capaian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. Pada dimensi kesehatan reproduksi juga menunjukkan perbaikan dengan semakin menurunnya angka perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan angka fertilitas remaja. Sementara itu, peningkatan capaian kesetaraan laki-laki dan perempuan pada dimensi pemberdayaan cenderung menurun. Keterlibatan perempuan di parlemen relatif stagnan, sementara peningkatan persentase perempuan berpendidikan minimal SMA lebih lambat dari laki-laki (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Indeks Ketimpangan Gender beserta Komponennya, 2018–2024

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Ketimpangan Gender	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421
Dimensi Kesehatan Reproduksi							
Proporsi perempuan 15–49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF)	0,214	0,181	0,163	0,154	0,140	0,126	0,094
Proporsi perempuan 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20)	0,241	0,271	0,263	0,262	0,265	0,258	0,248
Dimensi Pemberdayaan							
Persentase penduduk Laki-Laki 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA	38,27	39,77	41,63	41,30	42,06	42,62	43,78

Lanjutan Tabel 3.1

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase penduduk Perempuan 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA	30,99	31,85	34,63	34,87	36,95	37,60	37,64
Persentase anggota legislatif Laki-Laki	82,68	79,48	78,91	78,11	78,26	77,86	77,54
Persentase anggota legislatif Perempuan	17,32	20,52	21,09	21,89	21,74	22,14	22,46
Dimensi Pasar Tenaga Kerja							
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Laki-Laki (%)	82,80	83,25	82,41	82,27	83,87	84,26	84,66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Perempuan (%)	51,80	51,81	53,13	53,34	53,41	54,52	56,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

3.2 Perkembangan Dimensi Penyusun Indeks Ketimpangan Gender

IKG merupakan indeks komposit yang tersusun atas tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan reproduksi disusun oleh dua indikator, yaitu proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang saat melahirkan ALH pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Dimensi pemberdayaan disusun oleh dua indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas, keduanya terpisah menurut jenis kelamin. Sementara itu, dimensi pasar tenaga kerja disusun dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin.

Dimensi Kesehatan Reproduksi

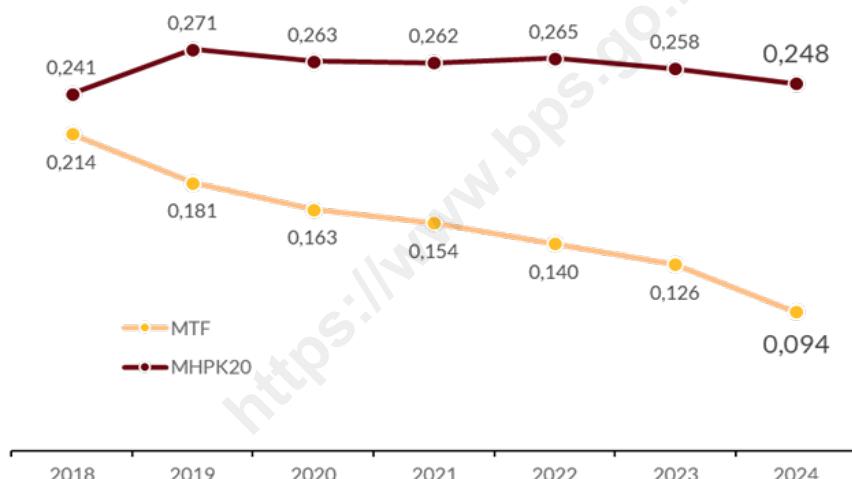
Kesehatan reproduksi berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan, termasuk kehamilan dan proses melahirkan. Proses tersebut pada dasarnya mengandung berbagai risiko kesehatan yang dapat mengancam keselamatan ibu, bahkan berujung pada kematian apabila tidak didukung oleh layanan kesehatan yang memadai. Pemilihan tempat persalinan dapat menentukan kondisi kesehatan ibu dan bayi. Keberadaan fasilitas kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan proses persalinan berlangsung dengan aman dan risiko kesehatan dapat diminimalkan. Namun demikian, ketersediaan fasilitas kesehatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah seorang ibu hamil akan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Rendahnya tingkat pendidikan dan faktor budaya menyebabkan masih banyak masyarakat memilih untuk melahirkan dengan dibantu tenaga nonkesehatan seperti dukun (Khoulasari 2024; Laksono 2020). Melahirkan di luar fasilitas kesehatan juga meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi, yang berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki akses yang setara ke perawatan medis yang diperlukan untuk memastikan persalinan yang aman (Mumtaz 2005).

Di Indonesia masih terdapat ibu-ibu yang melahirkan bayi tidak di fasilitas kesehatan dengan berbagai alasan, diantaranya karena faktor pengetahuan, faktor ekonomi,

Indeks Ketimpangan Gender 2024

budaya, dan lain-lain. Pada tahun 2024, masih terdapat 9,4 persen atau setara dengan 1 dari 11 perempuan berusia 15–49 tahun melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF). Namun angka ini turun 0,032 poin dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 3.2). Sejak tahun 2018, angka MTF ini secara konsisten mengalami penurunan yang menunjukkan adanya peningkatan akses dan penggunaan layanan kesehatan selama persalinan.

Keputusan seorang ibu untuk melahirkan pada tempat persalinan tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan ibu, dukungan suami atau keluarga, dan akses terhadap fasilitas kesehatan (Mardha 2022). Perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung untuk memilih melahirkan di fasilitas kesehatan. Kecenderungan ini didorong oleh peningkatan kesadaran pentingnya persalinan yang aman, pemahaman yang lebih baik tentang risiko kesehatan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan secara lebih mandiri. Di sisi lain, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Keterbatasan pendapatan, terutama pada keluarga dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), sering kali mendorong ibu untuk memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun atau tenaga kesehatan nonformal karena dianggap lebih terjangkau secara biaya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 3.2 MTF dan MHPK20 Indonesia, 2018–2024

Dari segi aksesibilitas, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga turut memengaruhi keputusan untuk memilih tempat melahirkan. Akses ke fasilitas kesehatan yang terjangkau berpotensi meningkatkan peluang kelahiran di fasilitas kesehatan (Khulsasari 2024). Data BPS menunjukkan ada peningkatan jumlah desa yang memiliki sarana kesehatan seperti rumah sakit dan poliklinik/balai pengobatan selama 2018–2024 (BPS 2018; BPS 2024). Peningkatan ini telah mendorong peningkatan jumlah perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan.

Sementara itu, pada indikator MHPK20 menunjukkan adanya penurunan persentase perempuan yang melahirkan di usia sangat muda yaitu kurang dari 20 tahun. Kehamilan pada usia remaja tidak terlepas dari terjadinya perkawinan pada usia yang sangat muda.

Di Indonesia, perkawinan dini banyak terjadi di beberapa wilayah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama yang berhubungan dengan budaya dan kondisi ekonomi. Perkawinan dini berdampak buruk pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Menurut penelitian Indiarti (2007), anak perempuan yang berusia 10–14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan dan melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20–25 tahun. Sementara itu, anak yang hamil pada usia 15–19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dua kali lebih besar dibandingkan perempuan berusia 20–25 tahun. Kesimpulannya, wanita yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun memiliki risiko yang tinggi selama kehamilan, proses persalinan, dan keadaan bayinya (Indiarti 2007).

Kehamilan remaja juga berdampak serius pada kesehatan reproduksi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Remaja perempuan usia 15–19 tahun rentan mengalami komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan yang dapat berujung pada kematian (Ningrum 2021). Selain itu, kehamilan remaja sering menimbulkan stigma, penolakan, kekerasan, dan risiko putus sekolah, terutama bagi yang belum menikah (WHO 2024). Kehamilan pada remaja juga meningkatkan risiko kesehatan bagi bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan dari ibu berusia di bawah 20 tahun lebih rentan mengalami berbagai masalah, seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kelahiran prematur, asfiksia saat lahir, infeksi, hingga cacat lahir yang berujung pada kematian neonatal (BKKBN dkk. 2017; WHO 2020). Selain itu, kehamilan remaja turut berkontribusi terhadap tingginya kasus stunting pada anak, salah satunya melalui hubungan dengan BBLR yang empat kali lebih sering dijumpai pada balita stunting dibandingkan balita normal (Irwansyah dkk. 2016). Untuk mencegah hal tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Tujuan diterbitkan UU tersebut untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon ibu, serta mengurangi risiko kesehatan yang dapat timbul akibat perkawinan dan kehamilan di usia dini serta mencegah kasus stunting di Indonesia.

Pada tahun 2024, MHPK20 tercatat sebesar 24,8 persen, artinya masih ada sekitar seperempat perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak pada usia kurang dari 20 tahun. Meskipun persentasenya menurun dari tahun sebelumnya, penurunannya sangat rendah yaitu hanya satu persen. Dari tahun ke tahun Penurunan angka MHPK20 yang terjadi selama periode 2018–2024 juga belum terlihat signifikan. Hal ini menunjukkan masih banyak praktik-praktik pernikahan usia dini di masyarakat dan tidak kunjung menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mencegah kehamilan pada usia dini. Tindakan tersebut salah satunya memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan risiko kehamilan usia dini. Hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan memperkecil risiko perkawinan di usia sangat muda.

Dimensi Pemberdayaan

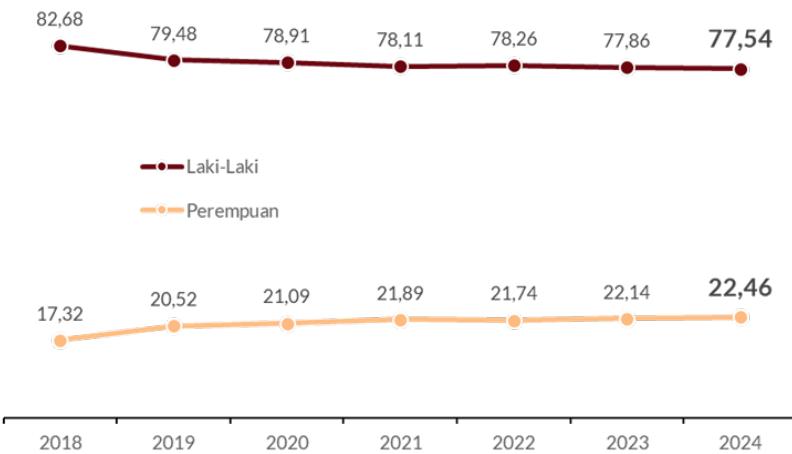
Dimensi pemberdayaan menggambarkan kondisi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan akses pendidikan. Selama ini, laki-laki

cenderung dominan, khususnya sebagai pengambil keputusan. Hal ini tidak lepas dari norma sosial yang membedakan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan kehidupan di masyarakat (Anto dkk. 2023).

Untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif bagi semua baik laki-laki maupun perempuan, diperlukan adanya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif (Anto dkk. 2023). Perempuan yang menjadi wakil di parlemen diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan yang tidak memihak, karena selama ini suara perempuan di parlemen tergolong kecil. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30 persen. Meskipun belum terealisasi secara penuh, peraturan tersebut sudah memberikan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Selama ini keterwakilan perempuan banyak menyuarakan masalah-masalah terkait isu perempuan dan anak. Isu-isu yang paling banyak diangkat oleh legislator perempuan diantaranya pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebagai contoh, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tahun 2022 merupakan produk legislatif yang banyak diperjuangkan oleh legislator perempuan dan kelompok masyarakat sipil.

Hasil Pemilu tahun 2024 menempatkan perempuan pada parlemen dengan proporsi sebesar 22,46 persen, lebih rendah dari target minimum 30 persen (Gambar 3.3). Meskipun demikian, sejak hasil Pemilu legislatif tahun 2019 sampai dengan 2024, jumlah legislatif perempuan menunjukkan peningkatan meskipun tidak secara signifikan (Gambar 3.3). Bahkan sejak tahun 2018 angka legislator perempuan meningkat lebih dari 5 persen poin.

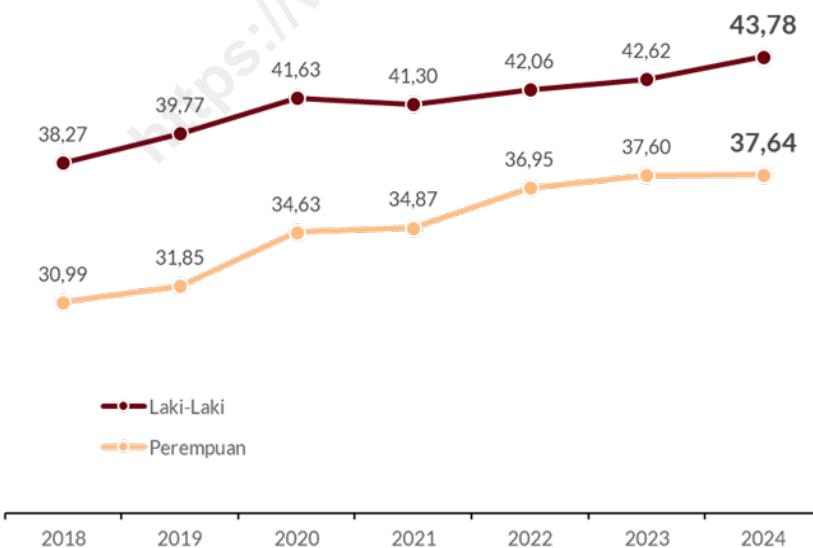
Beberapa faktor yang mendorong rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen diantaranya adalah persepsi jika ranah politik lebih cocok untuk laki-laki, proses seleksi dalam partai politik yang sebagian besar dilakukan oleh laki-laki, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM, dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan (Parawansa 2002). Menurut Parawansa (2002), faktor lainnya yang juga sangat berpengaruh pada keterbatasan kontribusi perempuan pada lembaga legislatif adalah keluarga, finansial, dan sistem multipartai.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 3.3 Persentase Anggota Legislatif Menurut Jenis Kelamin, 2018–2024

Dimensi pemberdayaan dalam pengukuran ketimpangan gender tidak hanya tercermin dari keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi juga dari proporsi perempuan yang menamatkan pendidikan minimal jenjang SMA. Pendidikan menengah atas dianggap sebagai jenjang pendidikan minimum agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial secara efektif. Akses pendidikan yang lebih tinggi pada laki-laki tercermin dari persentase tamat SMA penduduk laki-laki yang lebih tinggi dibanding penduduk perempuan (Gambar 3.4). Laki-laki secara konsisten mengalami peningkatan yang lebih stabil, sementara perempuan mulai mengalami stagnasi sejak 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 3.4 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas yang Berpendidikan Minimal SMA Menurut Jenis Kelamin, 2018–2024

Meskipun capaian pendidikan laki-laki pada indikator pendidikan SMA ke atas lebih unggul, namun jika dilihat dari indikator-indikator pendidikan yang cakupannya penduduk usia muda, capaian pendidikan perempuan lebih unggul. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang cakupannya penduduk usia 7–23 tahun, capaian pendidikan perempuan terlihat lebih baik dibandingkan laki-laki. Keunggulan capaian pendidikan laki-laki terlihat pada indikator pendidikan yang cakupannya penduduk usia lebih tua (25 tahun ke atas), seperti indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tabel 3.2). Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pendidikan laki-laki dan perempuan pada indikator persentase penduduk yang minimal tamat SMA lebih banyak dipengaruhi oleh penduduk usia yang lebih dewasa.

Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas (RLS) dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7–23 Tahun (APS) Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2024

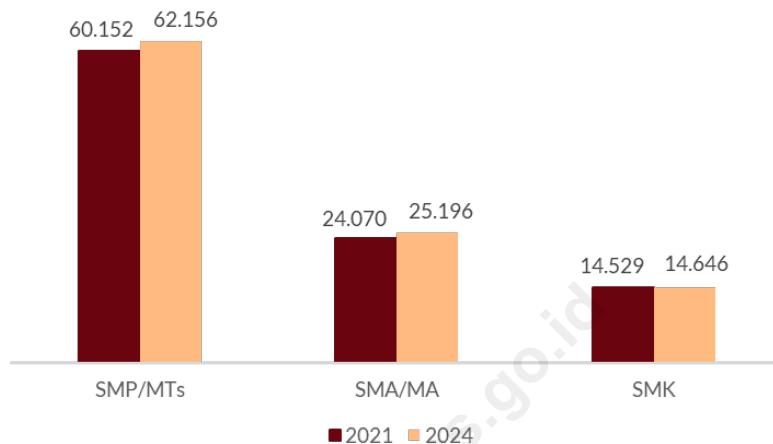
Indikator Pendidikan	2018		2024		Penambahan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RLS	7,72	8,62	8,54	9,17	0,82	0,45
APS						
7–12 tahun	99,17	99,27	99,15	99,22	-0,02	-0,05
13–15 tahun	94,51	96,26	95,45	96,92	0,94	0,47
16–18 tahun	70,98	73,04	72,92	76,41	1,94	3,37
19–23 tahun	27,36	28,50	26,35	31,78	-1,14	3,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2018 dan 2024

Dari Tabel 3.2 di atas, harapan kesetaraan gender pada bidang pendidikan di masa mendatang menunjukkan optimisme yang tinggi. Capaian pendidikan perempuan usia muda menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi khususnya pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan APS perempuan pada usia 16–18 tahun dan 19–23 tahun pada pendidikan yang lebih tinggi yaitu pada tingkat SMA dan S1/Perguruan Tinggi. Namun yang perlu mendapatkan perhatian dengan capaian ini adalah pendidikan laki-laki pada usia muda yang perkembangannya tidak secepat perempuan, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan capaian pendidikan di masa depan dengan kondisi capaian pendidikan laki-laki yang tertinggal.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan capaian kesetaraan gender terkait partisipasi sekolah adalah kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan. Semakin banyak sekolah yang tersedia akan meningkatkan partisipasi pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh, ketersediaan sekolah sampai wilayah perdesaan atau terpencil yang jauh dan transportasi yang tidak aman akan lebih berdampak pada kesempatan anak perempuan karena faktor keamanan dan norma sosial. Demikian pula jika akses sekolah lebih mudah dengan biaya terjangkau, maka semua anak akan memperoleh kesempatan bersekolah khususnya bagi keluarga miskin. Dengan demikian, penambahan jumlah sekolah mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memberikan dampak yang lebih besar bagi perempuan untuk mengakses pendidikan (Oey-Gardiner 1991).

Dukungan sarana pendidikan dari pemerintah menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Potensi Desa, pada tahun 2024 jumlah sekolah pada jenjang pendidikan menengah baik pada tingkat SMP, SMA, maupun SMK mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 (Gambar 3.5). Peningkatan ini diharapkan akan mendorong partisipasi sekolah semua penduduk ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah sekolah akan berpotensi meningkatkan partisipasi sekolah untuk semua gender, sehingga akan meningkatkan indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA.



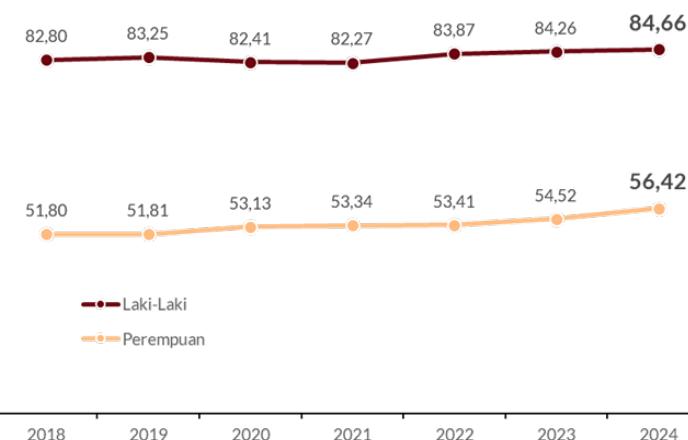
Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa Indonesia 2021 dan 2024

Gambar 3.5 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah, 2021 dan 2024

Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Kesetaraan gender pada dimensi pasar tenaga kerja dicerminkan dari indikator tunggal yaitu TPAK menurut jenis kelamin. TPAK menunjukkan besaran pasokan tenaga kerja yang tersedia. Partisipasi laki-laki di pasar tenaga kerja mencapai lebih dari 80 persen, sementara partisipasi perempuan berada di level diatas 50 persen (Gambar 3.6). Perbedaan capaian tersebut menunjukkan pembagian peran antara laki-laki-dan perempuan yang disebabkan norma sosial dan budaya. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah utama, dan memiliki peran publik, sementara peran perempuan pada lingkungan domestik untuk mengurus keluarga yang menyebabkan perbedaan angka TPAK tersebut. Dengan demikian, bagi perempuan yang bekerja akan mempunyai beban ganda yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga. Hal ini menyebabkan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pasar kerja menjadi lebih terbatas dibanding laki-laki (Hayati 2024).

Indeks Ketimpangan Gender 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 3.6 TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen), 2018–2024

TPAK perempuan pada 2024 sebesar 56,42 persen, meningkat 1,90 persen poin dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan TPAK laki-laki yang hanya sebesar 0,40 persen poin pada periode yang sama. Bahkan selama 2018–2024, TPAK perempuan naik 4,62 persen poin atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan kenaikan TPAK laki-laki. Peningkatan TPAK perempuan, tidak semata-mata mencerminkan faktor ekonomi, melainkan juga menjadi cerminan dari perubahan sosial yang sedang berlangsung. Seiring dengan meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, pergeseran nilai-nilai sosial mulai tampak, di mana peran perempuan tidak lagi dibatasi hanya dalam ranah domestik, tetapi juga mulai diterima dalam sektor publik dan dunia kerja.

Tabel 3.3 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2024

Indikator	2018		2024		Pertumbuhan (%)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah penduduk yang bekerja (ribu orang)	76,06	47,95	87,21	57,43	14,66	19,78
Total persentase tenaga kerja formal dan informal	100,00	100,00	100,00	100,00	–	–
Persentase tenaga kerja formal	46,29	38,20	45,82	36,32	13,50	13,90
Persentase tenaga kerja informal	53,71	61,80	54,18	63,68	15,66	23,42
Rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan buruh/karyawan/pegawai (rupiah)	3.064.920	2.398.674	3.541.231	2.766.149	15,54	15,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia 2024 dan Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2024

Kondisi kesetaraan gender pada pasar tenaga kerja di Indonesia tercermin dari perkembangan jumlah penduduk yang bekerja, pekerja sektor formal/informal dan upah pekerja. Meskipun jumlah penduduk laki-laki lebih banyak bekerja dari perempuan, namun pertumbuhan tenaga kerja laki-laki lebih lambat dari perempuan. Selama periode 2018–2024 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja laki-laki sekitar 15 persen, sementara perempuan sekitar 20 persen (Tabel 3.3). Ini mencerminkan partisipasi dan kontribusi perempuan pada pasar tenaga kerja semakin meningkat. Namun demikian, pertumbuhan pekerja perempuan lebih banyak terserap pada sektor informal. Serapan tenaga kerja informal pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Lebih dari 60 persen tenaga kerja perempuan bekerja di sektor informal, sementara laki-laki tercatat lebih rendah yaitu di atas 50 persen. Selain serapannya juga tinggi, pertumbuhan pekerja informal perempuan juga lebih cepat dari laki-laki selama periode 2018–2024 (Tabel 3.3). Pada dasarnya tenaga kerja informal tidak mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan tenaga kerja formal. Selain upah dan gaji yang lebih tinggi, tenaga kerja formal umumnya juga menerima jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, sehingga lebih terjamin keamanan dan kestabilan kerjanya.

Kontribusi tenaga kerja perempuan yang lebih banyak terserap pada sektor informal pada akhirnya berdampak pada upah/gaji yang diterima. Jika pekerja laki-laki menerima sekitar 3,5 juta rupiah/bulan, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 2,8 juta/bulan pada tahun 2024. Selain kontribusi perempuan pada sektor informal, kesenjangan upah ini dikarenakan posisi laki-laki pada dunia kerja umumnya berada pada posisi atau jabatan yang lebih tinggi, strategis atau manajerial yang secara otomatis memberikan gaji yang lebih tinggi. Beberapa hal ini pula yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender pada dunia kerja masih cukup besar. Oleh sebab itu, peran perempuan dalam pasar kerja perlu didukung dengan lingkungan kerja yang inklusif dan ketersediaan fasilitas pendukung keluarga seperti *day care*. Pembagian peran dan tanggungjawab domestik yang seimbang membantu perempuan untuk berkontribusi dalam pasar kerja. Dengan demikian, perempuan dapat memberikan peran nyata dalam ekonomi produktif tanpa dibatasi norma sosial yang cenderung patriarkis (Hayati 2024).

Ketiga dimensi penyusun menunjukkan masih adanya ketimpangan gender namun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Penurunan ketimpangan gender menunjukkan perbaikan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Terdapat dua prinsip utama guna mengukur apakah kesetaraan sudah tercapai. Pertama, akses terhadap hasil pembangunan sudah tersedia secara merata. Kedua, peluang untuk mengakses pembangunan sudah sama antarkelompok, antara laki-laki dan perempuan (Anto dkk. 2023). Ketika laki-laki dan perempuan memperoleh akses pendidikan, pelatihan, dan teknologi yang setara, ketimpangan gender akan menurun dan ketimpangan daya saing untuk masuk dalam pasar tenaga kerja berkurang. Pada akhirnya, baik perempuan maupun laki-laki akan memiliki peluang yang setara untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera.

BAB 4

Dinamika
Ketimpangan
Gender di
Provinsi dan
Kabupaten/Kota



Dinamika Ketimpangan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota

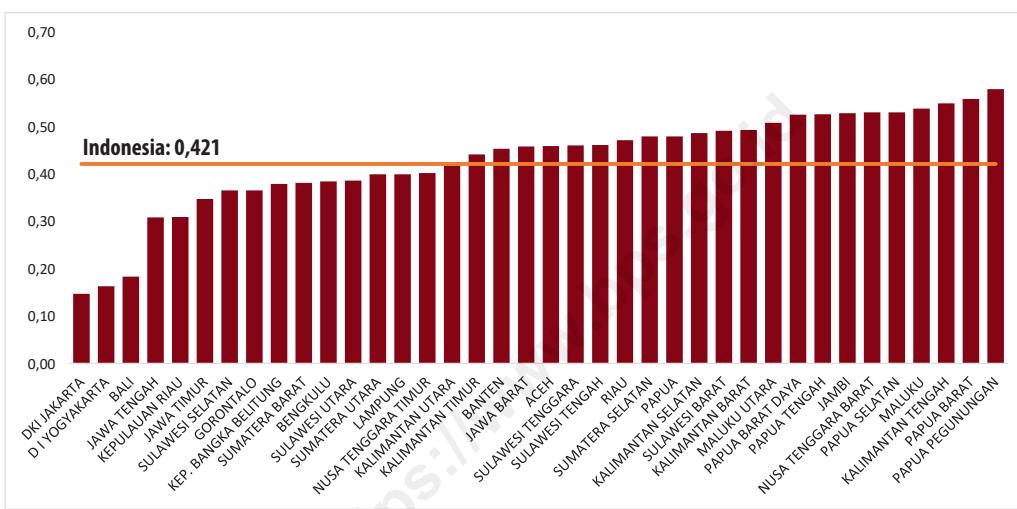
Ketimpangan gender masih menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan nasional, khususnya ketika ditinjau dari perspektif wilayah. Meskipun berbagai kebijakan telah diarahkan untuk mendorong kesetaraan gender, distribusi ketimpangan gender antarprovinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Ketimpangan ini tercermin dalam akses terhadap pendidikan, partisipasi angkatan kerja, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta status kesehatan perempuan. Beberapa provinsi menunjukkan capaian yang relatif lebih setara, sementara lainnya masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan gender.

Ketimpangan gender antarprovinsi di Indonesia masih menjadi isu penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ini adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mencerminkan sejauh mana perempuan tertinggal dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun nilai IKG Indonesia secara nasional menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, distribusi nilai ini di tingkat provinsi mengungkapkan ketimpangan yang cukup besar antarwilayah. Beberapa provinsi menunjukkan kemajuan pesat dalam menurunkan ketimpangan gender, sementara yang lain masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang menghambat pencapaian kesetaraan. Perubahan nilai IKG dari waktu ke waktu di berbagai daerah memberikan gambaran tentang dinamika pembangunan gender yang tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia.

4.1 Ketimpangan Gender Antarprovinsi: Distribusi dan Perubahan

Kesetaraan gender merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, tidak hanya karena kontribusinya dalam kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga karena peran biologisnya dalam mengandung dan melahirkan generasi penerus. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan dan gizi perempuan menjadi sangat penting, karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Tidak hanya itu, partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan dan pendidikan perempuan, juga menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa jauh masyarakat mengakui dan memberdayakan potensi perempuan secara setara.

Kesadaran pentingnya peran perempuan ini telah tercermin dalam berbagai kebijakan nasional maupun global. Salah satunya adalah melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada Tujuan ke-5 yang menekankan pentingnya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga telah diterjemahkan dalam berbagai regulasi nasional serta pendekatan pembangunan melalui pengarusutamaan gender di berbagai sektor. Namun demikian, pencapaian kesetaraan gender tidak dapat hanya diukur dari rata-rata nasional semata. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang sangat beragam secara geografis dan sosial-ekonomi, penting untuk melihat lebih dalam pada ketimpangan gender antarwilayah. Upaya menurunkan ketimpangan gender secara nasional harus disertai dengan perhatian terhadap disparitas antarprovinsi, karena perbedaan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan memberdayakan perempuan menciptakan variasi capaian yang cukup tajam antarwilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 4.1 Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2024

Pada tingkat regional, penurunan IKG pada tahun 2024 terjadi hampir di seluruh provinsi, kecuali enam provinsi yang mengalami peningkatan. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pencapaian ketimpangan gender terendah, yang mengartikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Provinsi DKI Jakarta paling baik. Provinsi selanjutnya dengan ketimpangan gender terendah dan berada di bawah angka 0,200 adalah DI Yogyakarta (0,163) dan Bali (0,183). Rendahnya angka IKG di ketiga provinsi ini didukung oleh perbaikan pada indikator proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF). Sementara itu, provinsi dengan IKG tertinggi didominasi provinsi-provinsi daerah Indonesia bagian Timur di antaranya, Papua Pegunungan (0,579), diikuti oleh Papua Barat (0,558) dan Maluku (0,538) (Gambar 4.1). Hal ini menunjukkan capaian pembangunan gender di wilayah bagian Timur Indonesia masih belum optimal sebagai dampak dari adanya ketimpangan gender di bidang kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

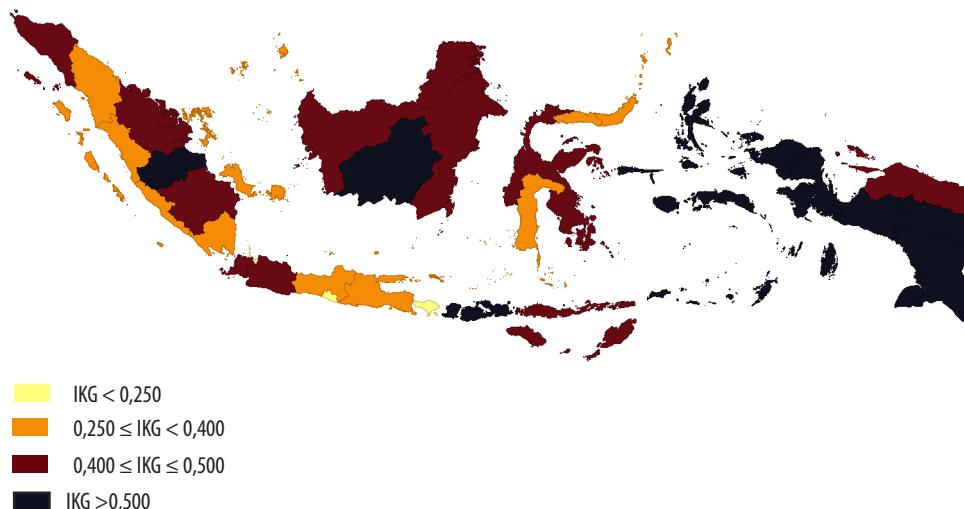
Selain berhasil menjadi provinsi dengan angka IKG terendah, DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan penurunan IKG tercepat pada tahun 2024, yaitu sebesar 42,57 persen. Angka ini didorong dari penurunan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) menjadi 0 poin, penurunan *gap* keterwakilan anggota legislatif, dan *gap* tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain DKI Jakarta, provinsi lain yang memiliki penurunan IKG tercepat adalah Bali (23,43 persen), Kepulauan Bangka Belitung (22,65 persen), Nusa Tenggara Barat (18,46 persen), dan Bengkulu (18,12 persen) (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Capaian IKG dan Komponen Penyusunnya pada Provinsi dengan Pertumbuhan Tertinggi dan Terendah, 2023 dan 2024

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	MTF		MHPK20		Keterwakilan di Legislatif (%)				Pendidikan Minimal SMA (%)				TPAK (%)				IKG	
					Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan		2023	2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tertinggi																		
DKI Jakarta	0,020	–	0,127	0,123	77,36	74,53	22,64	25,47	72,71	74,23	65,54	64,32	80,25	79,95	50,12	50,24	0,256	0,147
Bali	0,010	0,003	0,213	0,197	81,82	81,82	18,18	18,18	53,59	54,45	43,01	43,51	83,55	83,77	70,63	70,49	0,239	0,183
Kep. Bangka Belitung	0,087	0,038	0,320	0,310	90,48	77,78	9,52	22,22	40,75	41,51	37,18	38,05	85,38	86,20	50,31	50,57	0,490	0,379
Nusa Tenggara Barat	0,296	0,209	0,333	0,319	98,46	89,23	1,54	10,77	36,87	39,22	29,80	29,45	84,18	86,47	62,54	68,04	0,650	0,530
Bengkulu	0,109	0,048	0,316	0,301	84,44	77,78	15,56	22,22	44,50	45,67	40,07	40,34	84,99	85,10	56,22	57,74	0,469	0,384
Terendah																		
Riau	0,152	0,138	0,213	0,197	76,92	86,15	23,08	13,85	45,75	47,02	43,27	43,46	83,77	84,80	44,27	47,05	0,458	0,471
Papua Barat	0,304	0,280	0,299	0,306	85,71	91,43	14,29	8,57	56,12	53,55	49,64	43,78	79,21	81,42	53,82	59,80	0,537	0,558
Maluku	0,484	0,458	0,219	0,222	73,33	86,67	26,67	13,33	49,38	52,41	47,34	50,58	74,34	76,62	52,68	56,25	0,509	0,538
Kalimantan Timur	0,069	0,066	0,255	0,258	78,18	87,27	21,82	12,73	56,36	56,32	50,68	50,23	82,82	83,75	46,86	49,07	0,414	0,441
DI Yogyakarta	–	–	0,130	0,140	78,18	83,64	21,82	16,36	52,12	53,72	47,62	48,98	83,76	83,27	64,75	66,59	0,142	0,163

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Kondisi yang berbeda terlihat pada perubahan IKG DI Yogyakarta pada tahun 2024. Meskipun menempati peringkat kedua dalam capaian IKG pada tahun 2024, provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan peningkatan IKG tercepat, yaitu sebesar 14,79 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan *gap* pada indikator keterwakilan legislatif perempuan dan laki-laki sebesar 10,92 persen dan pendidikan minimal SMA sebesar 0,24 persen. Selain itu, pada dimensi kesehatan khususnya indikator proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali pada usia kurang dari 20 tahun (MHPK20) mengalami kenaikan 0,010 poin. Selain DI Yogyakarta, provinsi lain yang mengalami kenaikan IKG pada tahun 2024 adalah Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Riau, dan Kalimantan Tengah.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 4.2 Peta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2024

Ketimpangan gender di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup tajam antarprovinsi. Provinsi-provinsi yang ditandai dengan warna biru tua, seperti Papua Selatan, Papua Barat, Maluku, dan Kalimantan Tengah, menunjukkan IKG di atas 0,500 atau kategori tertinggi dalam ketimpangan gender. Terdapat 10 provinsi yang masuk dalam kategori ini, mengindikasikan masih besarnya tantangan dalam pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut.

Sementara itu, terdapat 3 provinsi yang memiliki nilai IKG kurang dari 0,250 (warna kuning muda), yang mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang rendah. Ketiga provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Kesetaraan gender yang tinggi pada ketiga provinsi tersebut mengindikasikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja bagi perempuan. Sebagian besar provinsi berada pada kategori sedang (warna orange dan merah tua), dengan nilai IKG antara 0,250 hingga 0,500. Kategori ini mencakup 25 provinsi, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia masih menghadapi ketimpangan gender dalam skala sedang.

Secara umum, peta pada Gambar 4.2 menegaskan bahwa tantangan ketimpangan gender di wilayah Indonesia belum merata. Wilayah timur Indonesia dan beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih spesifik wilayah dan kontekstual untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih baik di seluruh provinsi di Indonesia.

4.2 Ketimpangan Gender Antarkabupaten/kota

Selain ketimpangan gender di tingkat provinsi, ketimpangan gender pada level kabupaten/kota juga merupakan isu yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang responsif gender. Ketimpangan gender di tingkat lokal sering kali menunjukkan variasi yang lebih tajam dibandingkan tingkat provinsi. Hal ini mencerminkan kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi yang spesifik di masing-masing daerah.

IKG tahun 2024 menunjukkan variasi yang signifikan antarkabupaten/kota di Indonesia. Nilai IKG berkisar antara 0,080 hingga 0,865, yang mencerminkan disparitas yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan gender di berbagai wilayah kabupaten/kota. Kota Bukittinggi tercatat sebagai daerah dengan IKG terendah, yakni sebesar 0,080, disusul oleh Kota Padang Panjang (0,081) dan Kota Madiun (0,093). Di wilayah kota, capaian kesetaraan gender lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten. Hal ini disebabkan adanya kemudahan mengakses pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Budaya di wilayah perkotaan cenderung lebih terbuka dan egaliter dalam membagi peran gender, sehingga tingkat penerimaan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah atau mengambil posisi kepemimpinan lebih tinggi.

Sebaliknya, masih terdapat sejumlah daerah dengan nilai IKG yang relatif tinggi, terutama di wilayah Indonesia Timur. Dari 514 kabupaten/kota, terdapat 162 kabupaten/kota atau 31,51 persen dengan angka IKG yang tinggi yaitu di atas 0,500. Dengan kata lain, hampir sepertiga kabupaten/kota di Indonesia kehilangan setengah dari potensi pembangunan karena adanya ketimpangan gender. Bahkan di beberapa kabupaten/kota masih memiliki angka IKG di atas 0,750, atau kehilangan tiga perempat potensi pembangunan perempuan karena ketimpangan.

Lima kabupaten/kota dengan angka IKG di atas 0,850, adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Deiyai di Papua (Tabel 4.2). Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen daerah menjadi salah satu penyumbang utama ketimpangan di wilayah-wilayah ini. Di beberapa kabupaten di Papua Tengah, proporsi perempuan di DPRD bahkan mendekati nol persen. Selain itu, angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan juga jauh tertinggal dibanding laki-laki, dengan selisih lebih dari 20 persen di banyak kabupaten. Ketimpangan ini diperburuk oleh akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan maternal yang tercermin dari tingginya rasio kematian ibu melahirkan karena keterbatasan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Tingginya ketimpangan gender di kelima wilayah ini menandakan adanya tantangan besar dalam mendorong kesetaraan gender, khususnya terkait dengan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan maternal, dan keterwakilan dalam ranah publik. Ketimpangan yang tinggi ini juga dapat berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup perempuan serta memperbesar kerentanan mereka terhadap kemiskinan dan ketertinggalan.

Tabel 4.2 Lima Kabupaten/kota dengan Nilai Capaian Ketimpangan Gender Tertinggi dan Terendah, 2024

Kabupaten/Kota	IKG	MTF	MHPK20	Keterwakilan Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK(%)	
				Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(9)	(10)	(11)
Tertinggi									
Intan Jaya	0,865	0,357	0,514	100	—	16,96	7,32	79,01	55,03
Paniai	0,859	0,571	0,277	100	—	17,70	11,33	86,80	48,63
Sekadau	0,856	0,575	0,342	100	—	31,98	22,76	90,71	61,41
Dogiyai	0,853	1,000	0,248	100	—	14,58	9,94	93,58	92,75
Deiyai	0,853	0,339	0,116	100	—	17,25	3,56	72,41	41,31
Terendah									
Kota Bukittinggi	0,080	—	0,066	68,00	32,00	67,97	72,57	82,67	57,48
Kota Padang Panjang	0,081	—	0,044	80,00	20,00	71,45	75,49	76,35	56,34
Kota Madiun	0,093	—	0,056	79,31	20,69	77,86	71,3	78,87	62,81
Sleman	0,112	—	0,094	74,00	26,00	70,37	62,4	82,86	63,99
Kota Kediri	0,120	—	0,105	72,41	27,59	66,22	55,85	80,99	60,55

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Pada tahun 2024, beberapa kabupaten/kota mengalami perubahan baik perlambatan (penurunan) maupun pertumbuhan (kenaikan). Perubahan tersebut ada yang kecil, namun juga ada yang cukup ekstrem yaitu di atas 50 persen. Tabel 4.3 menyajikan kabupaten/kota yang mengalami perubahan IKG yang ekstrem, baik berupa perlambatan maupun pertumbuhan lebih dari 50 persen. Hal ini menunjukkan masih ada dinamika ketimpangan gender yang tidak merata antarwilayah. Sebanyak 13 kabupaten/kota tercatat mengalami perlambatan IKG lebih dari 50 persen, di antaranya Kota Pariaman, Madiun, Bengkulu Selatan, Kota Jakarta Selatan, dan Ponorogo. Penurunan IKG yang signifikan menunjukkan perbaikan dalam dimensi yang diukur oleh indeks, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, pendidikan, dan representasi politik. Wilayah-wilayah ini berpotensi menjadi *best practices* dalam hal pengarusutamaan gender, terlebih bila dibarengi dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah.

Sebaliknya, 16 kabupaten/kota mengalami pertumbuhan IKG lebih dari 50 persen. Daerah seperti Flores Timur, Natuna, Supiori, dan Pakpak Bharat mengalami lonjakan ketimpangan gender yang signifikan, yang menunjukkan meningkatnya hambatan struktural bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Wilayah-wilayah ini, sebagian besar merupakan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya layanan kesehatan dan pendidikan yang responsif gender, serta masih kuatnya norma sosial patriarkis. Beberapa kota besar seperti Kota Salatiga dan Kota Makassar menjadi salah satu kota yang memiliki lonjakan nilai IKG lebih dari 50 persen, yang menandakan bahwa tingginya pembangunan ekonomi tidak serta-merta menjamin perbaikan kesetaraan gender jika tidak dibarengi dengan pengarusutamaan gender dalam kebijakan.

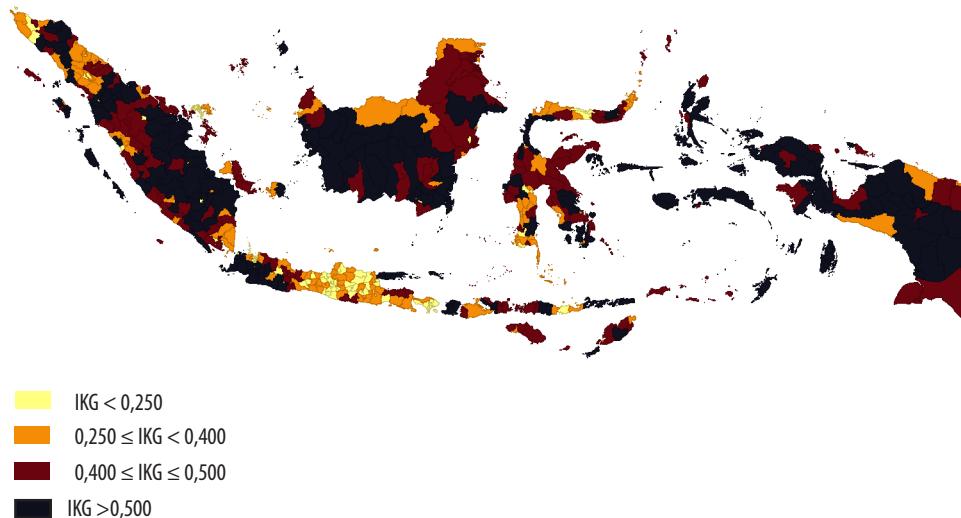
Tabel 4.3 Kabupaten/Kota dengan Perlambatan dan Pertumbuhan IKG lebih dari Lima Puluh Persen, 2024

Kabupaten/Kota dengan Perlambatan IKG Lebih dari 50 Persen	Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan IKG Lebih dari 50 Persen
(1)	(2)
Kota Pariaman	Flores Timur
Madiun	Natuna
Bengkulu Selatan	Kota Salatiga
Kota Jakarta Selatan	Supiori
Ponorogo	Nagan Raya
Kota Banjar Baru	Kota Sukabumi
Kota Prabumulih	Kota Pekanbaru
Kediri	Tegal
Kota Jakarta Utara	Takalar
Sumedang	Minahasa Tenggara
Toraja Utara	Kota Balikpapan
Kota Batu	Wonogiri
Kota Bengkulu	Kota Makasar
	Kota Binjai
	Pakpak Bharat
	Agam

Sumber :Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 4.3 menyajikan kondisi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. IKG diukur dalam rentang 0 sampai 1, di mana nilai mendekati 0 mencerminkan ketimpangan yang rendah dan nilai mendekati 1 mencerminkan ketimpangan yang tinggi. Berdasarkan klasifikasi, IKG tahun 2024 dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan nilai distribusinya. Keempat klasifikasi tersebut adalah IKG kurang dari 0,250, IKG berada di antara 0,250–0,399, IKG berada di antara 0,400–0,500, dan IKG lebih tinggi dari 0,500. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki nilai IKG lebih dari 0,500, yaitu sebanyak 162 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 31,52 persen yang ditandai dengan warna biru tua pada peta. Sementara itu wilayah dengan ketimpangan gender dibawah 0,250 tersebar terutama di Pulau Jawa, khususnya di bagian selatan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur. Terdapat sebanyak 99 kabupaten/kota atau 19,26 persen yang termasuk dalam kategori ini. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan signifikan dalam upaya memperkecil kesenjangan gender pada wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 4.3 memperlihatkan pola ketimpangan gender yang mengikuti garis pembangunan regional Indonesia. Wilayah-wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik (terutama di Jawa dan Bali) cenderung memiliki ketimpangan gender yang lebih rendah. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan tantangan geografis, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta norma sosial patriarkis yang kuat menunjukkan ketimpangan yang jauh lebih tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 4.3 Peta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/kota, 2024

IKG selama periode 2018 hingga 2024 mengalami pergeseran yang cukup signifikan menuju kelompok dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Pada tahun 2018, sebagian besar kabupaten/kota memiliki nilai IKG di atas 0,5. Sebanyak 298 kabupaten/kota berada pada kategori ini. Penurunan ini terus konsisten setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 jumlah kabupaten/kota pada kategori ini menjadi 162, atau menurun hampir setengahnya (Tabel 4.4). Di sisi lain terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota pada kategori nilai IKG dibawah 0,250. Selama periode 2018–2024 terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota pada kategori ini sebanyak 64 kabupaten/kota atau meningkat sekitar empat puluh persen (Tabel 4.4). Sementara itu, jumlah daerah dengan nilai IKG yang berada di angka 0,250 hingga 0,399 juga mengalami peningkatan sekitar dua kali lipat selama periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa banyak kabupaten/kota mengalami perbaikan dalam hal ketimpangan gender sehingga berpindah ke kategori ketimpangan yang lebih rendah.

Tabel 4.4 Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kategori Ketimpangan, 2018–2024

Kategori Ketimpangan	Tahun						
	2018 ¹	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rendah ($\text{IKG} < 0,250$)	35	39	43	43	49	73	99
Rendah-Sedang ($0,250 \leq \text{IKG} < 0,399$)	64	72	79	97	102	101	124
Sedang-Tinggi ($0,400 \leq \text{IKG} \leq 0,500$)	120	113	135	141	138	142	132
Tinggi ($\text{IKG} > 0,500$)	298	293	260	236	228	201	162
Jumlah	513	514	514	514	514	514	514

Catatan: ¹Lombok Utara tidak terdapat sampel Sakernas Agustus 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Pergeseran di atas menunjukkan indikasi kesetaraan gender yang lebih baik. Untuk mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender yang lebih tinggi, diperlukan pendekatan lintas sektor yang terpadu. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja, politik, dan pengambilan keputusan publik. Peran masyarakat dan sektor swasta juga tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai kesetaraan gender, baik melalui perubahan pola pikir, kebijakan internal, maupun praktik sosial. Kerjasama dengan lembaga internasional juga menjadi kunci untuk saling berbagi praktik baik, memperkuat kapasitas, dan memperoleh dukungan dalam menangani berbagai aspek ketidaksetaraan gender yang kompleks.

4.3 Disparitas Ketimpangan Gender Intra-Provinsi

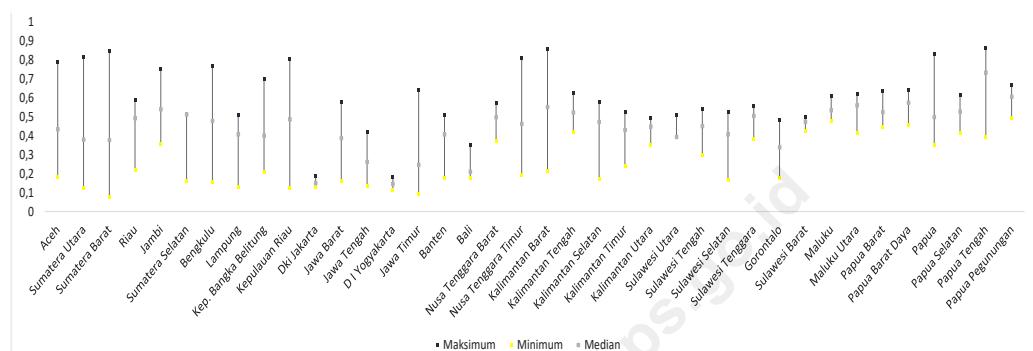
Isu kesetaraan gender telah menjadi salah satu pilar utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Meski berbagai kebijakan telah dirancang untuk mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya ketimpangan gender masih terjadi secara signifikan di banyak wilayah Indonesia, termasuk dalam skala yang lebih sempit yaitu di dalam satu provinsi. Fenomena ini dikenal sebagai disparitas intra-provinsi dalam aspek ketimpangan gender, yaitu kesenjangan kondisi dan akses antara laki-laki dan perempuan yang berbeda tingkatannya antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama.

Ketika terdapat kabupaten atau kota yang tertinggal dalam hal akses pendidikan bagi perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, atau layanan kesehatan reproduksi, maka capaian provinsi secara agregat akan tertahan oleh kinerja wilayah-wilayah yang belum berkembang secara optimal. Hal ini menjadikan provinsi tersebut tampak stagnan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender atau menurunkan IKG, meskipun sebagian wilayahnya telah menunjukkan kemajuan. Selain itu, ketimpangan antarwilayah juga berisiko menciptakan kesenjangan pengalaman dan peluang hidup antarperempuan, yang tergantung pada lokasi geografis mereka. Perempuan di daerah perkotaan memiliki lebih banyak akses terhadap pendidikan tinggi dan peluang kerja formal, sementara perempuan di daerah terpencil masih dibatasi oleh norma budaya, infrastruktur yang minim, atau rendahnya keberpihakan kebijakan lokal terhadap isu gender. Akibatnya, program-program pemberdayaan perempuan yang dirancang di tingkat provinsi belum tentu menjangkau secara adil seluruh kelompok sasaran.

Pada tahun 2024, disparitas ketimpangan gender terendah dimiliki oleh DKI Jakarta dengan jarak antara kabupaten/kota terendah dan tertinggi sebesar 0,057 (Gambar 4.4). Pada umumnya seluruh wilayah administratif di DKI Jakarta memiliki pencapaian yang relatif merata dalam hal ketimpangan gender. IKG tertinggi di DKI Jakarta adalah Kabupaten Kepulauan Seribu. Terpisahnya wilayah ini secara geografis dari daratan utama DKI Jakarta menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kondisi ini berkontribusi terhadap kesenjangan pencapaian pembangunan gender antara Kepulauan Seribu dan wilayah administratif lainnya di DKI Jakarta, yang pada umumnya memiliki infrastruktur dan akses layanan publik yang lebih baik.

Indeks Ketimpangan Gender 2024

Sedangkan disparitas IKG tertinggi terjadi di Sumatera Barat sebesar 0,716 poin (Gambar 4.4). Di provinsi ini terjadi perbedaan yang sangat besar antara IKG Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten terjauh di Sumatera Barat, akses kesehatan di wilayah ini masih sangat terbatas, oleh sebab itu masih banyak perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Selain itu, tingkat usia pernikahan kurang dari 20 tahun cukup tinggi, hampir mencapai sepertiga dari keseluruhan perempuan berusia 15–49 tahun yang pernah kawin. Hasil Long Form SP2020 menunjukkan bahwa Angka Fertilitas Remaja (ASFR) perempuan muda umur 15–19 tahun di kabupaten ini mencapai 50 kelahiran per 1000 perempuan usia 15–19 tahun, angka ini merupakan angka yang tertinggi di Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat 2024). Kabupaten Kepulauan Mentawai juga tidak memiliki perwakilan perempuan di legislatif tahun 2024.

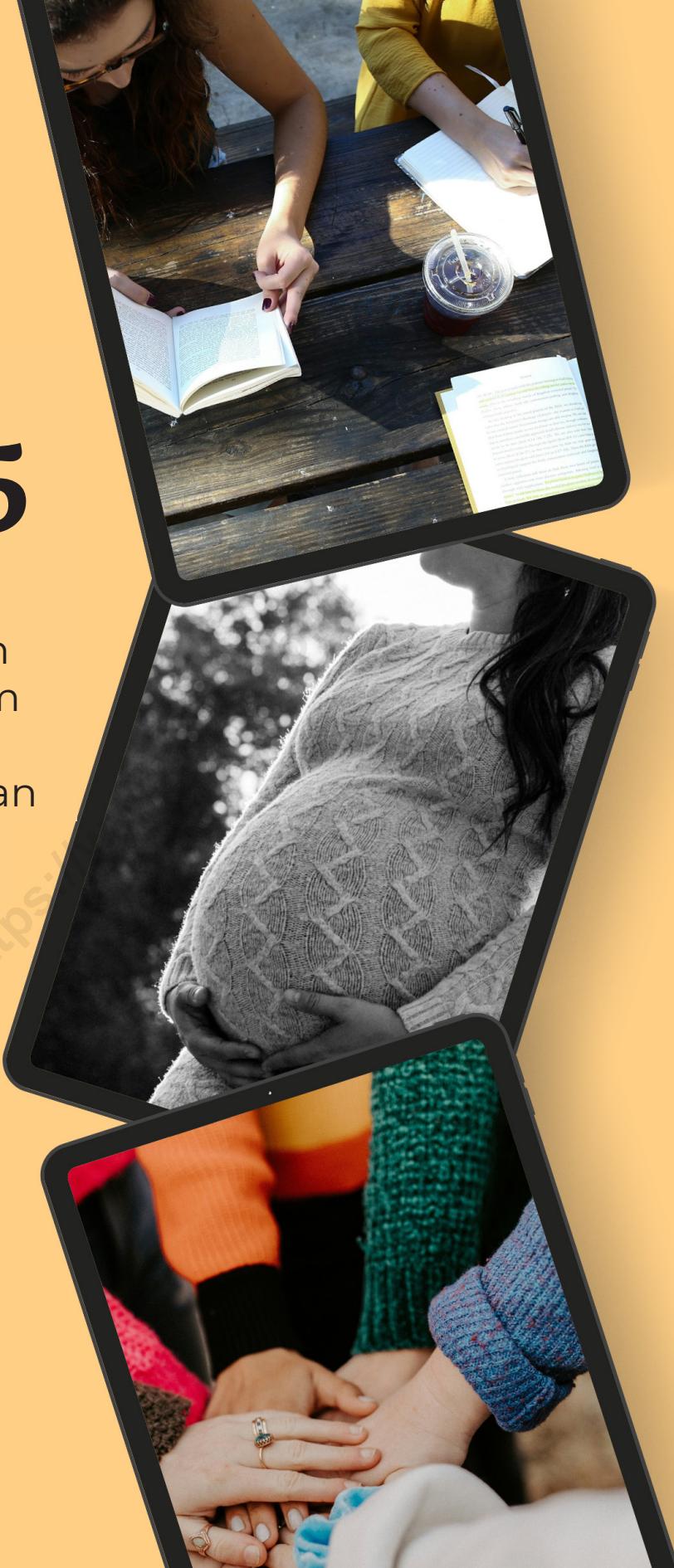


Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 4.4 Disparitas IKG Antarkabupaten/Kota Menurut Provinsi, 2024

BAB 5

Indeks
Ketimpangan
Gender dalam
Konteks
Pembangunan
dan Strategi
Penurunan



Indeks Ketimpangan Gender dalam Konteks Pembangunan dan Strategi Penurunan Ketimpangan

5.1. Hubungan IKG dengan IPM, IPG, dan IDG

UNDP (2016) menekankan jika konsep pembangunan manusia berkelanjutan harus bersifat setara dan inklusif, memberikan kesempatan yang sama dan tidak ada ketimpangan. Ketimpangan akan memperlambat dan memperburuk capaian pembangunan manusia, salah satunya adalah ketimpangan gender. Dengan kata lain, memperkuat kesetaraan gender akan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat untuk menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif. Selain sebagai tujuan dalam pembangunan, kesetaraan gender juga merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan kesetaraan gender (BPS 2024).

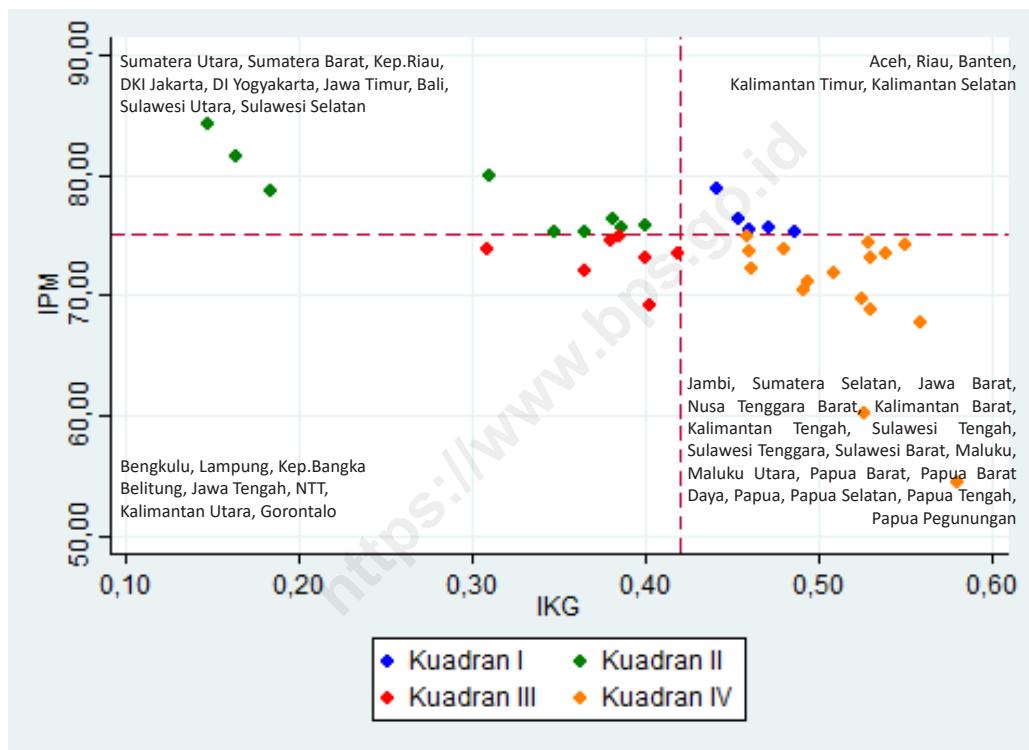
IKG merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan gender. Jika angka IKG tinggi akan menghambat pencapaian pembangunan manusia. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti oleh kesetaraan gender. Angka IKG yang menunjukkan ketimpangan gender idealnya berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IKG dan IPM

Terdapat hubungan negatif antara IKG dan IPM yang ditunjukkan oleh angka korelasi keduanya yaitu sebesar -0,609. Dengan kata lain, semakin rendah IKG atau semakin menunjukkan kesetaraan gendernya, maka semakin tinggi IPM. Pada Gambar 5.1 menunjukkan keterkaitan antara IKG dan IPM pada tingkat provinsi. Idealnya provinsi-provinsi dengan IKG di bawah IKG Nasional memiliki IPM di atas IPM Nasional. Pada kondisi ini, capaian pembangunan manusia tinggi juga terindikasi oleh partisipasi baik laki-laki maupun perempuan yang lebih setara dalam mengakses sumber daya. Provinsi-provinsi yang masuk kategori ini berada di kuadran II, dimana menunjukkan provinsi yang memiliki nilai IKG di bawah angka nasional dan IPM di atas angka nasional. Provinsi-provinsi pada kuadran ini tidak hanya berhasil mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi, tetapi juga menunjukkan kesetaraan gender yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Provinsi-provinsi yang masuk dalam kategori ini antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Posisi ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola pembangunan manusia yang inklusif, dengan ketimpangan gender yang semakin menurun.

Di sisi lain, korelasi yang cukup tinggi diindikasikan juga oleh capaian provinsi yang berada pada kuadran IV, yaitu provinsi dengan IKG di atas IKG Nasional dan IPM di bawah IPM Nasional. Provinsi pada Kuadran IV menggambarkan provinsi dengan tantangan pembangunan yang paling berat. Provinsi dalam kuadran ini menghadapi tantangan ganda dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sekaligus menekan ketimpangan gender. Beberapa provinsi yang masuk dalam kategori ini antara lain Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta seluruh provinsi di Pulau Papua.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024, diolah penulis

Gambar 5.1 Keterkaitan IKG dan IPM, 2024

Meskipun memiliki korelasi yang cukup baik, namun masih ada provinsi yang memiliki keberhasilan capaian pembangunan manusia yang diikuti oleh terjadinya ketimpangan gender dan berlaku sebaliknya. Kondisi ini ditunjukkan pada dua kuadran lainnya, yaitu Kuadran I dan Kuadran III. Provinsi pada kuadran I memiliki capaian IPM yang tinggi, namun masih menghadapi tingkat ketimpangan gender yang tinggi. Artinya, meskipun kualitas pembangunan manusia di provinsi-provinsi ini sudah baik, kesenjangan gender masih menjadi persoalan yang harus di atasi. Beberapa provinsi di kuadran ini antara lain Aceh, Riau, Banten, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Upaya penguatan kesetaraan gender menjadi penting untuk melengkapi capaian pembangunan

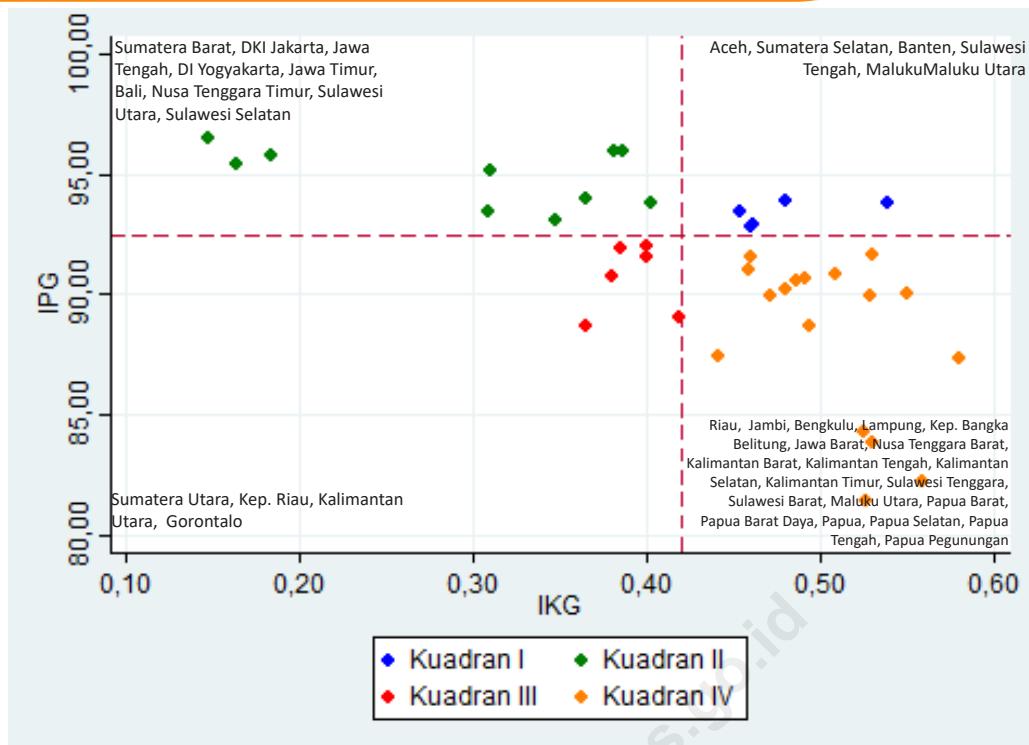
manusianya. Provinsi pada kuadran III memiliki IPM yang masih rendah, namun tingkat ketimpangan gendernya juga rendah. Artinya, meskipun pembangunan manusia di provinsi-provinsi ini masih tertinggal, kesetaraan gender relatif sudah lebih baik. Provinsi yang termasuk dalam kuadran ini antara lain Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Upaya peningkatan pembangunan manusia di provinsi ini tetap perlu diutamakan, sembari mempertahankan kesetaraan gender yang sudah tercapai.

IKG dengan IPG dan IDG

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu ukuran yang dianggap lebih tepat menggambarkan pemberdayaan sekaligus kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan (BPS 2016). IKG menunjukkan kerugian atau kehilangan potensi pembangunan manusia karena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses kebutuhan dasar. Sementara itu, IPG mengukur kesetaraan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses kebutuhan dasar. Jika diukur korelasinya antara IKG dengan IPG tidak menunjukkan hubungan yang cukup erat. Korelasi IKG dengan IPG tahun 2024 tercatat sebesar $-0,482$. Kondisi kesetaraan gender yang ideal ketika IKG rendah dan IPG tinggi yang ditunjukkan pada Gambar 5.2 kuadran II. Namun demikian, kesetaraan gender tidak serta merta menunjukkan capaian pembangunan yang seimbang. Kuadran II mencerminkan provinsi dengan tingkat pemberdayaan perempuan yang tinggi dan ketimpangan gender yang rendah. Provinsi-provinsi pada kuadran ini menunjukkan kesenjangan gender telah ditekan dan perempuan telah memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dalam pembangunan manusia. Beberapa provinsi dalam kuadran ini antara lain Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Provinsi dalam kuadran I menunjukkan IPG yang tinggi, namun masih menghadapi tingkat ketimpangan gender yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya paradoks, di mana pembangunan perempuan, dalam hal pencapaian IPM, telah baik, namun kesenjangan struktural gender dalam dimensi lainnya masih tinggi. Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, dan Maluku termasuk dalam kuadran ini. Sedangkan Provinsi pada kuadran III memiliki tingkat ketimpangan gender yang rendah, namun pencapaian pemberdayaan perempuan masih rendah. Kondisi ini dapat mencerminkan wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pembangunan perempuan, meskipun ketimpangan gender secara struktural tidak terlalu besar. Beberapa provinsi dalam kuadran ini antara lain Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Gorontalo.

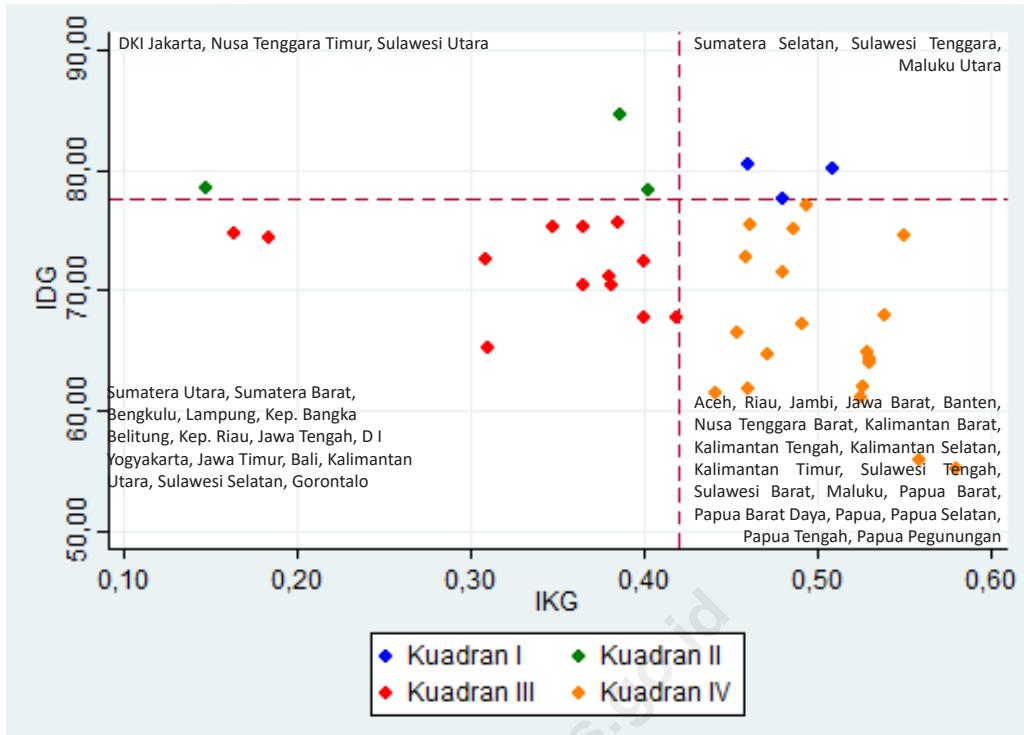
Kuadran IV menunjukkan provinsi dengan tantangan paling kompleks, yaitu tingkat ketimpangan gender yang tinggi dan pembangunan perempuan yang masih rendah. Provinsi-provinsi dalam kuadran ini memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan gender untuk menekan ketimpangan dan meningkatkan pembangunan perempuan secara bersamaan, dari segi pengetahuan, ekonomi, dan kesehatan. Provinsi-provinsi yang masuk dalam kuadran ini antara lain Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024, diolah penulis

Gambar 5.2 Keterkaitan IKG dan IPG, 2024

Sementara itu korelasi IKG dengan IDG hanya sebesar $-0,417$. Jika IKG menunjukkan kerugian atau kehilangan potensi pembangunan manusia karena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses kebutuhan dasar, maka IDG mengukur kesetaraan dalam akses, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara berada pada kesetaraan gender yang tinggi, meskipun capaian pembangunan di Nusa Tenggara Timur sama-sama rendah. Angka IDG yang tinggi di Nusa Tenggara Timur lebih banyak didorong oleh kesetaraan semua variabel pembentuk IDG. Sementara itu terdapat 19 provinsi atau setengahnya yang tidak menunjukkan kesetaraan gender dalam pencapaian pembangunan manusia dan pemberdayaannya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024, diolah penulis

Gambar 5.3 Keterkaitan IKG dan IDG, 2024

5.2. Tantangan dan Peluang Kesetaraan Gender di Indonesia

Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia

a. Budaya Patriarki yang Mengakar

Setiap negara memiliki berbagai kendala dalam mewujudkan kesetaraan gender, tidak terkecuali Indonesia. Norma sosial dan budaya patriarki yang cukup kental di Indonesia menempatkan perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan (Sultana 2010). Norma dan budaya patriarki telah menjadi dasar dari berbagai ketimpangan gender karena membatasi peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan dunia kerja.

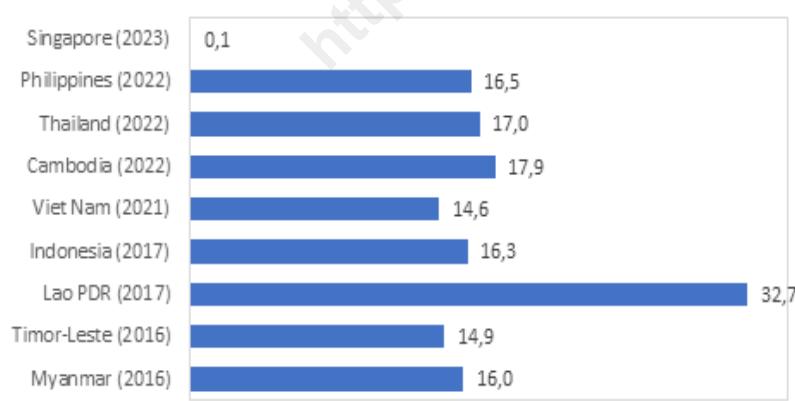
Dalam keluarga, terdapat pandangan umum yang menempatkan laki-laki pada peran publik dan perempuan pada peran domestik. Laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga sehingga memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan penting keluarga, termasuk keuangan. Beban ekonomi yang lebih besar pada laki-laki sebagai kepala keluarga, berakibat pada terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan produktif dan kemandirian ekonomi. Dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, peran perempuan secara historis dan struktural sering kali dibatasi oleh norma-norma yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas. Hal ini membuat posisi perempuan

dalam ruang publik cenderung dibatasi, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Sementara itu, dalam dunia kerja peran perempuan sering kali dibentuk oleh norma gender yang menganggap laki-laki lebih layak menduduki posisi yang lebih dominan di tempat kerja.

Pandangan-pandangan yang bersifat patriarki tersebut juga diperkuat dengan praktik-praktik dalam masyarakat yang berpotensi menghambat pencapaian kesetaraan gender seperti budaya pernikahan dini di beberapa wilayah dan terjadinya kasus-kasus kekerasan perempuan baik yang terjadi di dalam rumah maupun di luar rumah. Oleh sebab itu, berbagai permasalahan terkait ketimpangan gender serta praktik-praktik tersebut perlu untuk diidentifikasi sehingga mempermudah upaya untuk mengatasinya. Praktik-praktik di masyarakat yang dapat mendorong ketimpangan gender diantaranya pernikahan dini di kalangan remaja dan adanya kasus-kasus kekerasan perempuan baik di ranah keluarga maupun di ranah publik.

Dalam masyarakat patriarki, nilai seorang perempuan sering kali diukur dari status pernikahan dan peran domestiknya. Di beberapa wilayah, budaya ini memberikan pandangan jika menikahkan anak perempuan lebih awal merupakan bentuk "pengamanan" masa depan dan kehormatan keluarga. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja-remaja Indonesia.

Berdasarkan data-data yang disajikan dalam website *World Bank* data, kasus pernikahan dini di negara-negara ASEAN terbilang tinggi. Pada tahun 2017, terdapat 16,3 persen perempuan Indonesia yang berumur 20–24 tahun yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Dengan kata lain, perkawinan usia remaja pada kelompok umur 20–24 tahun Indonesia cukup tinggi. Angka ini termasuk lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Laos, Kamboja, Thailand, dan Philipina (Gambar 5.4). Namun data yang disajikan oleh *World Bank* mempunyai keterbatasan karena sumber data dan kondisi tahun yang berbeda-beda pada setiap negara.



Sumber: World Bank, World Bank Data

Gambar 5.4 Persentase Perempuan Usia 20–24 Tahun yang Usia Perkawinannya di bawah 18 Tahun, 2017

Sebagian besar kasus perkawinan pada usia remaja di Indonesia terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia bagian Tengah dan Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua

Selatan memiliki angka persentase perkawinan remaja hampir 15 persen di tahun 2024 (Tabel 5.1). Tingginya angka perkawinan di beberapa wilayah Indonesia merupakan kombinasi antara tradisi, kemiskinan, dan rendahnya kesempatan penduduk untuk mengakses sumber daya pembangunan (Mathur, Greene, dan Malhotra 2003). Selain itu, ketidakkonsistenan berbagai implementasi regulasi pernikahan di Indonesia turut berkontribusi pada pertumbuhan jumlah pernikahan usia anak. Sulitnya implementasi UU Pernikahan no.16 tahun 2019 disebabkan adanya pernikahan di bawah tangan (kawin siri), dispensasi usia penikahan pada Pengadilan Agama, kurangnya sanksi akibat pengabaian UU, masih kentalnya budaya masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat (Azizah 2021; Dewi & Jumaah 2022).

Tabel 5.1 Sepuluh Provinsi Tertinggi pada Indikator Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun, 2024

Provinsi	Persentase	IKG
(1)	(2)	(3)
Nusa Tenggara Barat	14,96	0,530
Papua Selatan	14,40	0,530
Sulawesi Barat	10,71	0,491
Kalimantan Barat	10,05	0,493
Kalimantan Tengah	9,89	0,549
Sulawesi Tenggara	9,40	0,460
Sulawesi Tengah	9,06	0,461
Papua Tengah	9,05	0,526
Sulawesi Utara	8,96	0,386
Sumatera Selatan	8,45	0,479
Indonesia	5,90	0,421

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024 dan Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender 2024

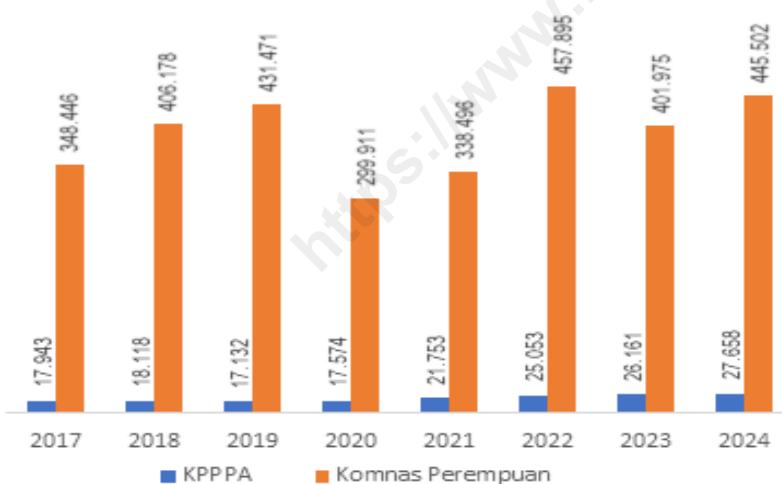
Dampak dari pernikahan pada usia muda (di bawah usia 18 tahun), tidak hanya memengaruhi kesehatan tetapi juga pendidikan anak (Mahato 2016). Anak perempuan berusia di bawah 18 tahun belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak (Rodgers 2012). Pernikahan usia dini juga mempersempit kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh di Nusa Tenggara Barat dengan kasus pernikahan usia dini tertinggi mempunyai pencapaian pendidikan perempuan yang lebih rendah. Persentase perempuan yang menamatkan SMA di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 hanya 29,45 persen dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,28 atau hanya sampai lulus kelas 1 SMP (BPS 2024). Kedua indikator pendidikan tersebut menduduki posisi terendah dari provinsi lainnya di Indonesia (selain Papua).

Angka pernikahan usia dini sebagai salah satu faktor pendorong ketimpangan gender terlihat dari angka IKG pada sepuluh provinsi tertinggi pada Tabel 5.1. Angka IKG pada kesepuluh provinsi tersebut (kecuali Sulawesi Utara) lebih tinggi dari IKG Nasional. Namun demikian, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada perempuan, namun juga laki-laki. Menurut UNICEF (2011), perkawinan usia remaja merupakan masalah sosial yang besar

dan merupakan pelanggaran hak-hak anak baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini didasarkan pada pengingkaran hak-hak dasar atas kesehatan, gizi, pendidikan, kebebasan dari kekerasan, pelecehan, dan eksplorasi, serta perampasan masa bertumbuhnya anak dan remaja.

b. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi baik di dunia maupun di Indonesia. Menurut Konvensi PBB CEDAW dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi gender yang melanggar hak asasi perempuan dan kebebasan fundamental (UN 1993). Bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan digital (*online*), dan kekerasan struktural. Sampai saat ini, angka kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan baik yang diterima melalui Komnas Perempuan maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Selama periode 2017–2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima Komnas Perempuan meningkat sebesar 27,85 persen, sedangkan yang diterima KPPPA meningkat sebesar 54,14 persen (Gambar 5.5). Peningkatan tersebut menunjukkan jika kekerasan perempuan sering terjadi dalam masyarakat. Di sisi lain, peningkatan angka tersebut juga menunjukkan sikap keberanian perempuan untuk melapor kejadian kekerasan yang menimpanya. Selain itu, terdapat indikasi adanya peningkatan akses terhadap layanan pengaduan dan informasi sehingga mempermudah proses pelaporannya.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komnas Perempuan

Gambar 5.5 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Komnas Perempuan, 2017–2024

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) mengungkapkan jika satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Kekerasan terbanyak terjadi pada lingkungan keluarga. Hasil SPHPN

menunjukkan satu dari lima perempuan di kelompok usia 15–16 tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2024 (KemenPPPA, BPS, dan FEB LD UI 2024).

Kekerasan terhadap perempuan akan berdampak pada capaian pembangunan. Kekerasan ini akan menimbulkan akibat kumulatif sehingga membatasi partisipasi pada lingkungan sosialnya, terganggunya kesehatan perempuan, dan terganggunya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya (Retnaningrum 2009). Dalam capaian pembangunan khususnya bidang ekonomi, perempuan yang mengalami kekerasan berpotensi kehilangan pekerjaan dan penurunan produktivitasnya (Kumari dkk. 2009). Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan berpotensi untuk meningkatkan ketimpangan gender.

c. Ketidaksetaraan Akses Terhadap Pendidikan dan Kehidupan yang Layak

Praktik pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan akan menimbulkan keterbatasan akses perempuan terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kehidupan layak (ekonomi). Akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terkecuali bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya akses pendidikan bagi laki-laki lebih tertinggal dibandingkan perempuan. Data tahun 2024 menunjukkan jika angka putus sekolah lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula anak laki-laki yang putus sekolah (Tabel 5.2). Menurut Jere, Eck, & Zubairi (2022), penyebab kondisi tersebut adalah kemiskinan dan kebutuhan untuk bekerja. Hal ini diperjelas UNICEF (2021) bahwa faktor ekonomi dan norma sosial karena budaya patriarki menyebabkan anak laki-laki lebih rentan keluar dari sekolah. Kewajiban laki-laki untuk mencari nafkah ketika dibutuhkan memiliki konsekuensi putus sekolah. Akibatnya dari sisi pendidikan laki-laki lebih terlihat tertinggal dari perempuan khususnya pada usia muda.

Tabel 5.2 Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2016 dan 2024

Jenis Kelamin (1)	SD Sederajat (2)	SMP Sederajat (3)	SMA/SMK Sederajat (4)
2016			
Laki-Laki	1,01	5,89	5,34
Perempuan	0,50	3,30	4,60
2024			
Laki-Laki	0,14	0,95	1,27
Perempuan	0,08	0,69	0,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2024 dan Potret Pendidikan Indonesia 2016

Meskipun angka putus sekolah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, namun angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Tabel 5.3). Angka RLS merupakan penduduk usia 25 tahun ke atas, sementara angka putus sekolah pada usia anak di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan ketertinggalan pendidikan penduduk laki-laki terjadi pada usia muda. Hal ini diperkuat oleh indikator

lainnya seperti pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7–23 tahun. Laki-laki usia 15 tahun ke atas unggul pada jenjang SMP dan SMA, sementara perempuan unggul pada jenjang perguruan tinggi dan SD. Persentase perempuan yang tidak punya ijazah juga lebih unggul dari laki-laki (Tabel 5.3). Sementara itu APS penduduk usia 7–23 tahun perempuan unggul di semua jenjang. Hal ini bisa ditarik kesimpulan jika indikator pendidikan menyasar pada kelompok penduduk usia muda maka indikator pendidikan perempuan lebih unggul dari laki-laki, sebaliknya jika indikator menyasar kalangan penduduk sampai usia tua maka indikator pendidikan laki-laki lebih unggul dari perempuan.

Tabel 5.3 Beberapa Indikator Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, 2024

Indikator Pendidikan (1)	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas		
Tidak punya ijazah	9,51	13,37
SD	24,43	25,01
SMP	22,93	22,64
SMA/SMK	33,65	28,07
Perguruan Tinggi	9,48	10,91
Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
7–12 tahun	99,15	99,22
13–15 tahun	95,45	96,92
16–18 tahun	72,92	76,41
19–23 tahun	26,35	31,78
Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS)	9,17	8,54

Sumber: BadanPusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024 dan Statistik Pendidikan 2024

Dari studi pada 140 negara, ketertinggalan pendidikan laki-laki juga disebabkan ketidaksesuaian pendidikan dengan minat anak laki-laki, serta adanya disiplin yang keras, hukuman fisik, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya di sekolah yang berdampak negatif pada prestasi akademik anak laki-laki, sehingga berpotensi meningkatkan angka ketidakhadiran dan putus sekolah (Jere, Eck, & Zubairi 2022). Melihat kondisi ini, selayaknya diperlukan langkah-langkah tegas untuk mengondisikan anak laki-laki tetap bersekolah. Terkait kesetaraan gender, kebijakan tidak hanya ditujukan melindungi pendidikan perempuan, namun juga untuk menjamin lingkungan pendidikan yang lebih aman bagi laki-laki. Pada dasarnya pendidikan yang inklusif dan adil merupakan hak semua orang. Budaya patriarki menguntungkan sekaligus merugikan laki-laki dalam hal mengakses sumber daya pendidikan.

Selain pendidikan, kebutuhan dasar lainnya adalah kehidupan layak salah satunya dengan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Terkait kesetaraan gender dalam konteks kehidupan layak dan partisipasi ekonomi merujuk pada bagaimana perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang setara untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara adil. Adanya

konstruksi sosial peran ganda perempuan yaitu domestik dan publik, telah membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif. Hal ini ditunjukkan dari angka TPAK dan EPR perempuan yang jauh lebih kecil dari laki-laki (Tabel 5.4). Bagi perempuan yang bekerja, hampir seperempatnya merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar, sementara laki-laki hanya kurang dari 10 persen (Tabel 5.4). Ketimpangan gender juga terjadi pada pasar tenaga kerja, tercermin dari persentase perempuan yang lebih banyak bekerja paruh waktu dan di sektor informal dibandingkan laki-laki. Hal ini juga berdampak pada kesenjangan upah yang diterima, yang menunjukkan perempuan mendapatkan upah lebih rendah dari laki-laki. Selisih rata-rata upah setiap bulannya mencapai 775 ribu rupiah (Tabel 5.4).

Tabel 5.4 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2024

Indikator Ketenagakerjaan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	84,66	56,42
<i>Employment to Population Ratio (EPR)</i>	78,72	49,18
Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja paruh waktu	16,87	34,68
Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor Formal	65,70	34,30
Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor Informal	56,37	43,63
Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang status pekerjaan utamanya pekerja keluarga/tidak dibayar	6,10	24,33
Rata-rata upah buruh	3.541.231	2.766.149

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia 2024, Keadaan Pekerja Indonesia Agustus 2024 dan Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2024

Ketimpangan ini akan merugikan negara karena perempuan turut memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Melalui partisipasi tenaga kerja, akan meningkatkan produksi yang berdampak pada kenaikan pendapatan, tabungan, dan kontribusi pajak di tingkat rumah tangga, masyarakat, dan nasional (UN Women 2024). Peluang untuk pemberdayaan ekonomi perempuan cukup besar, terlihat dari peran perempuan pada UMKM yang cukup besar. Menurut data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2023, terdapat 64,5 persen pelaku UMKM di tanah air merupakan perempuan. Namun demikian, masih terjadi kesenjangan penggunaan digital pada UMKM yang dikelola perempuan. Hanya sekitar 12 persen saja yang telah mengadopsi teknologi digital secara efektif (Kementerian UMKM 2024). Kesenjangan digital ini dapat menghambat potensi UMKM untuk berkembang lebih jauh di era ekonomi digital saat ini. Oleh sebab itu, selain pelatihan teknis terkait usaha, perlu dilakukan pelatihan digital untuk mendorong UMKM agar segera bertransformasi dan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, pembangunan ekosistem bisnis yang memberikan akses pada bantuan finansial seperti KUR, regulasi, dan bantuan teknis lainnya juga penting untuk menggiatkan UMKM. Dengan kata lain, berarti memberdayakan UMKM juga memberdayakan perempuan.

Peluang dalam Kesetaraan Gender di Indonesia

a. Arah Kebijakan Terkait Ketimpangan Gender

Upaya menurunkan ketimpangan gender di Indonesia memerlukan pendekatan yang terarah dan berbasis bukti. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan alat ukur penting yang disusun untuk menggambarkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. IKG mengukur ketimpangan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Ketimpangan yang masih terjadi di ketiga dimensi tersebut menuntut hadirnya kebijakan publik yang bersifat afirmatif, yaitu intervensi khusus dan bersifat sementara yang ditujukan untuk memberikan perlakuan lebih kepada kelompok yang tertinggal, dalam hal ini perempuan, agar dapat mencapai kondisi yang setara dalam pembangunan.

Dimensi Kesehatan Reproduksi

Arah kebijakan dalam dimensi ini ditujukan untuk memastikan perempuan usia subur memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas. Dua indikator IKG untuk dimensi ini adalah proporsi perempuan 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan (MTF) dan yang melahirkan anak pertama pada usia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Data IKG tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam indikator ini. Capaian nasional untuk MTF menurun dari 0,126 pada tahun 2023 menjadi 0,094 pada tahun 2024, sementara indikator MHPK20 juga mengalami penurunan dari 0,258 menjadi 0,248 pada periode yang sama.

Strategi afirmatif dalam dimensi ini dijalankan melalui beberapa instrumen kebijakan yang saling mendukung. Pertama, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, khususnya bagi remaja perempuan yang sudah menikah, yang sebelumnya menjadi kelompok yang kurang terjangkau oleh layanan formal. Aturan ini menekankan pentingnya edukasi kontrasepsi berbasis hak, konseling kesehatan seksual dan reproduksi, serta penyediaan layanan yang bersifat ramah remaja dan bebas stigma.

Kedua, PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak menjadi landasan teknis dalam memastikan ketersediaan layanan persalinan yang aman di fasilitas kesehatan. Kebijakan ini mengatur pemenuhan standar minimal untuk puskesmas, rumah sakit, serta tenaga kesehatan dalam pelayanan kebidanan dan kandungan. Strategi afirmatif ini secara praktis telah dilaksanakan melalui penyediaan bidan desa, posyandu remaja, dan klinik ramah anak, yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terutama di provinsi dengan nilai MTF dan MHPK20 yang tinggi.

Selain itu, penguatan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan melalui layanan berbasis masyarakat juga merupakan bagian dari strategi afirmatif yang telah berjalan. Program ini dikoordinasikan bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PPPA, dan BKKBN, dengan pendekatan lintas sektor melalui platform Generasi Berencana (GenRe) dan program Sekolah Siaga Kependudukan.

Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk membekali remaja perempuan dengan informasi yang tepat dan akses yang lebih luas terhadap layanan.

Dimensi Pemberdayaan

Pada dimensi pemberdayaan, kebijakan diarahkan untuk lebih meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan menengah ke atas. Data tahun 2024 mencatat bahwa persentase anggota legislatif perempuan mencapai 22,46 persen, meningkat dari tahun sebelumnya (22,14 persen) dan merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, persentase perempuan usia 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan minimal SMA mencapai 37,64 persen, masih di bawah laki-laki sebesar 43,78 persen.

Strategi afirmatif dalam bidang politik telah diimplementasikan melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (Pasal 245). Ketentuan ini diperkuat melalui penerapan sistem *zipper*, yaitu penyusunan daftar calon dengan pola bergantian antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan calon perempuan tidak ditempatkan di posisi yang tidak strategis (Pasal 246). Di sisi kelembagaan partai, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan setiap partai memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan tingkat pusat, serta mendorong rekrutmen dan pelatihan kader perempuan secara berkelanjutan.

Dalam sektor pendidikan, kebijakan afirmatif juga diarahkan untuk mengatasi hambatan struktural yang menyebabkan rendahnya penyelesaian pendidikan menengah di kalangan perempuan. Upaya ini diwujudkan melalui program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dengan komponen alokasi khusus bagi siswa perempuan miskin dan rentan putus sekolah. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik & Afirmasi Papua dan 3T) yang diberikan kepada pelajar dari daerah 3T, Papua, Papua Barat, dan anak TKI. Kuota dan seleksi program ini mengutamakan partisipasi anak perempuan, terutama dari komunitas adat atau minoritas yang memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi. Selain itu, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 secara eksplisit menargetkan peningkatan angka partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah dan tinggi, sejalan dengan pendekatan berbasis kesetaraan gender.

Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Fokus kebijakan dalam dimensi pasar tenaga kerja diarahkan pada peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, sehingga perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam kegiatan ekonomi produktif. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data tahun 2024 menunjukkan bahwa TPAK perempuan meningkat menjadi 56,42 persen, naik dari 54,52 persen pada tahun 2023, namun masih jauh di bawah TPAK laki-laki yang mencapai 84,66 persen.

Lebih lanjut, laporan *Women, Business and the Law (WBL) Index* 2024 mencatat bahwa skor Indonesia hanya berada di angka 70,6, lebih rendah dari rata-rata kawasan Asia Timur dan

Pasifik sebesar 73,0 (World Bank 2024). Aspek dengan skor terendah Indonesia berada pada pernikahan (skor 40) dan kewirausahaan (skor 50), yang mencerminkan masih adanya hambatan regulatif terhadap mobilitas ekonomi dan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku usaha.

Strategi afirmatif dalam dimensi ini mencakup upaya perlindungan hukum, perbaikan ekosistem kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis pelatihan dan kewirausahaan yang responsif gender. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan perlindungan maternitas dan perlakuan kerja yang adil, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan diperkuat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menetapkan hak perempuan atas cuti melahirkan selama tiga bulan, larangan pemutusan hubungan kerja selama masa kehamilan dan menyusui, serta perlindungan atas jam kerja malam dan jenis pekerjaan tertentu.

Penyediaan fasilitas kerja yang mendukung perempuan, seperti ruang laktasi, penitipan anak (*daycare*), dan toilet perempuan yang layak, telah mulai di praktikkan melalui penguatan regulasi dan harmonisasi antarkementerian, termasuk dalam rancangan atau turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang dalam proses pembahasan bersama KemenPPPA dan Kemnaker. Selain itu, strategi afirmatif juga diwujudkan melalui pelatihan kerja berbasis gender yang diselenggarakan oleh BLK, BLK Komunitas, dan dinas ketenagakerjaan, dengan fokus pada keterampilan digital, domestik bernilai ekonomi, dan kewirausahaan mikro bagi perempuan rentan. Upaya ini diperkuat oleh reformasi sektor informal dan UMKM, melalui penyederhanaan perizinan OSS, akses KUR khusus perempuan, serta penguatan koperasi dan usaha komunitas perempuan. Selain itu, literasi keuangan dan digital terus dikembangkan secara terintegrasi oleh KemenkopUKM, OJK, dan Kominfo untuk mendukung kemandirian ekonomi perempuan di era digital.

5.3 Strategi dalam Memanfaatkan Peluang dan Menjawab Tantangan

Tantangan ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia sebagian besar bersumber dari struktur sosial-budaya yang tidak setara, norma patriarkal yang mengakar, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Namun demikian, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi tersebut, baik melalui kebijakan yang telah ada maupun melalui perubahan praktik sosial yang sedang berlangsung di tingkat komunitas. Strategi dalam menghadapi tantangan ini perlu dibangun dengan pendekatan yang holistik, berbasis wilayah, dan responsif terhadap konteks lokal.

Pernikahan usia anak masih menjadi isu kritis di berbagai wilayah, meskipun secara normatif batas usia minimal perkawinan telah diatur melalui UU No. 16 Tahun 2019. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa 5,09 persen perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18, dengan angka tertinggi tercatat di Nusa Tenggara Barat dan Papua Selatan. Praktik ini tidak hanya berdampak pada rendahnya capaian pendidikan perempuan, tetapi juga berkontribusi pada tingginya angka kehamilan remaja dan pengangguran muda. Strategi yang dapat dikembangkan mencakup penguatan edukasi

tentang hak anak dan kesehatan reproduksi di sekolah dan komunitas, keterlibatan tokoh agama dan adat dalam penyuluhan, serta pembatasan dispensasi nikah melalui pendekatan hukum progresif dan layanan konseling keluarga di tingkat desa

Dalam bidang pendidikan, ketimpangan gender terlihat tidak hanya pada tingkat akses, tetapi juga dalam keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Capaian pendidikan perempuan di beberapa daerah masih tertinggal dari laki-laki. Di sisi lain, anak laki-laki dari rumah tangga miskin cenderung mengalami putus sekolah lebih awal untuk bekerja, sebagaimana diidentifikasi dalam studi Setyonaluri (2013), yang menyebut bahwa tekanan ekonomi rumah tangga menjadi alasan utama anak laki-laki tidak melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, strategi perlu diarahkan pada penguatan skema beasiswa afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan ADik untuk kelompok perempuan dan anak laki-laki dari kelompok rentan. Integrasi pendidikan kesetaraan gender ke dalam kurikulum, serta pelatihan guru untuk menangani isu-isu berbasis gender juga menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan ke depannya.

Ketimpangan dalam partisipasi ekonomi juga masih signifikan. Data IKG 2024 menunjukkan bahwa TPAK perempuan mencapai 56,42 persen, jauh di bawah laki-laki (84,66 persen). Selain itu, proporsi pekerja perempuan yang tidak dibayar dalam kegiatan ekonomi keluarga tercatat sebesar 24,33 persen, menunjukkan masih kuatnya peran domestik yang tidak diakui sebagai kontribusi ekonomi. Strategi pemberdayaan ekonomi perlu diarahkan pada penyediaan pelatihan kerja berbasis gender, dukungan terhadap UMKM dan koperasi perempuan, serta perluasan akses keuangan melalui KUR dan program digitalisasi usaha. Studi World Bank (2023) juga menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas dan peningkatan literasi keuangan digital bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Di sektor formal, penyediaan ruang laktasi, penitipan anak, dan cuti keluarga perlu diperkuat sebagai bentuk dukungan terhadap pekerja perempuan.

Dari sisi penguatan sosial dan norma komunitas, strategi berbasis lokal terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan nilai dan perilaku. Praktik baik seperti pelibatan tokoh adat dan agama dalam Forum Anak Daerah, Forum Musyawarah Desa yang inklusif gender, dan pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan telah dilaporkan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Kegiatan edukasi publik melalui PKK, posyandu, serta media lokal juga perlu diperluas dengan pendekatan budaya yang sesuai.

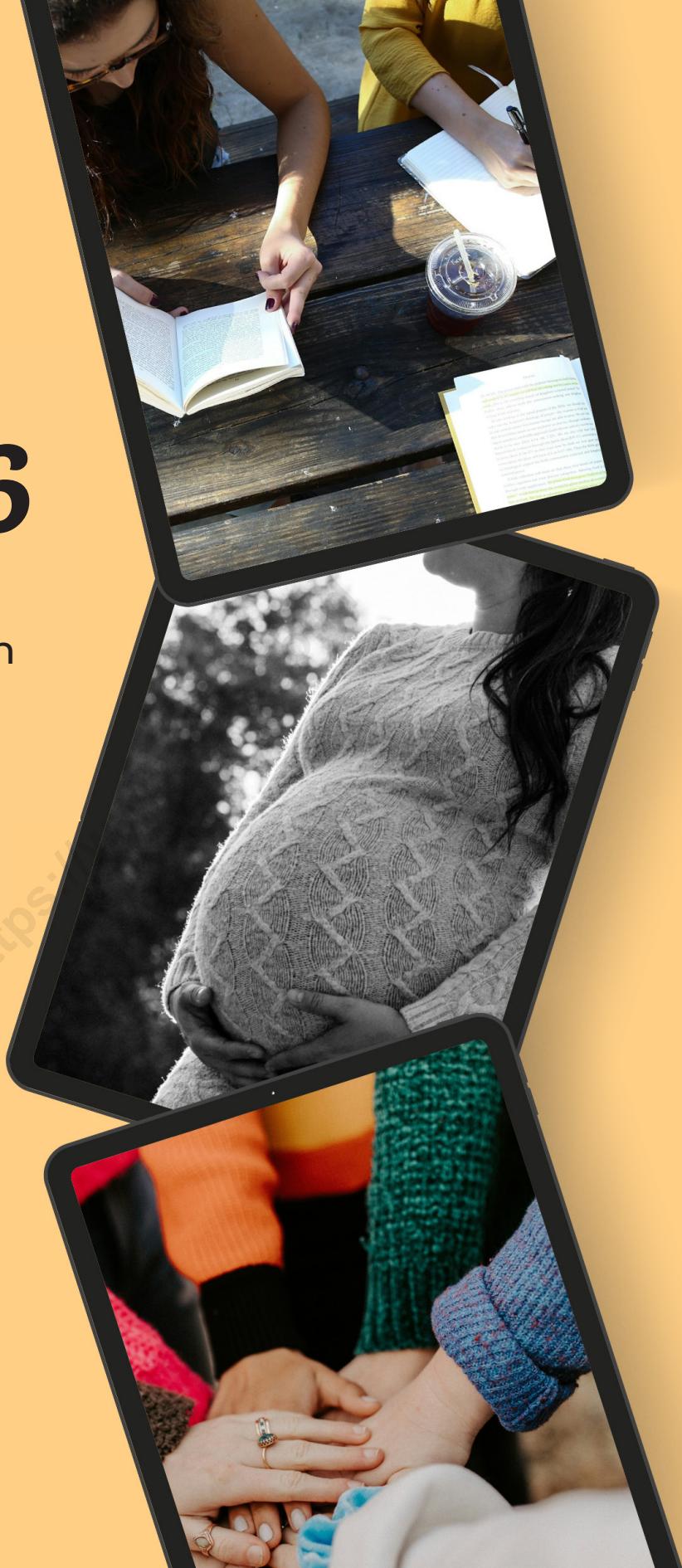
Beberapa strategi tersebut perlu ditopang oleh penguatan data dan sistem pemantauan berbasis wilayah. Data IKG yang tersedia hingga tingkat provinsi memungkinkan penyusunan intervensi yang kontekstual. Provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, dan Sulawesi Barat yang memiliki nilai IKG tertinggi perlu dijadikan target prioritas dalam strategi afirmatif. Integrasi indikator IKG ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra SKPD, dan sistem pelaporan berbasis gender menjadi kunci untuk mengawali efektivitas implementasi program. Selain itu, penggunaan data disagregasi jenis kelamin, usia, dan lokasi secara rutin perlu diperluas agar ketimpangan dapat dimonitor secara lebih akurat.

Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis konteks, strategi-strategi ini dapat memperkuat peluang sekaligus mengatasi tantangan ketimpangan gender di Indonesia. Pelibatan lintas aktor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi perempuan dan laki-laki di seluruh wilayah Indonesia.

https://www.bps.go.id

BAB 6

Profil
Ketimpangan
Gender
Nasional dan
Provinsi



Profil Ketimpangan Gender Nasional dan Provinsi

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana gambaran dan hubungan ketimpangan gender provinsi dan kabupaten/kota. Bab ini menyajikan profil ketimpangan gender nasional dan provinsi. Informasi profil ketimpangan gender disajikan dalam satu halaman yang berisikan gambaran tentang capaian ketimpangan gender nasional dan setiap provinsi. Profil ketimpangan gender provinsi hanya menyajikan 34 provinsi. Sementara untuk Provinsi Daerah Otoritas Baru dari pemekaran Papua, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tidak ditampilkan. Hal ini dikarena data untuk Provinsi DOB baru mulai tersedia pada tahun 2024.

Informasi pertama yang disajikan adalah capaian ketimpangan gender tahun 2024 dan indikator komponen penyusunnya serta rata-rata pertumbuhan selama periode 2018–2024. Selain itu disajikan juga perkembangan capaian IKG selama periode 2018–2024. Untuk memperkaya informasi, halaman ini juga memuat perkembangan capaian ketimpangan gender menurut indikator penyusunnya selama periode yang sama.



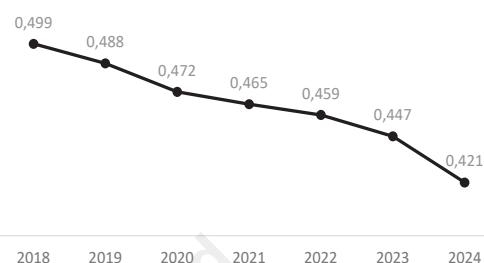
INDONESIA

IKG 2024: 0,421

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,79

Tabel 6.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Indonesia, 2024

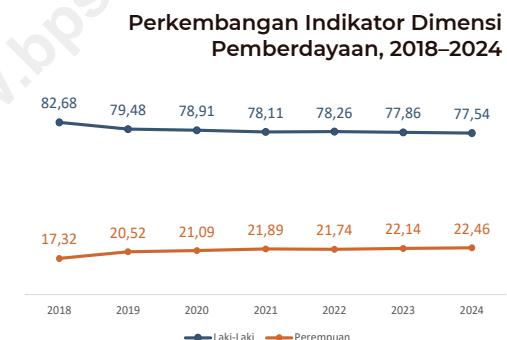
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,094	-12,81	
MHPK20	0,248	0,48	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	77,54 22,46	-1,06 4,43
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	43,78 37,64	2,27 3,29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	84,66 56,42	0,37 1,43



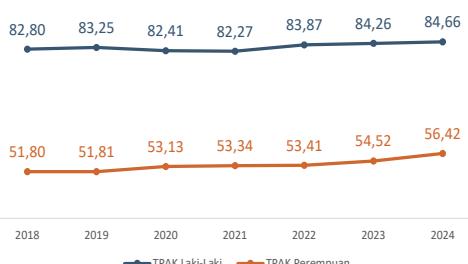
Gambar 6.1 Perkembangan IKG Indonesia, 2018–2024



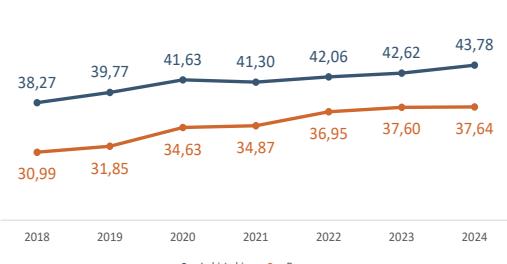
Gambar 6.2 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Indonesia, 2018–2024



Gambar 6.4 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Indonesia, 2018–2024



Gambar 6.3 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Indonesia, 2018–2024



Gambar 6.5 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Indonesia, 2018–2024



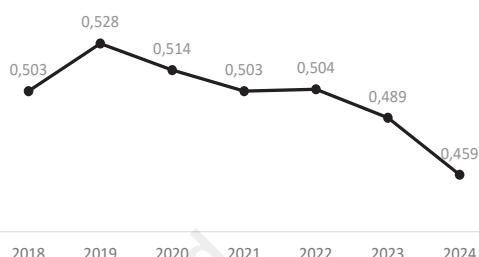
ACEH

IKG 2024: 0,459

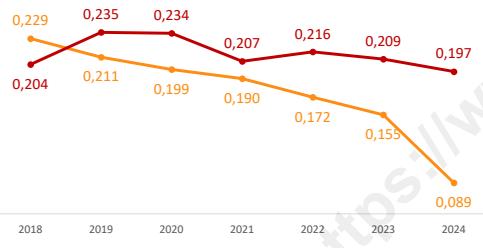
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,51

Tabel 6.2 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Aceh, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,089	-14,57	
MHPK20	0,197	-0,58	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	91,03 8,97	1,11 -8,02
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	50,14 45,09	1,70 3,21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	80,68 49,62	0,13 0,47



Gambar 6.6 Perkembangan IKG Aceh, 2018–2024

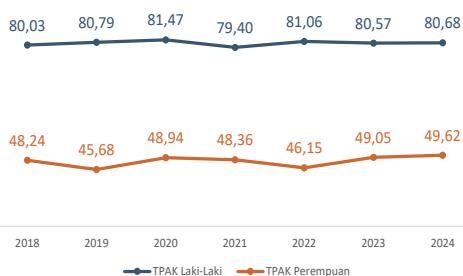


Gambar 6.7 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Aceh, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.9 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Aceh, 2018–2024



Gambar 6.8 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Aceh, 2018–2024



Gambar 6.10 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Aceh, 2018–2024



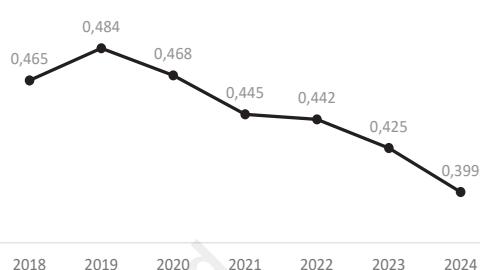
SUMATERAUTARA

IKG 2024: 0,399

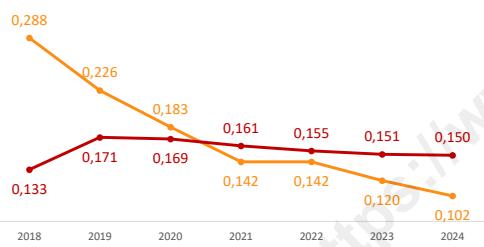
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,52

Tabel 6.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sumatera Utara, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,102	-15,89	
MHPK20	0,150	2,02	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	82,65 17,35	-0,04 0,17
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	56,04 52,30	2,79 3,23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	84,25 58,54	0,01 -0,40



Gambar 6.11 Perkembangan IKG Sumatera Utara, 2018–2024



Gambar 6.12 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sumatera Utara, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.14 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sumatera Utara, 2018–2024



Gambar 6.13 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sumatera Utara, 2018–2024



Gambar 6.15 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sumatera Utara, 2018–2024



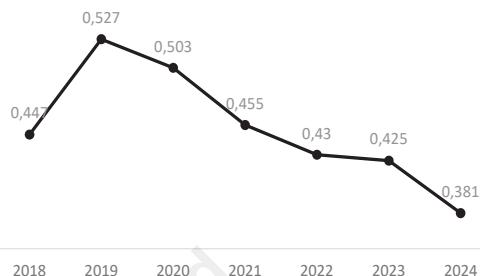
SUMATERA BARAT

IKG 2024: 0,381

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,63

Tabel 6.4 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sumatera Barat, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,073	-9,40
MHPK20	0,163	0,63
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	84,62 15,38
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	2,77 3,59
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	0,43 0,87



Gambar 6.16 Perkembangan IKG Sumatera Barat, 2018–2024



Gambar 6.17 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sumatera Barat, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.19 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sumatera Barat, 2018–2024



Gambar 6.18 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sumatera Barat, 2018–2024



Gambar 6.20 Laki-Laki dan Perempuan atas Penduduk Sumatera Barat, 2018–2024



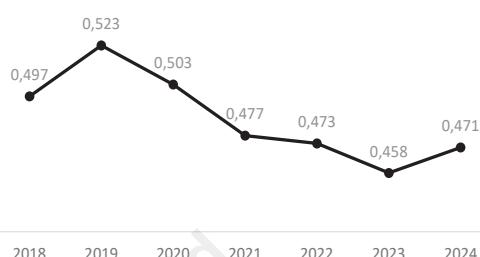
RIAU

IKG 2024: 0,471

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -0,89

Tabel 6.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Riau, 2024

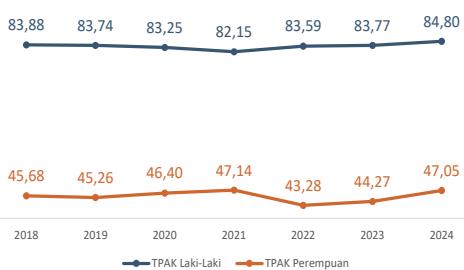
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,138	-12,24
MHPK20	0,197	-1,97
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	86,15 3,07 13,85 -11,14
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	47,02 1,34 43,46 1,83
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	84,80 0,18 47,05 0,49



Gambar 6.21 Perkembangan IKG Riau, 2018–2024



Gambar 6.22 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Riau, 2018–2024

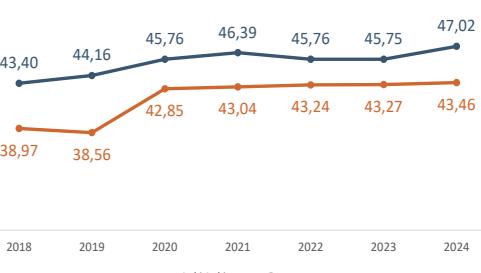


Gambar 6.23 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Riau, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.24 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Riau, 2018–2024



Gambar 6.25 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Riau, 2018–2024



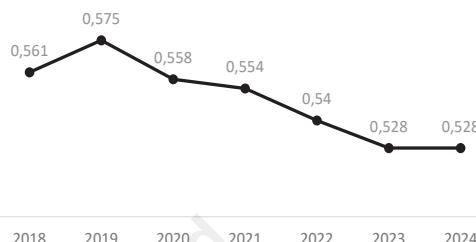
JAMBI

IKG 2024: 0,528

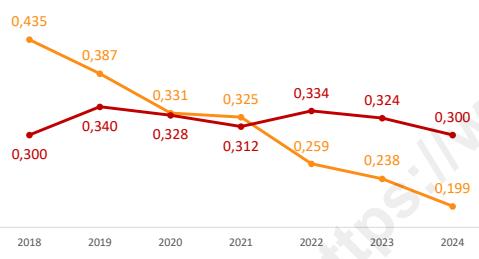
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,01

Tabel 6.6 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jambi, 2024

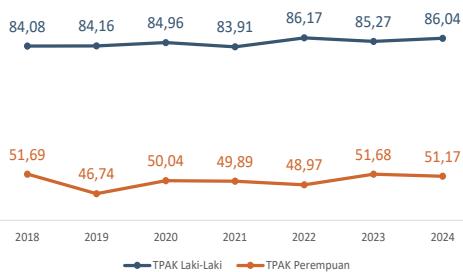
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,199	-12,22
MHPK20	0,300	0,00
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	87,27 12,73
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	42,75 35,98
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	86,04 51,17



Gambar 6.26 Perkembangan IKG Jambi, 2018–2024

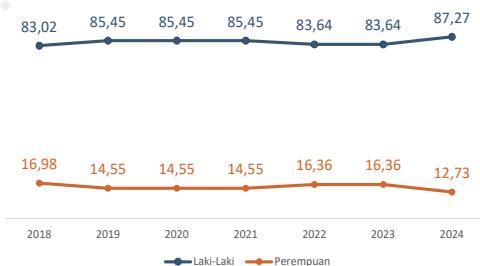


Gambar 6.27 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jambi, 2018–2024



Gambar 6.28 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jambi, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.29 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Jambi, 2018–2024



Gambar 6.30 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jambi, 2018–2024



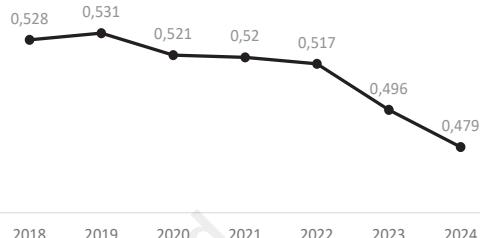
SUMATERA SELATAN

IKG 2024: 0,479

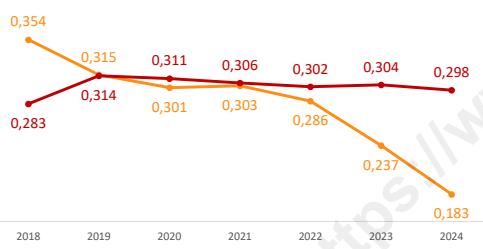
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,61

Tabel 6.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sumatera Selatan, 2024

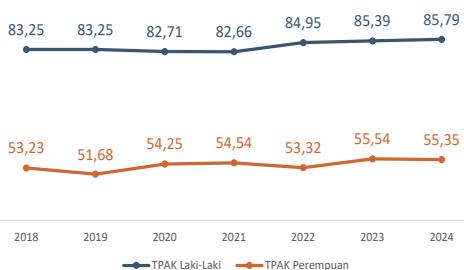
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,183	-10,41
MHPK20	0,298	0,86
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	76,00 24,00
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	40,76 36,22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,79 55,35



Gambar 6.31 Perkembangan IKG Sumatera Selatan, 2018–2024



Gambar 6.32 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sumatera Selatan, 2018–2024



Gambar 6.33 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sumatera Selatan, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.34 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sumatera Selatan, 2018–2024



Gambar 6.35 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sumatera Selatan, 2018–2024



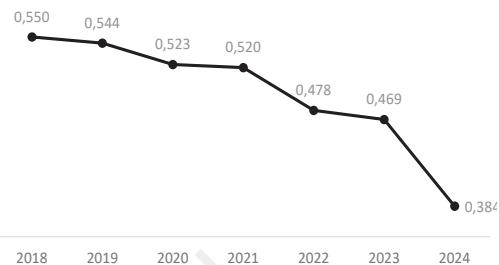
BENGKULU

IKG 2024: 0,384

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -5,81

Tabel 6.8 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Bengkulu, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,048	-29,59
MHPK20	0,301	0,11
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	77,78 22,22 -1,36 6,12
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	45,67 40,34 2,52 2,63
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,10 57,74 0,28 0,43



Gambar 6.36 Perkembangan IKG Bengkulu, 2018–2024



Gambar 6.37 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Bengkulu, 2018–2024

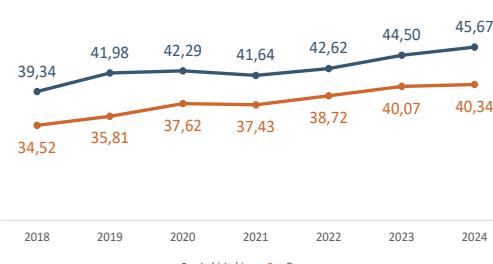


Gambar 6.38 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Bengkulu, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.39 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Bengkulu, 2018–2024



Gambar 6.40 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Bengkulu, 2018–2024



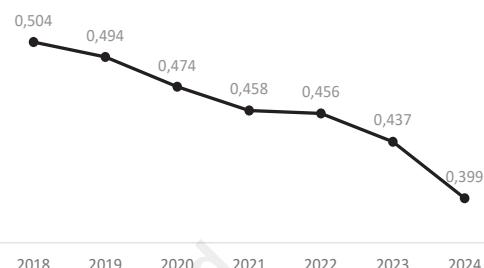
LAMPUNG

IKG 2024: 0,399

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -3,82

Tabel 6.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Lampung, 2024

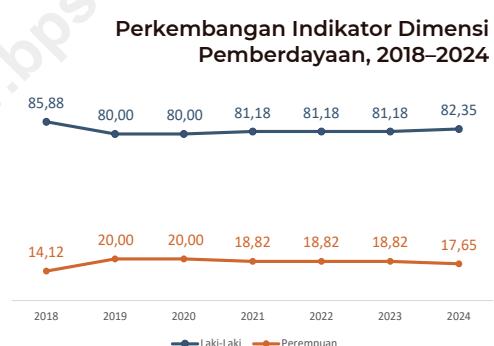
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,057	-18,04
MHPK20	0,237	-0,07
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	82,35 17,65
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	37,27 32,21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,61 54,58



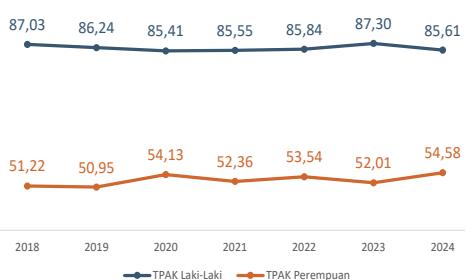
Gambar 6.41 Perkembangan IKG Lampung, 2018–2024



Gambar 6.42 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Lampung, 2018–2024



Gambar 6.44 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Lampung, 2018–2024



Gambar 6.43 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Lampung, 2018–2024



Gambar 6.45 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Lampung, 2018–2024



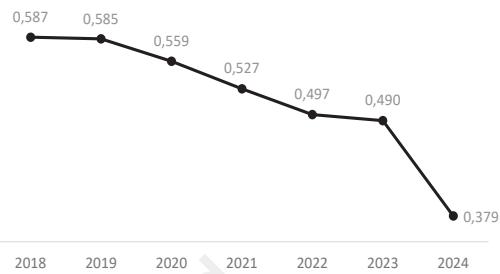
KEP. BANGKA BELITUNG

IKG 2024: 0,379

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -7,03

Tabel 6.10 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kep. Bangka Belitung, 2024

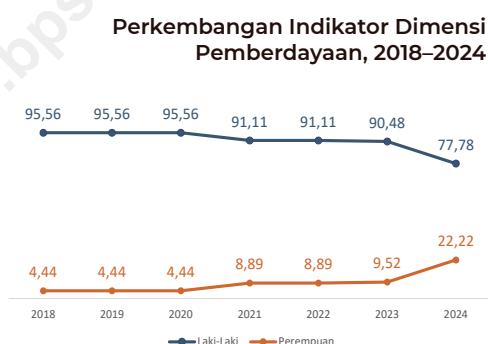
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,038	-27,56
MHPK20	0,310	3,31
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	77,78 22,22 30,79
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	41,51 38,05 3,18 4,20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	86,20 50,57 0,59 0,18



Gambar 6.46 Perkembangan IKG Kep. Bangka Belitung, 2018–2024



Gambar 6.47 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kep. Bangka Belitung, 2018–2024



Gambar 6.49 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kep. Bangka Belitung, 2018–2024



Gambar 6.48 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kep. Bangka Belitung, 2018–2024



Gambar 6.50 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kep. Bangka Belitung, 2018–2024

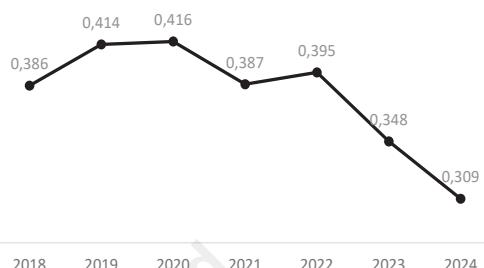
KEPULAUAN RIAU

IKG 2024: 0,309

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -3,64

Tabel 6.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kepulauan Riau, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,030	-18,58
MHPK20	0,114	1,54
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	86,05 13,95
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	61,60 58,65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,73 52,15
		0,76 -3,96 1,02 1,08 0,86 1,89



Gambar 6.51 Perkembangan IKG Kepulauan Riau, 2018–2024

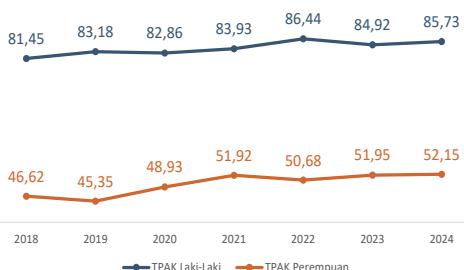


Gambar 6.52 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kepulauan Riau, 2018–2024

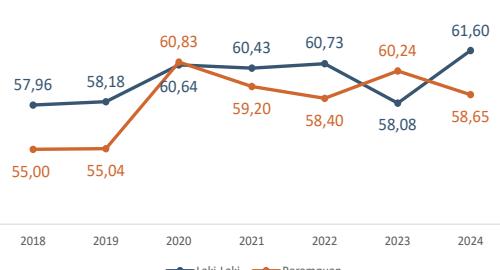
Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.54 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kepulauan Riau, 2018–2024



Gambar 6.53 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kepulauan Riau, 2018–2024



Gambar 6.55 Persentase Penduduk dan Perempuan yang Berpendidikan SMA ke atas Kepulauan Riau, 2018–2024



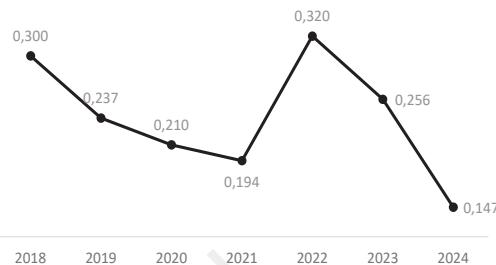
DKI JAKARTA

IKG 2024: 0,147

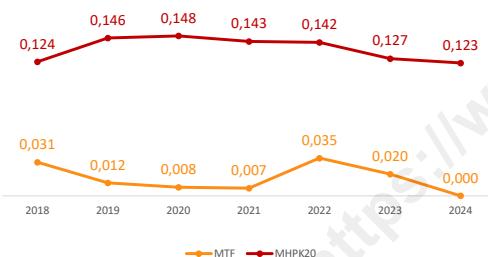
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -11,21

Tabel 6.12 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG DKI Jakarta, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,000	-100,00	
MHPK20	0,123	-0,13	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	74,53 25,47	-1,21 4,28
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	74,23 64,32	1,54 1,63
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	79,95 50,24	0,38 0,81



Gambar 6.56 Perkembangan IKG DKI Jakarta, 2018–2024

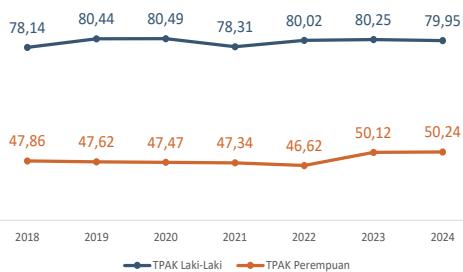


Gambar 6.57 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi DKI Jakarta, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.59 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan DKI Jakarta, 2018–2024



Gambar 6.58 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja DKI Jakarta, 2018–2024



Gambar 6.60 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas DKI Jakarta, 2018–2024



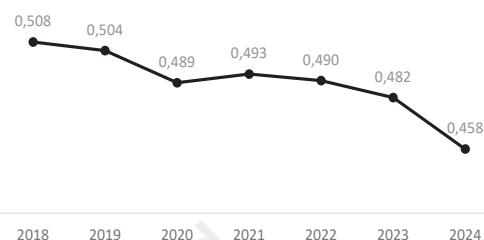
JAWA BARAT

IKG 2024: 0,458

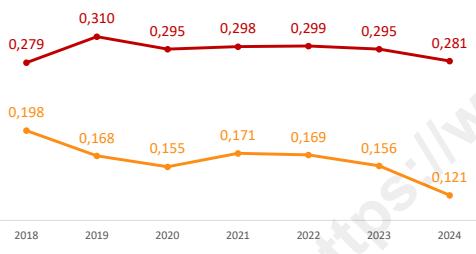
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,71

Tabel 6.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jawa Barat, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,121	-7,88	
MHPK20	0,281	0,12	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	77,31 22,69	-0,15 0,52
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	42,04 34,71	2,36 3,26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	84,51 50,59	0,31 3,05



Gambar 6.61 Perkembangan IKG Jawa Barat, 2018–2024



Gambar 6.62 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jawa Barat, 2018–2024

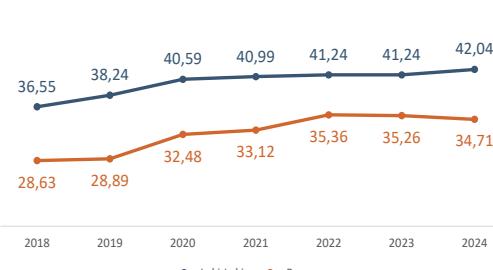


Gambar 6.63 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jawa Barat, 2018–2024

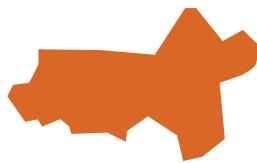
Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.64 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Jawa Barat, 2018–2024



Gambar 6.65 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jawa Barat, 2018–2024



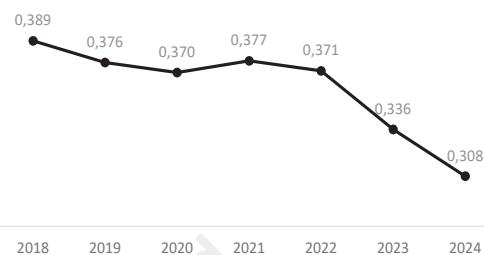
JAWA TENGAH

IKG 2024: **0,308**

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: **-3,82**

Tabel 6.14 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jawa Tengah, 2024

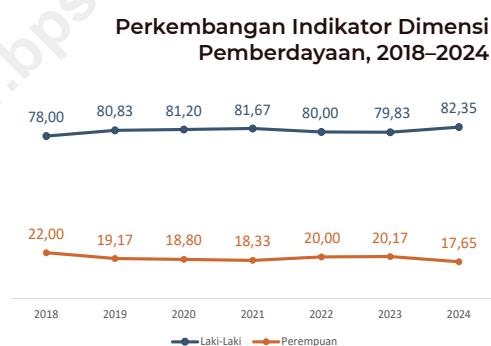
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,018	-19,47
MHPK20	0,249	1,93
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	82,35 17,65
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	35,72 29,61
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,66 61,82



Gambar 6.66 Perkembangan IKG Jawa Tengah, 2018–2024



Gambar 6.67 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jawa Tengah, 2018–2024



Gambar 6.69 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Jawa Tengah, 2018–2024



Gambar 6.68 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jawa Tengah, 2018–2024



Gambar 6.70 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jawa Tengah, 2018–2024



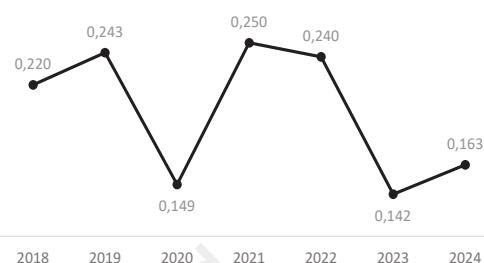
D.I. YOGYAKARTA

IKG 2024: 0,163

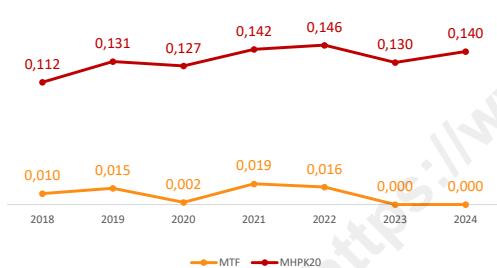
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -4,88

Tabel 6.15 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG D.I. Yogyakarta, 2024

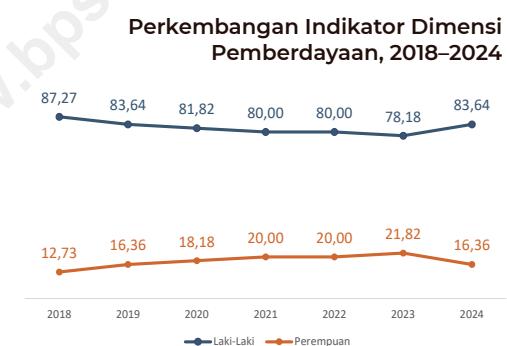
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,000	-100,00
MHPK20	0,140	3,79
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	83,64 16,36 -0,71 4,27
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	53,72 48,98 0,22 1,78
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	83,27 66,59 0,14 0,66



Gambar 6.71 Perkembangan IKG D.I. Yogyakarta, 2018–2024



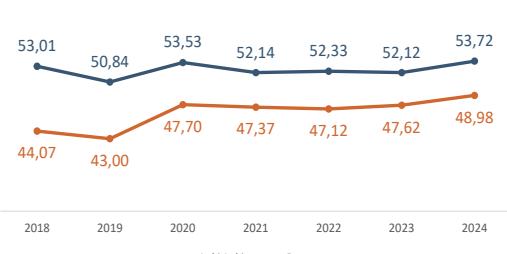
Gambar 6.72 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi D.I. Yogyakarta, 2018–2024



Gambar 6.74 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan D.I. Yogyakarta, 2018–2024



Gambar 6.73 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta, 2018–2024



Gambar 6.75 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas D.I. Yogyakarta, 2018–2024



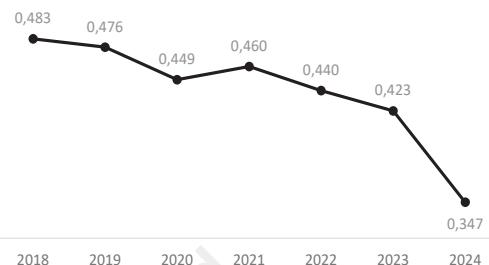
JAWA TIMUR

IKG 2024: 0,347

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -5,36

Tabel 6.16 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Jawa Timur, 2024

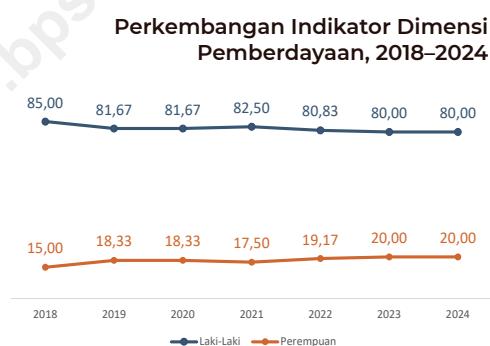
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,032	-23,37
MHPK20	0,247	1,49
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	80,00 20,00
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	39,84 32,24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	86,52 60,64



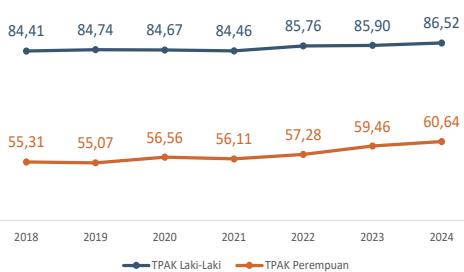
Gambar 6.76 Perkembangan IKG Jawa Timur, 2018–2024



Gambar 6.77 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Jawa Timur, 2018–2024



Gambar 6.79 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Jawa timur, 2018–2024



Gambar 6.78 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Jawa Timur, 2018–2024



Gambar 6.80 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Jawa Timur, 2018–2024



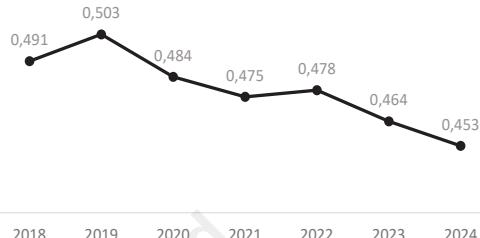
BANTEN

IKG 2024: 0,453

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,33

Tabel 6.17 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Banten, 2024

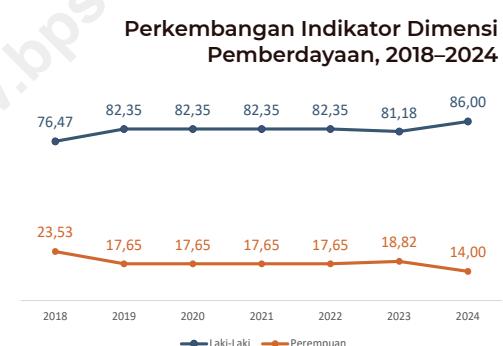
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,086	-14,23	
MHPK20	0,241	1,45	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	86,00 14,00	1,98 -8,29
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	47,20 38,34	1,22 2,52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	82,95 48,90	0,43 1,66



Gambar 6.81 Perkembangan IKG Banten, 2018–2024



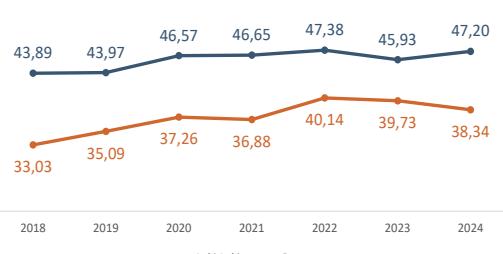
Gambar 6.82 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Banten, 2018–2024



Gambar 6.84 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Banten, 2018–2024



Gambar 6.83 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Banten, 2018–2024



Gambar 6.85 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Banten, 2018–2024



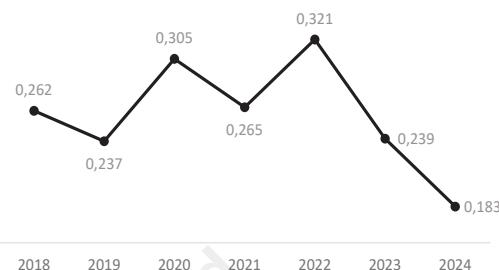
BALI

IKG 2024: 0,183

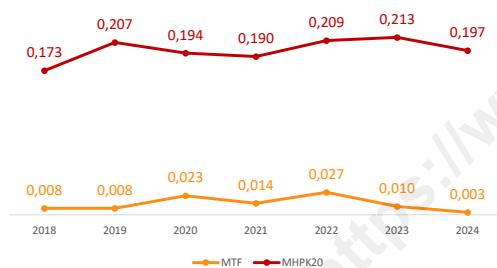
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -5,81

Tabel 6.18 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Bali, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,003	-15,08
MHPK20	0,197	2,19
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	81,82 18,18
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	54,45 43,51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	83,77 70,49

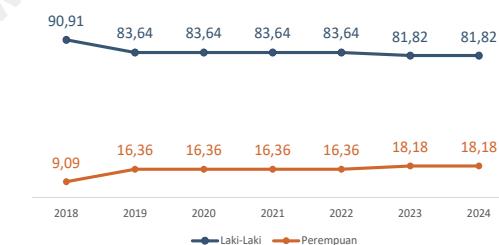


Gambar 6.86 Perkembangan IKG Bali, 2018–2024



Gambar 6.87 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Bali, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.89 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Bali, 2018–2024



Gambar 6.88 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Bali, 2018–2024



Gambar 6.90 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Bali, 2018–2024



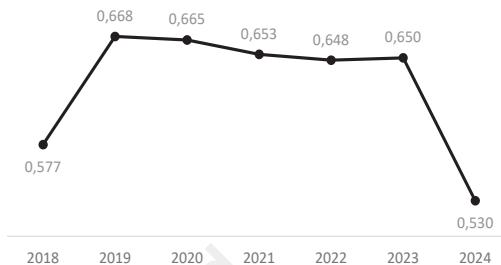
NUSA TENGGARA BARAT

IKG 2024: 0,530

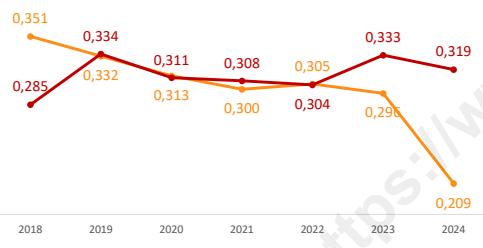
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,41

Tabel 6.19 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Nusa Tenggara Barat, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,209	-8,28	
MHPK20	0,319	1,90	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	89,23 10,77	-0,28 2,61
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	39,22 29,45	1,62 3,21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	86,47 68,04	1,30 3,84

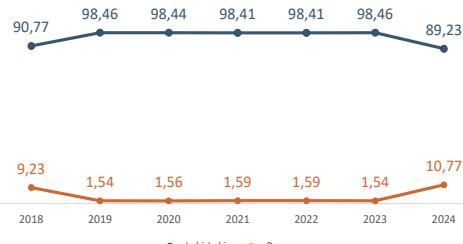


Gambar 6.91 Perkembangan IKG Nusa Tenggara Barat, 2018–2024

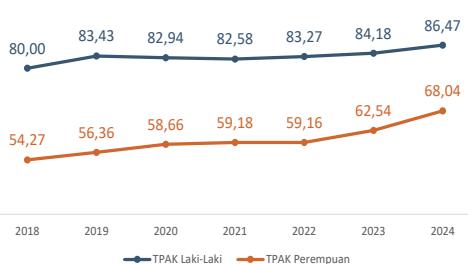


Gambar 6.92 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Nusa Tenggara Barat, 2018–2024

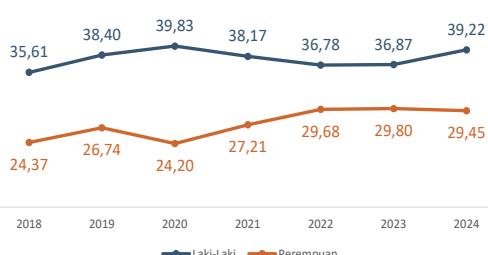
Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.94 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Nusa Tenggara Barat, 2018–2024



Gambar 6.93 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Nusa Tenggara Barat, 2018–2024



Gambar 6.95 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Nusa Tenggara Barat, 2018–2024



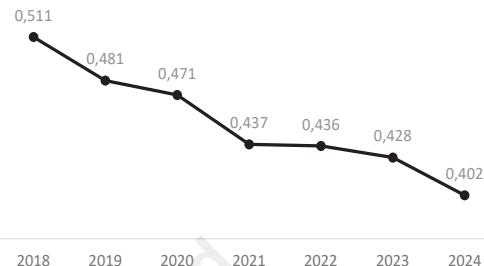
NUSA TENGGARA TIMUR

IKG 2024: 0,402

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -3,92

Tabel 6.20 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Nusa Tenggara Timur, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,125	-11,43
MHPK20	0,189	0,09
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	76,92 23,08 -2,44 13,55
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	32,31 29,75 0,89 3,36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	84,70 70,40 0,34 2,45



Gambar 6.96 Perkembangan IKG Nusa Tenggara Timur, 2018–2024



Gambar 6.97 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Nusa Tenggara Timur, 2018–2024



Gambar 6.99 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Nusa Tenggara Timur, 2018–2024



Gambar 6.98 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Nusa Tenggara Timur, 2018–2024



Gambar 6.100 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Nusa Tenggara Timur, 2018–2024



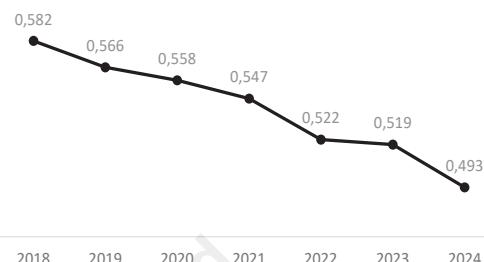
KALIMANTAN BARAT

IKG 2024: 0,493

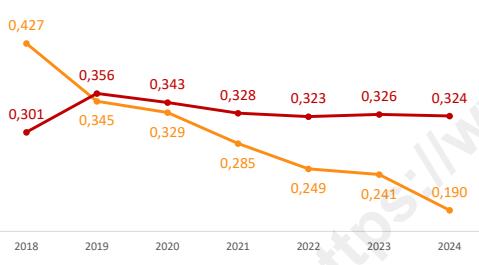
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,73

Tabel 6.21 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Barat, 2024

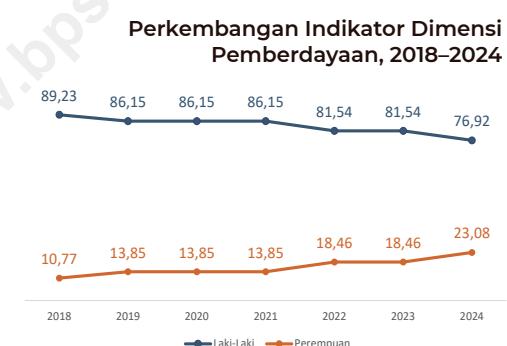
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,190	-12,62
MHPK20	0,324	1,23
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	76,92 23,08 -2,44 13,55
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	35,55 30,77 2,45 3,87
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	86,05 53,95 0,38 0,27



Gambar 6.101 Perkembangan IKG Kalimantan Barat, 2018–2024



Gambar 6.102 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Barat, 2018–2024



Gambar 6.104 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kalimantan Barat, 2018–2024



Gambar 6.103 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Barat, 2018–2024



Gambar 6.105 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Barat, 2018–2024



KALIMANTAN TENGAH

IKG 2024: 0,549

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -0,48

Tabel 6.22 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Tengah, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,321	-8,36
MHPK20	0,365	1,14
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	80,00 20,00
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	35,13 30,30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	86,50 49,60
		-0,11 -0,73



Gambar 6.106 Perkembangan IKG Kalimantan Tengah, 2018–2024



Gambar 6.107 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Tengah, 2018–2024



Gambar 6.108 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Tengah, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.109 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kalimantan Tengah, 2018–2024



Gambar 6.110 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Tengah, 2018–2024



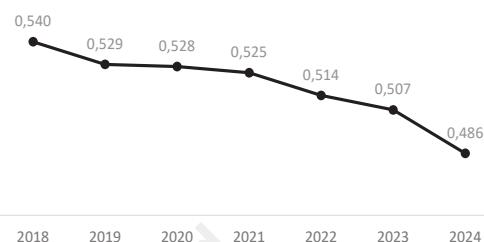
KALIMANTAN SELATAN

IKG 2024: 0,486

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,74

Tabel 6.23 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Selatan, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,167	-9,30
MHPK20	0,303	-0,54
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	80,00 20,00
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	1,40 2,30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	0,10 0,16



Gambar 6.111 Perkembangan IKG Kalimantan Selatan, 2018–2024



Gambar 6.112 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Selatan, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.114 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kalimantan Selatan, 2018–2024



Gambar 6.113 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Selatan, 2018–2024



Gambar 6.115 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Selatan, 2018–2024



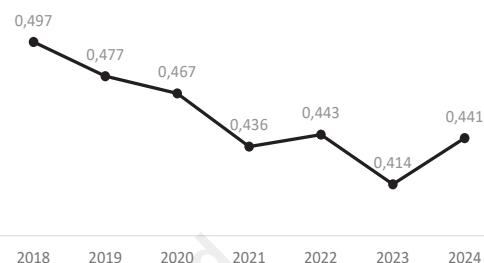
KALIMANTAN TIMUR

IKG 2024: 0,441

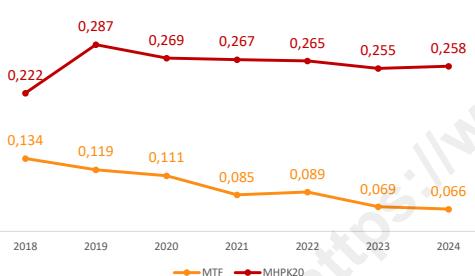
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,97

Tabel 6.24 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Timur, 2024

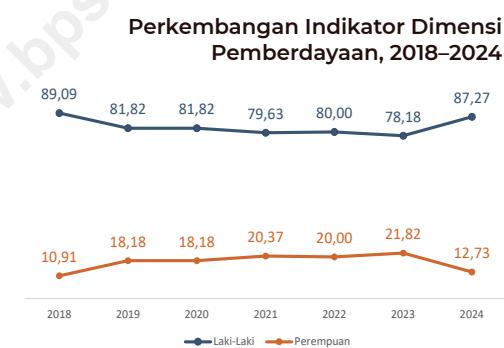
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,066	-11,13
MHPK20	0,258	2,54
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	87,27 12,73 -0,34 2,60
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	56,32 50,23 1,24 2,51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	83,75 49,07 0,34 1,39



Gambar 6.116 Perkembangan IKG Kalimantan Timur, 2018–2024



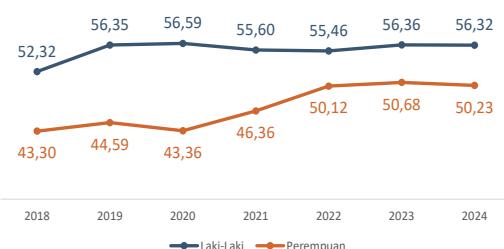
Gambar 6.117 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Timur, 2018–2024



Gambar 6.119 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kalimantan Timur, 2018–2024



Gambar 6.118 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Timur, 2018–2024



Gambar 6.120 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Timur, 2018–2024



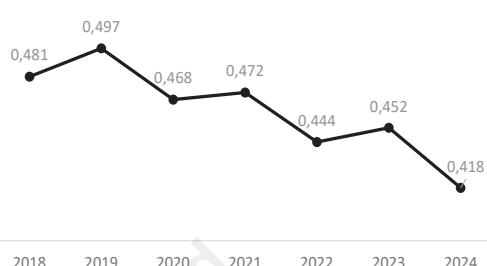
KALIMANTAN UTARA

IKG 2024: 0,418

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,31

Tabel 6.25 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Kalimantan Utara, 2024

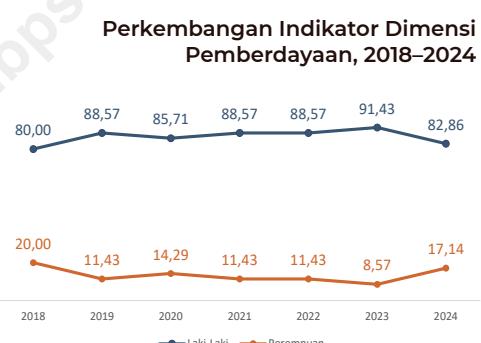
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,060	-14,81
MHPK20	0,272	-0,36
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	82,86 17,14
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	46,15 40,60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	86,51 52,14



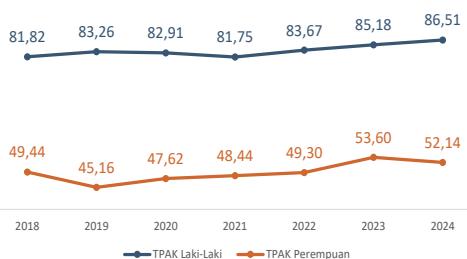
Gambar 6.121 Perkembangan IKG Kalimantan Utara, 2018–2024



Gambar 6.122 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kalimantan Utara, 2018–2024



Gambar 6.124 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kalimantan Utara, 2018–2024



Gambar 6.123 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Utara, 2018–2024



Gambar 6.125 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Kalimantan Utara, 2018–2024



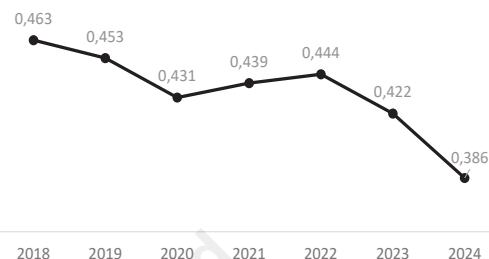
SULAWESI UTARA

IKG 2024: 0,386

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,99

Tabel 6.26 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Utara, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,081	-13,02
MHPK20	0,305	1,99
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	54,76 45,24
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	1,53 2,77
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	0,32 1,57



Gambar 6.126 Perkembangan IKG Sulawesi Utara, 2018–2024



Gambar 6.127 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Utara, 2018–2024



Gambar 6.128 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Utara, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.129 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sulawesi Utara, 2018–2024



Gambar 6.130 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Utara, 2018–2024



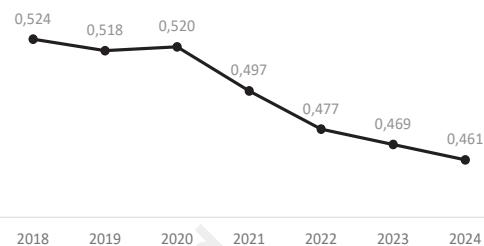
SULAWESI TENGAH

IKG 2024: 0,461

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,11

Tabel 6.27 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Tengah, 2024

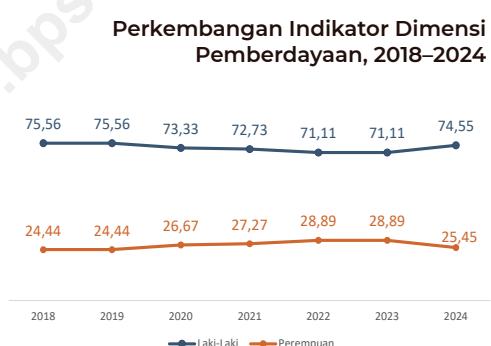
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,137	-14,59	
MHPK20	0,332	2,05	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	74,55 25,45	-0,22 0,68
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	37,44 35,09	-0,17 1,30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,94 55,47	0,19 0,48



Gambar 6.131 Perkembangan IKG Sulawesi Tengah, 2018–2024



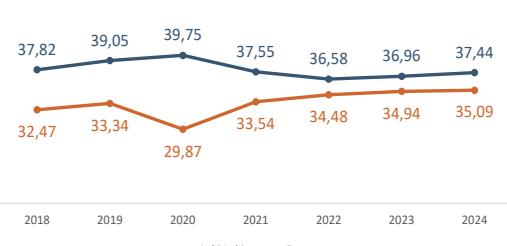
Gambar 6.132 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Tengah, 2018–2024



Gambar 6.134 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sulawesi Tengah, 2018–2024



Gambar 6.133 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Tengah, 2018–2024



Gambar 6.135 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Tengah, 2018–2024



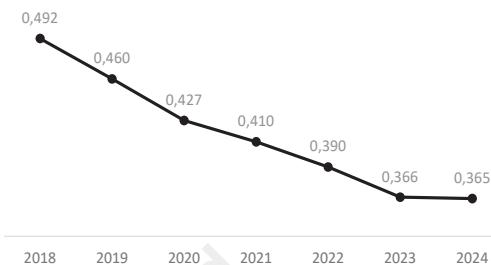
SULAWESI SELATAN

IKG 2024: 0,365

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -4,85

Tabel 6.28 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Selatan, 2024

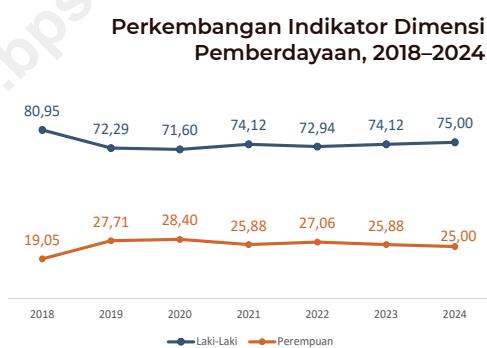
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,044	-20,17
MHPK20	0,271	-0,72
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	75,00 25,00
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	44,38 40,98
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	82,52 52,68



Gambar 6.136 Perkembangan IKG Sulawesi Selatan, 2018–2024



Gambar 6.137 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Selatan, 2018–2024



Gambar 6.139 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sulawesi Selatan, 2018–2024



Gambar 6.138 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Selatan, 2018–2024



Gambar 6.140 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Selatan, 2018–2024



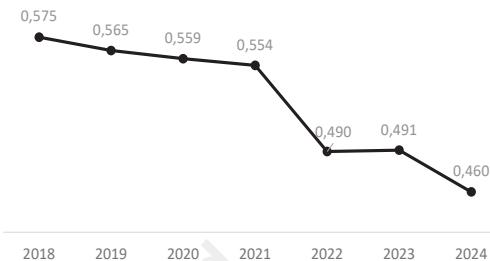
SULAWESI TENGGARA

IKG 2024: 0,460

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -3,65

Tabel 6.29 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Tenggara, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,160	-17,99	
MHPK20	0,331	-1,53	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	71,11 28,89	-2,31 8,03
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	42,31 37,40	-1,05 0,01
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,03 60,30	0,21 1,35



Gambar 6.141 Perkembangan IKG Sulawesi Tenggara, 2018–2024



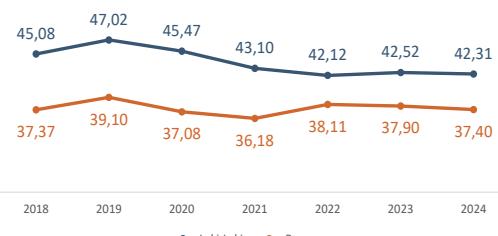
Gambar 6.142 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Tenggara, 2018–2024



Gambar 6.144 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sulawesi Tenggara, 2018–2024



Gambar 6.143 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, 2018–2024



Gambar 6.145 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Tenggara, 2018–2024



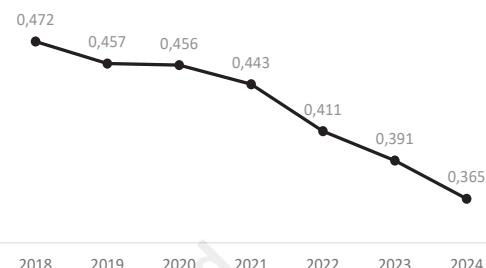
GORONTALO

IKG 2024: 0,365

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -4,19

Tabel 6.30 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Gorontalo, 2024

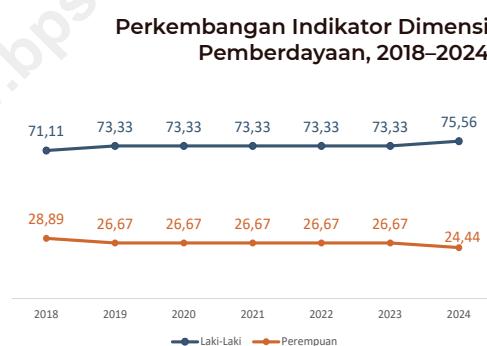
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,045	-22,46
MHPK20	0,303	0,62
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	75,56 24,44
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	31,41 36,10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	84,50 55,23



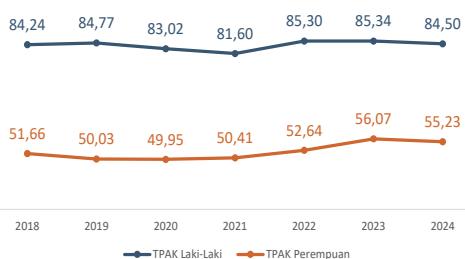
Gambar 6.146 Perkembangan IKG Gorontalo, 2018–2024



Gambar 6.147 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Gorontalo, 2018–2024



Gambar 6.149 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Gorontalo, 2018–2024



Gambar 6.148 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Gorontalo, 2018–2024



Gambar 6.150 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Gorontalo, 2018–2024



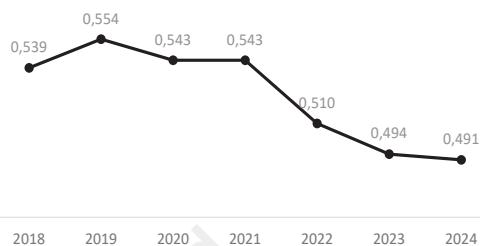
SULAWESI BARAT

IKG 2024: 0,491

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: 1,54

Tabel 6.31 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Sulawesi Barat, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,119	-15,11
MHPK20	0,307	-1,20
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	88,89 11,11
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	39,43 35,97
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	85,95 56,46
		0,28 0,76



Gambar 6.151 Perkembangan IKG Sulawesi Barat, 2018–2024



Gambar 6.152 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Sulawesi Barat, 2018–2024

Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.154 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Sulawesi Barat, 2018–2024



Gambar 6.153 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Sulawesi Barat, 2018–2024



Gambar 6.155 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Sulawesi Barat, 2018–2024

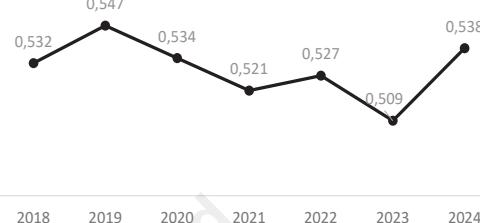
MALUKU

IKG 2024: 0,538

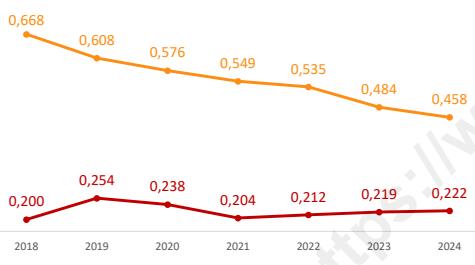
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: 0,19

Tabel 6.32 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Maluku, 2024

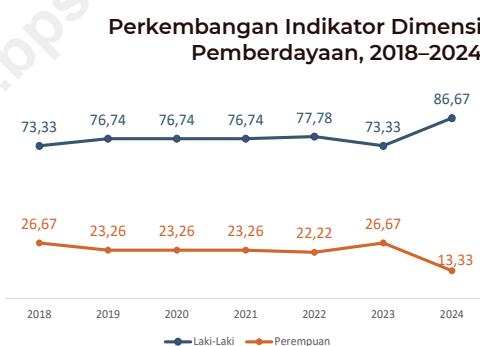
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,458	-6,10
MHPK20	0,222	1,75
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	86,67 13,33
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	52,41 50,58
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	76,62 56,25



Gambar 6.156 Perkembangan IKG Maluku, 2018–2024



Gambar 6.157 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Maluku, 2018–2024



Gambar 6.159 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Maluku, 2018–2024



Gambar 6.158 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Maluku, 2018–2024



Gambar 6.160 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Maluku, 2018–2024



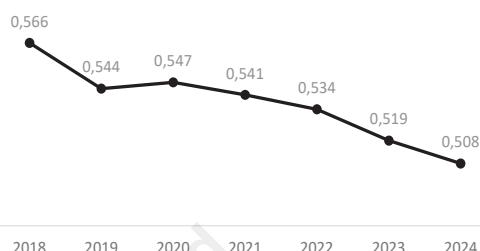
MALUKU UTARA

IKG 2024: 0,508

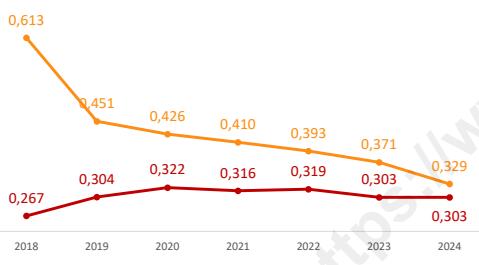
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,79

Tabel 6.33 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Maluku Utara, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,329	-9,85
MHPK20	0,303	2,13
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	71,11 28,89
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	44,06 38,33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	82,40 54,98



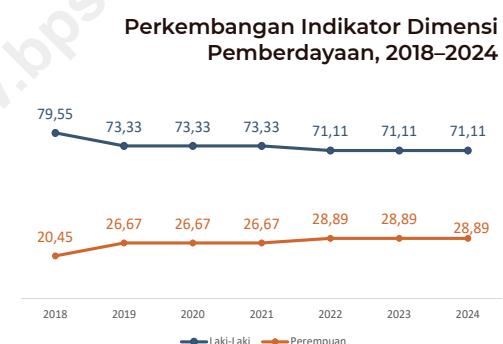
Gambar 6.161 Perkembangan IKG Maluku Utara, 2018–2024



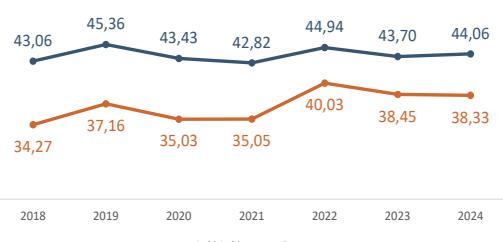
Gambar 6.162 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Maluku Utara, 2018–2024



Gambar 6.163 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Maluku Utara, 2018–2024



Gambar 6.164 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Maluku Utara, 2018–2024



Gambar 6.165 Persentase dan Penduduk Perempuan dengan Pendidikan SMA ke atas di Maluku Utara, 2018–2024



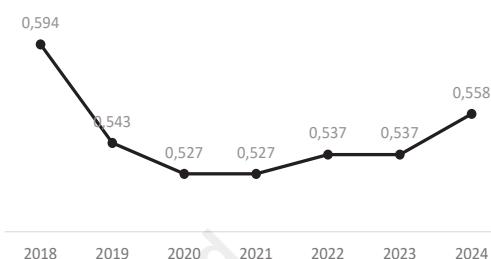
PAPUA BARAT

IKG 2024: 0,558

Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -1,04

Tabel 6.34 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Papua Barat, 2024

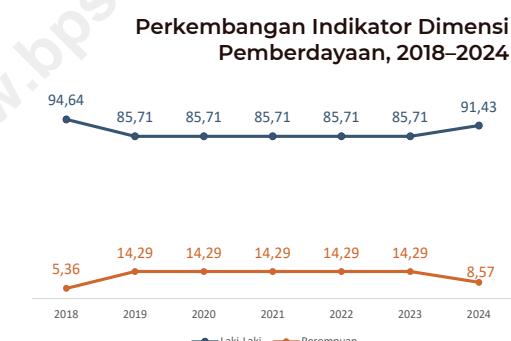
Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
MTF	0,280	-6,04
MHPK20	0,306	5,26
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	91,43 8,57 -0,57 8,14
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	53,55 43,78 -0,35 -0,22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	81,42 59,80 0,15 2,31



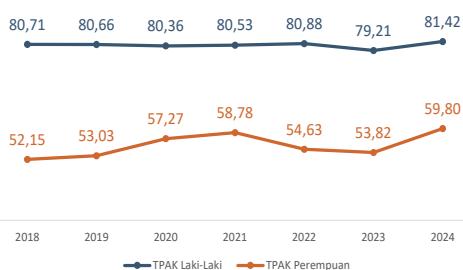
Gambar 6.166 Perkembangan IKG Papua Barat, 2018–2024



Gambar 6.167 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Papua Barat, 2018–2024



Gambar 6.169 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Papua Barat, 2018–2024



Gambar 6.168 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Papua Barat, 2018–2024



Gambar 6.170 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Papua Barat, 2018–2024

Catatan: Data yang disajikan pada 2018–2023 masih kondisi Papua Barat sebelum pemekaran DOB



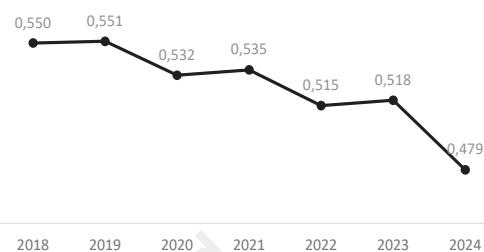
PAPUA

IKG 2024: 0,479

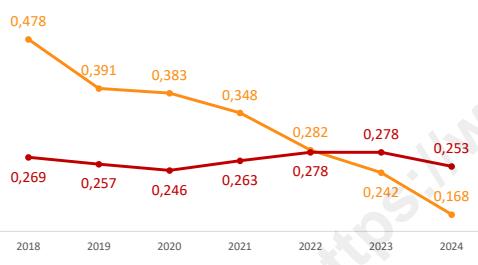
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: -2,28

Tabel 6.35 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Papua, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024 (%)	
(1)	(2)	(3)	
MTF	0,168	-15,99	
MHPK20	0,253	-1,02	
Percentase Anggota Legislatif	Laki-Laki Perempuan	84,44 15,56	0,16 -0,83
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	Laki-Laki Perempuan	64,17 55,75	9,78 13,97
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Laki-Laki Perempuan	79,01 56,45	-1,49 -3,64



Gambar 6.171 Perkembangan IKG Papua, 2018–2024

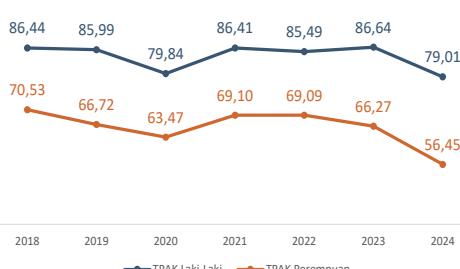


Gambar 6.172 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Papua, 2018–2024

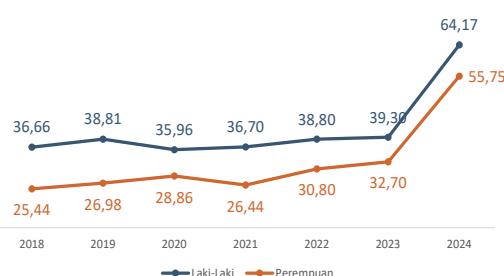
Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.174 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Papua, 2018–2024



Gambar 6.173 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Papua, 2018–2024



Gambar 6.175 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Papua, 2018–2024

Catatan: Data yang disajikan pada 2018–2023 masih kondisi Papua sebelum pemekaran DOB

Daftar Pustaka

- Azis, A. A., & Azarine, A. N. 2023. *Gender Mainstreaming in Indonesia's Bilateral International Development Cooperation*. European Journal of Humanities and Social Sciences, 3(6): 24–35. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.6.516>
- Azizah, N. 2021. *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)*. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Beteta, H. C. 2006. *What is Missing in Measures of Women's Empowerment?*. Journal of Human Development, 7(2): 221–241.
- Butler, J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- BPS. 2006. *Kajian Awal Indeks Ketimpangan Gender 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2024. *Indeks Ketimpangan Gender 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. 2014. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Palgrave Macmillan.
- Catalyst. 2020. *Too Few Women of Color on Boards: Statistics and Solutions*.
- Dijkstra, G. 2002. *Revisiting UNDP's GDI and GEM: Towards an Alternative*. Social Indicators Research, 57: 301–338.
- Doepke, M., & Tertilt, M. 2019. *Does Female Empowerment Promote Economic Development?*. NBER Working Paper No. 19888.
- Doepke, M., Tertilt, M., & Voena, A. 2012. *The Economics and Politics of Women's Rights*. Annual Review of Economics, 4: 339–372.
- Duflo, E. 2012. *Women Empowerment and Economic Development*. Journal of Economic Literature, 50(4): 1051–1079.
- Duflo, E. 2012. *Women's Empowerment and Economic Development*. Journal of Economic Perspectives, 26(3): 105–132.
- Henry, N., & Powell, A. 2018. *Sexual Violence in the Digital Age: The Role of Technology in Facilitating and Responding to Sexual Harassment and Abuse*. Violence Against Women, 24(12): 1435–1453.
- IMF. 2016. *Trends in Gender Equality and Women's Advancement*.
- ILO. 2020a. *Working from Home: From Invisibility to Decent Work*.
- . 2020b. *Social Protection for Women Workers in the Informal Economy*.
- . 2025. *Making Women Migrant Workers Count: Sex Disaggregation of Labour Migration Statistics in ASEAN*.

- Islahudin, I. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kecamatan Gerung* [Disertasi Doktor, Universitas Mataram].
- Jager, Ulrike & Anja Rohwer. 2009. *Women's Empowerment: Gender-Related Indices as A Guide for Policy*. CESifo DICE Report, 4: 37-50.
- Jere, C., Eck, M., & Zubairi, A. 2022. *Leave No Child Behind: Global Report on Boys' Disengagement from Education*. UNESCO.
- Kabeer, N. 2015. *Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: The "Endless Variety" and "Monotonous Similarity" of Patriarchal Constraints*. Feminist Economics, 21(2): 1–28.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. 2023. *Laporan tahunan sektor UMKM dan perempuan*. Diakses pada tanggal 11 Juli. <https://kemenkopukm.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2024. *Program Literasi Digital Nasional*. Pembaruan terakhir 12 Januari. <https://literasidigital.id>
- Kemen PPPA, Badan Pusat Statistik, & Lembaga Demografi FEB UI. 2024. *Leaflet Kondisi Perempuan Indonesia Tahun 2024*. Hasil Pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SHPHPN) 2024.
- Klassen, S. 2006. *Gender-Related Development Measures: Some Conceptual Problems and Possible Solutions*. Journal of Human Development, 7(2): 234–274.
- Kumari, S., Priyamvada, R., Chaudhury, S., Singh, A. R., Verma, A. N., & Prakash, J. 2009. *Possible psychosocial strategies for controlling violence against women*. Industrial Psychiatry Journal, 18(2): 132–134.
- Kwon, N., & Sohn, H. 2023. *The Effect of Age at First Marriage on Female Fertility: Evidence from Korea's School Entry Policy Using Exact Date of Birth*. Popul Res Policy Rev, 42(8). <https://doi.org/10.1007/s11113-023-09747-5>
- Long, T. Q., Hoang, T. C., & Simkins, B. 2023. *Gender Gap in Digital Literacy Across Generations: Evidence from Indonesia*. Finance Research Letters, 58, 104588. <https://doi.org/10.1016/J.FRL.2023.104588>.
- Mahato, S. K. 2016. *Causes and consequences of child marriage: A perspective*. International Journal of Scientific and Engineering Research, 7(7): 698–702.
- Mathur, S., Greene, M., & Malhotra, A. 2003. *Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls*. International Center for Research on Women.
- McKinsey & Company. 2015. *The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth*.
- Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) of Viet Nam, ASEAN Secretariat, International Labour Organization (ILO), & UN Women. 2023. *Women Migrant Workers in the Laws and Policies of ASEAN Member States*. ASEAN. Diakses pada 12 Juli. https://asean.org/wp-content/uploads/2023/02/ASEAN_REPORT_Final.pdf
- OECD. 2017. *The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264281318-en>.

- . 2018. *Bridging The Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022–2024. *Program literasi keuangan untuk perempuan*. <https://www.ojk.go.id>
- Oxfam International. 2020. *Confronting Carbon Inequality: Putting Climate Justice at the Heart of the COVID-19 Recovery*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Diakses pada 14 Juli. <https://peraturan.bpk.go.id>
- . 2011. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. Diakses pada 12 Juli. <https://peraturan.bpk.go.id>
- . 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Diakses pada 12 Juli. <https://peraturan.bpk.go.id>
- . 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diakses pada 12 Juli. <https://peraturan.bpk.go.id>
- . 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Diakses pada 12 Juli. <https://peraturan.bpk.go.id>
- . 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Diakses pada 12 Juli. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Retnaningrum, D.H. 2009. *Incest sebagai bentuk manifestasi kekerasan terhadap perempuan*. Jurnal Dinamika Hukum, 9, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto.
- Rodgers, B. 2012. *Child marriage in Ethiopia and its associated human rights violations*. Policy Journal: 11–12.
- Setyonaluri, D. 2014. *Women interrupted: Determinants of women's employment exit and return in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 50(3): 485–486. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980387>
- Sultana, A. 2010. *Patriarchy and women's subordination: A theoretical analysis*. Arts Faculty Journal: 1–18.
- Terry, G. 2009. *Climate Change and Gender Justice*. Warwickshire, UK: Practical Action Publishing in Association with Oxfam GB.
- UNCTAD. 2021. *Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development: For Whom and for What?*. United Nations.
- UNDP. 2021. *Gender Equality Strategy 2018-2021*. <https://www.undp.org/sites/g/files/zsgke326/files/2023-03/UNDP-Gender-Equality-Strategy-2018-2021-Annual-Report.pdf>
- . 2022. *Human Development Report 2021/2022*. New York: UNDP.
- . 2025. *Women, Resilience, and Climate Change: Experiences from Europe and Central Asia and Beyond*.
- UNDP Indonesia. 2025. *Gender Equality and Social Inclusion Strategy*. In UNDP Indonesia.
- United Nations. 1993. *Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW)*, GA Res. 48/104, 20 December 1993.

- United Nations. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.* United Nations.
- United Nations Development Programme. 2016. *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone.* United Nations Development Programme.
- UNICEF. 2011. *Child Marriage: UNICEF Information Sheet: 1–4.* UNICEF
- . 2021. *Situation Analysis of Children in the Pacific Island Countries.*
- UN Women. 2016. *Women Working Worldwide: A Situational Analysis of Women Migrant Workers.*
- . 2018. *Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development.*
- . 2019. *Progress of the World's Women 2019-2020: Families in a Changing World.* New York: UN Women.
- . 2020. *Climate Change, Gender Equality and Human Rights in Asia - Regional Review and Promising Practices.*
- . 2021. *Measuring the Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19.*
- . 2022a. *Towards Improved Measures of Gender Inequality: An Evaluation of the UNDP Gender Inequality Index and a Proposal.*
- . 2022b. *Framework: Prevention of Gender-Based Violence and Harassment Against Women Migrant Workers in South and Southeast Asia.*
- . 2023. *Progress on The Sustainable Development Goals, The Gender Snapshot 2023.*
- . 2025. *Women's Rights in Review 30 Years After Beijing.*
- UNESCO. 2019. *Cracking the Code: Girls' and Women's Education in STEM.*
- West, Candace, & Don Zimmerman. 1987. *Doing Gender.* JSTOR.
- WEF. 2020. *Global Gender Gap Report 2020.* Cologny/Geneva: WEF.
- . 2024. *Global Gender Gap 2024.* Geneva: WEF.
- World Bank. 2012. *World Development Report: Gender Equality and Development.* Washington: World Bank.
- . 2018. *Women, Business, and the Law 2018.* Washington, DC: World Bank Group.
- . 2016. *Trends in Gender Equality and Women's Advancement.*
- . 2023. *Gender Equality in Indonesia: Progress and Challenges.* Diakses pada 12 Juli. <https://www.worldbank.org>
- . 2024. *Women, Business and the Law 2024.* Diakses pada 12 Juli. <https://wbl.worldbank.org>.

Catatan Teknis

https://



Catatan Teknis

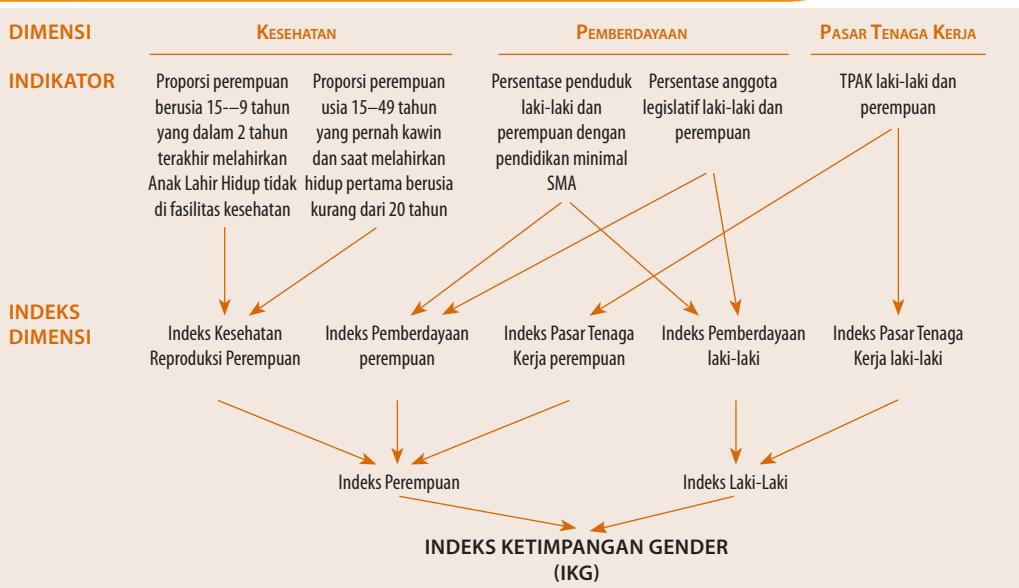
Pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merujuk pada *Gender Inequality Index* (GII) UNDP. Namun kendalanya tidak semua indikator GII UNDP tersedia setiap tahun dan tersedia pada level subnasional. Indikator tersebut adalah Angka Kematian Ibu dan Tingkat Fertilitas Remaja. Pada penghitungan IKG digunakan indikator proksi. Angka Kematian Ibu didekati dengan faktor risikonya yaitu persalinan yang dilakukan di rumah atau tidak di fasilitas kesehatan, sedangkan ukuran fertilitas remaja didekati dengan proporsi wanita berusia 15–49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun. Rincian indikator IKG yang digunakan terdapat dalam Gambar 7.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 7.1 Indikator Komponen IKG

Masing-masing indikator dikelompokkan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan hanya dihitung dari penduduk perempuan, indikator dalam dimensi ini adalah proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi wanita berusia 15–49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan dihitung dari persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA dan persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen. Sementara dimensi pasar kerja dihitung dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Adapun struktur pengelompokan indikator dalam IKG adalah seperti pada Gambar 7.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Gambar 7.2 Pengelompokan Indikator dalam Penghitungan IKG

Untuk memperoleh angka IKG terdapat berbagai tahapan penghitungan indeks. Pertama, menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-Laki. Indeks Perempuan dihitung dengan formula:

$$G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \cdot \frac{0,01}{MHPK20} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot SE_F)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_F}$$

sedangkan formula untuk Indeks Laki-laki:

$$G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_M}$$

Keterangan:

- G_F : Indeks Perempuan
- G_M : Indeks Laki-laki
- MTF : Proporsi perempuan berusia 15–49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan Anak Lahir Hidup tidak di fasilitas kesehatan
- $MHPK20$: Proporsi perempuan berusia 15–49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun
- PR_F : Persentase anggota legislatif perempuan
- PR_M : Persentase anggota legislatif laki-laki
- SE_F : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA
- SE_M : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA
- $TPAK_F$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja
- $TPAK_M$: Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja

Selanjutnya pada tahapan kedua, perlu dihitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik agar menghasilkan indeks yang terdistribusi setara. Penjumlahan dengan rata-rata harmonik ditujukan untuk menggambarkan ketidaksetaraan gender berdasarkan adanya hubungan antaraspek dalam IKG.

Formula agregasi indeks laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

$$HARM(G_F, G_M) = \left[\frac{(G_F)^{-1} + (G_M)^{-1}}{2} \right]^{-1}$$

Keterangan:

$HARM(G_F, G_M)$: Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan

Pada tahap ketiga, dihitung indeks masing-masing dimensi dengan mengagregasi indikator komponen laki-laki dan perempuan. Namun, karena beberapa dimensi memiliki lebih dari satu indikator komponen, maka sebelumnya perlu dihitung rata-rata geometrik dari indikator komponen tersebut pada setiap jenis kelamin. Dimensi yang memiliki lebih dari satu komponen adalah dimensi pemberdayaan yang terdiri dari komponen anggota parlemen dan tingkat pendidikan. Demikian halnya dengan dimensi kesehatan reproduksi yang memiliki komponen persentase persalinan tidak di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan dengan umur melahirkan di bawah 20 tahun. Khusus untuk dimensi kesehatan reproduksi, agregasi ini hanya berlaku untuk perempuan.

Indeks masing-masing dimensi dihitung dari rata-rata aritmatik indeks dimensi laki-laki dan indeks dimensi perempuan. Khusus untuk dimensi kesehatan, nilai indeks komposit tidak dapat diartikan sebagai rata-rata dari indeks perempuan dan laki-laki, tetapi sebagai setengah jarak dari norma-norma yang ditetapkan untuk indikator kesehatan. Hal ini berlaku karena kesehatan reproduksi hanya berlaku pada perempuan. Sementara nilai indeks kesehatan laki-laki dianggap bernilai 1.

Rumus Indeks Kesehatan Reproduksi (IKR) adalah:

$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF}} \cdot \frac{0,01}{MHPK20} + 1 \right)}{2}$$

Rumus Indeks Pemberdayaan (IP) adalah:

$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_F \cdot SE_F} + \sqrt{PR_M \cdot SE_M} \right)}{2}$$

Rumus Indeks Pasar Tenaga Kerja (IPK) adalah:

$$IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$$

Keterangan:

- IKR : Indeks kesehatan reproduksi
- IP : Indeks pemberdayaan
- IPK : Indeks pasar kerja

Indeks kesehatan reproduksi, indeks pemberdayaan, dan indeks pasar kerja bersifat positif, sehingga nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian pembangunan dalam aspek tersebut yang semakin baik pula. Khusus untuk indeks kesehatan, kondisi yang negatif diatasi dengan penggunaan *inverse*.

Selanjutnya pada tahap keempat dihitung indeks seluruh dimensi yang berfungsi sebagai standar referensi dalam penghitungan ketidaksetaraan di tahap berikutnya. Dalam hal ini, indeks masing-masing dimensi dirata-ratakan secara geometrik seperti pada formula berikut.

$$G_{F,M} = \sqrt[3]{IKR \cdot IP \cdot IPK}$$

Keterangan:

- $G_{F,M}$: Indeks dimensi

Pada tahap kelima, perhitungan indeks komposit dilakukan dengan membandingkan indeks kesetaraan gender dengan standar referensi. Indeks Kesetaraan Gender adalah indeks komposit yang dihitung berdasarkan formula berikut:

$$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$$

Melalui tahap ini akan diperoleh indeks dengan nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Hasil penghitungan ini mengukur sejauh mana pencapaian keberhasilan pembangunan pada empat aspek (kesehatan reproduksi, pendidikan, partisipasi ekonomi, keterwakilan dalam jabatan publik) yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Pada tahap akhir (keenam), penghitungan IKG dilakukan dengan mengurangkan 1 (satu) dengan hasil di atas. Nilai IKG sebesar 0 (nol) mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. Angka 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut. Formula IKG adalah nilai maksimum (yaitu 1) dikurangi indeks kesetaraan gender.

$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$$

Lampiran

https://



Lampiran 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2018–2024

Provinsi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,503	0,528	0,514	0,503	0,504	0,489	0,459
Sumatera Utara	0,465	0,484	0,468	0,445	0,442	0,425	0,399
Sumatera Barat	0,447	0,527	0,503	0,455	0,430	0,425	0,381
Riau	0,497	0,523	0,503	0,477	0,473	0,458	0,471
Jambi	0,561	0,575	0,558	0,554	0,540	0,528	0,528
Sumatera Selatan	0,528	0,531	0,521	0,520	0,517	0,496	0,479
Bengkulu	0,550	0,544	0,523	0,520	0,478	0,469	0,384
Lampung	0,504	0,494	0,474	0,458	0,456	0,437	0,399
Kep. Bangka Belitung	0,587	0,585	0,559	0,527	0,497	0,490	0,379
Kepulauan Riau	0,386	0,414	0,416	0,387	0,395	0,348	0,309
DKI Jakarta	0,300	0,237	0,210	0,194	0,320	0,256	0,147
Jawa Barat	0,508	0,504	0,489	0,493	0,490	0,482	0,458
Jawa Tengah	0,389	0,376	0,370	0,377	0,371	0,336	0,308
D I Yogyakarta	0,220	0,243	0,149	0,250	0,240	0,142	0,163
Jawa Timur	0,483	0,476	0,449	0,460	0,440	0,423	0,347
Banten	0,491	0,503	0,484	0,475	0,478	0,464	0,453
Bali	0,262	0,237	0,305	0,265	0,321	0,239	0,183
Nusa Tenggara Barat	0,577	0,668	0,665	0,653	0,648	0,650	0,530
Nusa Tenggara Timur	0,511	0,481	0,471	0,437	0,436	0,428	0,402
Kalimantan Barat	0,582	0,566	0,558	0,547	0,522	0,519	0,493
Kalimantan Tengah	0,565	0,541	0,547	0,537	0,526	0,541	0,549
Kalimantan Selatan	0,540	0,529	0,528	0,525	0,514	0,507	0,486
Kalimantan Timur	0,497	0,477	0,467	0,436	0,443	0,414	0,441
Kalimantan Utara	0,481	0,497	0,468	0,472	0,444	0,452	0,418
Sulawesi Utara	0,463	0,453	0,431	0,439	0,444	0,422	0,386
Sulawesi Tengah	0,524	0,518	0,520	0,497	0,477	0,469	0,461
Sulawesi Selatan	0,492	0,460	0,427	0,410	0,390	0,366	0,365
Sulawesi Tenggara	0,575	0,565	0,559	0,554	0,490	0,491	0,460
Gorontalo	0,472	0,457	0,456	0,443	0,411	0,391	0,365
Sulawesi Barat	0,539	0,554	0,543	0,543	0,510	0,494	0,491
Maluku	0,532	0,547	0,534	0,521	0,527	0,509	0,538
Maluku Utara	0,566	0,544	0,547	0,541	0,534	0,519	0,508
Papua Barat	0,594	0,543	0,527	0,527	0,537	0,537	0,558
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	...	0,525
Papua	0,550	0,551	0,532	0,535	0,515	0,518	0,479

Lanjutan Lampiran 1

Provinsi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (8)
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	0,530
Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	0,526
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	0,579
Indonesia	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

catatan:: Data Tidak Tersedia untuk daerah pemekaran Papua dan Papua Barat (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya)

Lampiran 2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, 2018–2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Simeulue	0,410	0,431	0,446	0,347	0,402	0,302	0,433
Aceh Singkil	0,549	0,582	0,580	0,561	0,558	0,525	0,527
Aceh Selatan	0,523	0,501	0,412	0,432	0,515	0,457	0,380
Aceh Tenggara	0,533	0,559	0,548	0,509	0,543	0,519	0,530
Aceh Timur	0,556	0,629	0,606	0,577	0,589	0,548	0,589
Aceh Tengah	0,516	0,501	0,509	0,492	0,469	0,507	0,424
Aceh Barat	0,555	0,554	0,490	0,470	0,296	0,404	0,231
Aceh Besar	0,547	0,544	0,543	0,524	0,532	0,500	0,351
Pidie	0,439	0,384	0,404	0,391	0,387	0,288	0,205
Bireuen	0,552	0,520	0,513	0,523	0,503	0,478	0,393
Aceh Utara	0,609	0,627	0,568	0,602	0,606	0,558	0,789
Aceh Barat Daya	0,434	0,475	0,479	0,398	0,471	0,494	0,454
Gayo Lues	0,560	0,619	0,609	0,628	0,617	0,604	0,613
Aceh Tamiang	0,483	0,492	0,502	0,498	0,492	0,488	0,477
Nagan Raya	0,528	0,515	0,468	0,514	0,476	0,486	0,789
Aceh Jaya	0,701	0,520	0,542	0,400	0,478	0,464	0,277
Bener Meriah	0,549	0,608	0,601	0,549	0,576	0,573	0,522
Pidie Jaya	0,577	0,556	0,594	0,517	0,501	0,786	0,400
Kota Banda Aceh	0,202	0,329	0,185	0,233	0,244	0,335	0,182
Kota Sabang	0,291	0,380	0,410	0,267	0,266	0,326	0,186
Kota Langsa	0,543	0,476	0,450	0,500	0,466	0,467	0,484
Kota Lhokseumawe	0,486	0,438	0,406	0,417	0,345	0,303	0,331
Kota Subulussalam	0,578	0,578	0,586	0,588	0,586	0,583	0,525
Nias	0,848	0,600	0,597	0,590	0,566	0,563	0,555
Mandailing Natal	0,578	0,530	0,533	0,512	0,524	0,515	0,518
Tapanuli Selatan	0,538	0,544	0,496	0,529	0,507	0,514	0,523
Tapanuli Tengah	0,569	0,532	0,468	0,382	0,435	0,453	0,438
Tapanuli Utara	0,408	0,447	0,421	0,438	0,427	0,292	0,335
Toba	0,528	0,533	0,520	0,493	0,535	0,505	0,394
Labuhan Batu	0,413	0,398	0,467	0,410	0,475	0,427	0,403
Asahan	0,481	0,500	0,410	0,413	0,406	0,447	0,444
Simalungun	0,479	0,498	0,513	0,472	0,479	0,402	0,435
Dairi	0,400	0,396	0,445	0,395	0,416	0,341	0,319
Karo	0,466	0,398	0,408	0,333	0,356	0,291	0,304

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Deli Serdang	0,427	0,448	0,406	0,418	0,412	0,325	0,294
Langkat	0,534	0,491	0,407	0,408	0,424	0,231	0,334
Nias Selatan	0,547	0,570	0,576	0,570	0,576	0,565	0,594
Humbang Hasundutan	0,539	0,435	0,383	0,358	0,354	0,291	0,348
Pakpak Bharat	0,793	0,410	0,299	0,277	0,342	0,152	0,332
Samosir	0,379	0,361	0,320	0,287	0,265	0,244	0,123
Serdang Bedagai	0,463	0,498	0,455	0,332	0,411	0,434	0,380
Batu Bara	0,482	0,505	0,490	0,437	0,444	0,446	0,390
Padang Lawas Utara	0,591	0,577	0,559	0,557	0,567	0,555	0,537
Padang Lawas	0,631	0,617	0,627	0,612	0,594	0,585	0,813
Labuhan Batu Selatan	0,558	0,593	0,563	0,533	0,514	0,500	0,524
Labuhan Batu Utara	0,632	0,607	0,601	0,604	0,592	0,561	0,565
Nias Utara	0,586	0,580	0,568	0,582	0,582	0,575	0,593
Nias Barat	0,553	0,577	0,544	0,530	0,560	0,529	0,499
Kota Sibolga	0,237	0,202	0,214	0,363	0,297	0,259	0,146
Kota Tanjung Balai	0,435	0,442	0,272	0,199	0,374	0,244	0,343
Kota Pematang Siantar	0,247	0,433	0,169	0,346	0,449	0,317	0,282
Kota Tebing Tinggi	0,409	0,333	0,465	0,354	0,270	0,256	0,188
Kota Medan	0,230	0,343	0,317	0,319	0,278	0,232	0,160
Kota Binjai	0,330	0,386	0,180	0,268	0,278	0,142	0,299
Kota Padangsidimpuan	0,457	0,448	0,193	0,348	0,286	0,260	0,192
Kota Gunungsitoli	0,461	0,348	0,425	0,419	0,371	0,480	0,368
Kepulauan Mentawai	0,849	0,854	0,855	0,851	0,850	0,851	0,849
Pesisir Selatan	0,521	0,521	0,492	0,505	0,517	0,482	0,468
Solok	0,484	0,476	0,449	0,480	0,403	0,423	0,377
Sijunjung	0,528	0,501	0,516	0,527	0,501	0,465	0,491
Tanah Datar	0,384	0,416	0,387	0,312	0,305	0,336	0,344
Padang Pariaman	0,475	0,791	0,778	0,750	0,763	0,751	0,722
Agam	0,392	0,408	0,384	0,359	0,239	0,162	0,355
Lima Puluh Kota	0,396	0,536	0,441	0,549	0,496	0,492	0,453
Pasaman	0,507	0,526	0,525	0,535	0,522	0,527	0,464
Solok Selatan	0,815	0,827	0,824	0,804	0,787	0,811	0,805
Dharmasraya	0,536	0,570	0,566	0,553	0,528	0,539	0,457
Pasaman Barat	0,603	0,569	0,554	0,532	0,519	0,494	0,419

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Padang	0,180	0,192	0,200	0,320	0,171	0,198	0,172
Kota Solok	0,321	0,349	0,270	0,190	0,180	0,182	0,147
Kota Sawah Lunto	0,232	0,168	0,285	0,184	0,223	0,199	0,270
Kota Padang Panjang	0,057	0,230	0,153	0,192	0,153	0,135	0,081
Kota Bukittinggi	0,355	0,194	0,273	0,236	0,156	0,159	0,080
Kota Payakumbuh	0,186	0,173	0,279	0,325	0,295	0,153	0,175
Kota Pariaman	0,289	0,185	0,377	0,331	0,286	0,374	0,120
Kuantan Singingi	0,617	0,650	0,608	0,602	0,583	0,537	0,455
Indragiri Hulu	0,562	0,630	0,636	0,616	0,622	0,573	0,576
Indragiri Hilir	0,639	0,609	0,590	0,589	0,582	0,573	0,533
Pelalawan	0,605	0,846	0,625	0,630	0,638	0,592	0,589
Siak	0,550	0,591	0,599	0,535	0,539	0,542	0,519
Kampar	0,520	0,560	0,531	0,499	0,528	0,492	0,487
Rokan Hulu	0,571	0,617	0,603	0,554	0,590	0,556	0,498
Bengkalis	0,531	0,534	0,494	0,478	0,452	0,489	0,401
Rokan Hilir	0,633	0,584	0,571	0,553	0,517	0,526	0,511
Kepulauan Meranti	0,516	0,536	0,491	0,482	0,498	0,487	0,460
Kota Pekanbaru	0,337	0,249	0,231	0,292	0,149	0,130	0,220
Kota Dumai	0,381	0,385	0,305	0,410	0,458	0,410	0,277
Kerinci	0,526	0,592	0,592	0,568	0,571	0,459	0,420
Merangin	0,865	0,863	0,857	0,669	0,673	0,656	0,643
Sarolangun	0,615	0,626	0,603	0,594	0,574	0,610	0,540
Batang Hari	0,580	0,558	0,520	0,522	0,521	0,507	0,490
Muaro Jambi	0,575	0,620	0,616	0,581	0,579	0,537	0,535
Tanjung Jabung Timur	0,556	0,578	0,539	0,561	0,548	0,547	0,554
Tanjung Jabung Barat	0,577	0,575	0,553	0,517	0,538	0,547	0,581
Tebo	0,593	0,677	0,646	0,649	0,631	0,637	0,569
Bungo	0,602	0,617	0,609	0,593	0,568	0,532	0,442
Kota Jambi	0,297	0,344	0,252	0,431	0,250	0,326	0,358
Kota Sungai Penuh	0,754	0,748	0,794	0,788	0,791	0,758	0,754
Ogan Komering Ulu	0,567	0,565	0,590	0,585	0,585	0,533	0,601
Ogan Komering Ilir	0,582	0,591	0,578	0,578	0,569	0,527	0,548
Muara Enim	0,596	0,562	0,565	0,564	0,569	0,569	0,550
Lahat	0,565	0,538	0,508	0,528	0,513	0,489	0,493
Musi Rawas	0,617	0,595	0,579	0,609	0,522	0,543	0,512

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Musi Banyuasin	0,575	0,629	0,605	0,612	0,602	0,582	0,540
Banyu Asin	0,594	0,580	0,576	0,582	0,581	0,591	0,574
Ogan Komering Ulu Selatan	0,595	0,591	0,603	0,595	0,592	0,590	0,570
Ogan Komering Ulu Timur	0,569	0,553	0,549	0,543	0,546	0,535	0,445
Ogan Ilir	0,598	0,540	0,536	0,567	0,566	0,536	0,501
Empat Lawang	0,599	0,622	0,592	0,557	0,578	0,599	0,507
Penukal Abab Lematang Ilir	0,656	0,849	0,851	0,858	0,850	0,842	0,850
Musi Rawas Utara	0,642	0,663	0,672	0,657	0,656	0,662	0,838
Kota Palembang	0,381	0,433	0,451	0,391	0,403	0,324	0,268
Kota Prabumulih	0,445	0,386	0,391	0,382	0,406	0,337	0,163
Kota Pagar Alam	0,454	0,500	0,447	0,466	0,455	0,471	0,436
Kota Lubuklinggau	0,419	0,451	0,404	0,425	0,292	0,352	0,294
Bengkulu Selatan	0,828	0,829	0,827	0,761	0,738	0,784	0,316
Rejang Lebong	0,533	0,520	0,469	0,537	0,460	0,450	0,392
Bengkulu Utara	0,584	0,588	0,600	0,592	0,538	0,513	0,477
Kaur	0,584	0,620	0,555	0,561	0,541	0,547	0,478
Seluma	0,613	0,566	0,572	0,541	0,552	0,505	0,493
Mukomuko	0,645	0,638	0,633	0,623	0,606	0,604	0,768
Lebong	0,574	0,557	0,545	0,474	0,499	0,520	0,432
Kepahiang	0,551	0,577	0,529	0,510	0,514	0,515	0,489
Bengkulu Tengah	0,550	0,537	0,485	0,512	0,536	0,524	0,483
Kota Bengkulu	0,336	0,443	0,412	0,464	0,328	0,319	0,159
Lampung Barat	0,570	0,575	0,526	0,495	0,505	0,468	0,407
Tanggamus	0,498	0,572	0,539	0,524	0,557	0,532	0,466
Lampung Selatan	0,529	0,545	0,553	0,536	0,499	0,465	0,394
Lampung Timur	0,433	0,467	0,365	0,482	0,481	0,411	0,252
Lampung Tengah	0,573	0,520	0,436	0,472	0,391	0,463	0,322
Lampung Utara	0,569	0,554	0,485	0,473	0,445	0,446	0,492
Way Kanan	0,566	0,563	0,573	0,568	0,574	0,554	0,504
Tulangbawang	0,472	0,464	0,495	0,498	0,492	0,486	0,431
Pesawaran	0,496	0,515	0,498	0,452	0,498	0,451	0,488
Pringsewu	0,317	0,383	0,376	0,395	0,275	0,181	0,130
Mesuji	0,599	0,562	0,557	0,490	0,450	0,482	0,391

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tulang Bawang Barat	0,535	0,586	0,561	0,572	0,497	0,499	0,475
Pesisir Barat	0,593	0,636	0,620	0,602	0,597	0,587	0,509
Kota Bandar Lampung	0,208	0,316	0,375	0,197	0,298	0,172	0,151
Kota Metro	0,142	0,150	0,146	0,151	0,315	0,289	0,152
Bangka	0,500	0,479	0,468	0,539	0,411	0,488	0,401
Belitung	0,603	0,559	0,575	0,506	0,516	0,287	0,361
Bangka Barat	0,579	0,528	0,421	0,488	0,421	0,459	0,373
Bangka Tengah	0,560	0,565	0,512	0,550	0,545	0,388	0,427
Bangka Selatan	0,643	0,621	0,605	0,573	0,597	0,599	0,500
Belitung Timur	0,466	0,518	0,479	0,364	0,414	0,477	0,700
Kota Pangkal Pinang	0,351	0,242	0,242	0,209	0,238	0,217	0,211
Karimun	0,475	0,423	0,398	0,343	0,225	0,401	0,488
Bintan	0,464	0,389	0,416	0,414	0,446	0,357	0,362
Natuna	0,612	0,848	0,837	0,825	0,835	0,528	0,805
Lingga	0,558	0,589	0,578	0,558	0,570	0,529	0,486
Kepulauan Anambas	0,526	0,581	0,491	0,475	0,494	0,484	0,490
Kota Batam	0,404	0,394	0,407	0,343	0,342	0,306	0,193
Kota Tanjung Pinang	0,227	0,176	0,255	0,294	0,124	0,107	0,125
Kep. Seribu	0,439	0,496	0,403	0,378	0,228	0,252	0,186
Kota Jakarta Selatan	0,304	0,235	0,161	0,192	0,254	0,328	0,147
Kota Jakarta Timur	0,312	0,245	0,167	0,248	0,331	0,210	0,129
Kota Jakarta Pusat	0,295	0,300	0,204	0,142	0,229	0,155	0,136
Kota Jakarta Barat	0,217	0,232	0,261	0,186	0,385	0,164	0,164
Kota Jakarta Utara	0,287	0,177	0,320	0,191	0,198	0,315	0,155
Bogor	0,571	0,579	0,575	0,580	0,588	0,582	0,577
Sukabumi	0,627	0,579	0,558	0,559	0,535	0,559	0,533
Cianjur	0,597	0,586	0,563	0,590	0,565	0,567	0,544
Bandung	0,469	0,513	0,485	0,499	0,522	0,472	0,387
Garut	0,605	0,602	0,586	0,605	0,551	0,555	0,533
Tasikmalaya	0,576	0,567	0,568	0,549	0,554	0,565	0,559
Ciamis	0,547	0,515	0,512	0,519	0,510	0,445	0,439
Kuningan	0,466	0,447	0,455	0,444	0,370	0,368	0,415
Cirebon	0,481	0,468	0,439	0,455	0,476	0,393	0,385
Majalengka	0,514	0,503	0,508	0,507	0,493	0,459	0,437
Sumedang	0,491	0,473	0,451	0,482	0,484	0,438	0,217

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indramayu	0,505	0,468	0,391	0,353	0,411	0,400	0,349
Subang	0,545	0,545	0,551	0,539	0,517	0,511	0,432
Purwakarta	0,532	0,529	0,519	0,546	0,532	0,549	0,548
Karawang	0,526	0,506	0,477	0,504	0,485	0,498	0,478
Bekasi	0,509	0,460	0,432	0,449	0,394	0,443	0,348
Bandung Barat	0,542	0,558	0,558	0,543	0,564	0,564	0,520
Pangandaran	0,433	0,521	0,435	0,478	0,463	0,416	0,415
Kota Bogor	0,487	0,393	0,418	0,375	0,434	0,343	0,376
Kota Sukabumi	0,492	0,450	0,465	0,400	0,343	0,221	0,359
Kota Bandung	0,374	0,321	0,386	0,353	0,360	0,275	0,244
Kota Cirebon	0,380	0,311	0,185	0,301	0,282	0,409	0,383
Kota Bekasi	0,363	0,342	0,326	0,250	0,334	0,253	0,273
Kota Depok	0,273	0,181	0,259	0,167	0,160	0,152	0,165
Kota Cimahi	0,221	0,189	0,235	0,323	0,381	0,276	0,162
Kota Tasikmalaya	0,485	0,478	0,453	0,473	0,482	0,390	0,354
Kota Banjar	0,253	0,456	0,476	0,493	0,296	0,288	0,239
Cilacap	0,414	0,407	0,380	0,395	0,404	0,433	0,376
Banyumas	0,314	0,304	0,251	0,250	0,198	0,193	0,211
Purbalingga	0,452	0,438	0,346	0,458	0,381	0,311	0,213
Banjarnegara	0,419	0,434	0,224	0,301	0,301	0,236	0,282
Kebumen	0,395	0,400	0,416	0,359	0,349	0,344	0,328
Purworejo	0,457	0,351	0,335	0,398	0,356	0,193	0,264
Wonosobo	0,507	0,594	0,536	0,549	0,503	0,427	0,284
Magelang	0,421	0,413	0,408	0,429	0,453	0,259	0,267
Boyolali	0,436	0,312	0,323	0,279	0,363	0,306	0,233
Klaten	0,397	0,294	0,415	0,391	0,229	0,190	0,162
Sukoharjo	0,123	0,201	0,203	0,155	0,260	0,145	0,166
Wonogiri	0,422	0,403	0,448	0,372	0,383	0,198	0,351
Karanganyar	0,293	0,170	0,318	0,352	0,374	0,279	0,262
Sragen	0,449	0,455	0,452	0,474	0,481	0,457	0,377
Grobogan	0,296	0,371	0,284	0,292	0,476	0,400	0,381
Blora	0,438	0,261	0,371	0,294	0,277	0,407	0,313
Rembang	0,325	0,427	0,421	0,393	0,261	0,265	0,251
Pati	0,374	0,374	0,402	0,308	0,303	0,233	0,237
Kudus	0,313	0,239	0,295	0,367	0,367	0,226	0,232

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jepara	0,480	0,449	0,291	0,356	0,398	0,425	0,340
Demak	0,359	0,414	0,243	0,453	0,390	0,244	0,326
Semarang	0,464	0,381	0,405	0,387	0,357	0,416	0,212
Temanggung	0,400	0,374	0,336	0,202	0,390	0,192	0,220
Kendal	0,328	0,188	0,291	0,329	0,211	0,229	0,194
Batang	0,436	0,401	0,484	0,444	0,406	0,397	0,290
Pekalongan	0,352	0,193	0,245	0,195	0,195	0,351	0,215
Pemalang	0,460	0,387	0,370	0,441	0,425	0,378	0,380
Tegal	0,425	0,400	0,371	0,233	0,312	0,184	0,315
Brebes	0,401	0,455	0,358	0,426	0,453	0,435	0,422
Kota Magelang	0,132	0,173	0,236	0,123	0,259	0,121	0,137
Kota Surakarta	0,122	0,166	0,137	0,128	0,147	0,159	0,173
Kota Salatiga	0,123	0,156	0,166	0,149	0,133	0,143	0,222
Kota Semarang	0,245	0,173	0,157	0,142	0,266	0,168	0,140
Kota Pekalongan	0,147	0,260	0,367	0,294	0,208	0,176	0,185
Kota Tegal	0,247	0,206	0,199	0,206	0,193	0,294	0,318
Kulon Progo	0,304	0,255	0,129	0,253	0,183	0,129	0,145
Bantul	0,231	0,318	0,194	0,235	0,321	0,151	0,127
Gunung Kidul	0,314	0,200	0,220	0,298	0,315	0,183	0,183
Sleman	0,116	0,151	0,111	0,216	0,118	0,116	0,112
Kota Yogyakarta	0,099	0,162	0,166	0,268	0,244	0,151	0,167
Pacitan	0,434	0,492	0,517	0,470	0,451	0,444	0,476
Ponorogo	0,316	0,377	0,348	0,358	0,394	0,358	0,161
Trenggalek	0,469	0,461	0,422	0,455	0,497	0,425	0,463
Tulungagung	0,223	0,376	0,208	0,361	0,375	0,244	0,345
Blitar	0,406	0,382	0,348	0,287	0,355	0,260	0,263
Kediri	0,355	0,311	0,363	0,349	0,378	0,372	0,182
Malang	0,436	0,478	0,475	0,422	0,402	0,436	0,315
Lumajang	0,542	0,503	0,436	0,482	0,472	0,322	0,231
Jember	0,492	0,454	0,503	0,487	0,488	0,406	0,330
Banyuwangi	0,408	0,423	0,352	0,326	0,236	0,230	0,277
Bondowoso	0,612	0,591	0,538	0,499	0,526	0,547	0,463
Situbondo	0,480	0,497	0,424	0,465	0,474	0,407	0,461
Probolinggo	0,572	0,568	0,532	0,527	0,485	0,479	0,442
Pasuruan	0,515	0,536	0,530	0,537	0,531	0,539	0,346

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sidoarjo	0,348	0,398	0,303	0,255	0,301	0,179	0,183
Mojokerto	0,441	0,443	0,346	0,402	0,349	0,343	0,295
Jombang	0,378	0,439	0,345	0,422	0,399	0,267	0,236
Nganjuk	0,442	0,421	0,357	0,402	0,382	0,427	0,351
Madiun	0,440	0,324	0,369	0,354	0,401	0,405	0,146
Magetan	0,404	0,389	0,351	0,390	0,192	0,173	0,178
Ngawi	0,318	0,454	0,422	0,381	0,150	0,171	0,176
Bojonegoro	0,541	0,491	0,424	0,443	0,439	0,423	0,225
Tuban	0,508	0,511	0,501	0,494	0,417	0,359	0,213
Lamongan	0,451	0,473	0,442	0,423	0,272	0,334	0,203
Gresik	0,419	0,421	0,418	0,404	0,407	0,409	0,335
Bangkalan	0,846	0,636	0,591	0,606	0,594	0,615	0,641
Sampang	0,681	0,617	0,612	0,618	0,595	0,582	0,551
Pamekasan	0,622	0,640	0,627	0,660	0,644	0,601	0,548
Sumenep	0,677	0,628	0,598	0,596	0,570	0,593	0,549
Kota Kediri	0,232	0,244	0,174	0,117	0,109	0,093	0,120
Kota Blitar	0,250	0,317	0,334	0,199	0,194	0,188	0,198
Kota Malang	0,203	0,347	0,155	0,136	0,350	0,131	0,131
Kota Probolinggo	0,262	0,261	0,265	0,269	0,236	0,392	0,257
Kota Pasuruan	0,459	0,306	0,308	0,378	0,418	0,310	0,192
Kota Mojokerto	0,108	0,190	0,140	0,170	0,156	0,119	0,150
Kota Madiun	0,057	0,274	0,273	0,094	0,093	0,079	0,093
Kota Surabaya	0,309	0,279	0,160	0,206	0,230	0,128	0,171
Kota Batu	0,329	0,411	0,402	0,267	0,310	0,378	0,188
Pandeglang	0,624	0,605	0,580	0,583	0,573	0,561	0,502
Lebak	0,617	0,635	0,605	0,626	0,616	0,600	0,567
Tangerang	0,477	0,499	0,486	0,457	0,433	0,402	0,251
Serang	0,553	0,572	0,563	0,554	0,560	0,544	0,531
Kota Tangerang	0,266	0,342	0,279	0,311	0,324	0,284	0,328
Kota Cilegon	0,456	0,447	0,338	0,354	0,443	0,260	0,248
Kota Serang	0,546	0,549	0,508	0,521	0,544	0,530	0,543
Kota Tangerang Selatan	0,303	0,223	0,171	0,155	0,170	0,200	0,176
Jembrana	0,255	0,252	0,365	0,320	0,206	0,211	0,211
Tabanan	0,240	0,168	0,236	0,148	0,180	0,170	0,178
Badung	0,216	0,149	0,142	0,130	0,118	0,126	0,186

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gianyar	0,238	0,306	0,216	0,204	0,193	0,193	0,175
Klungkung	0,176	0,157	0,149	0,193	0,198	0,186	0,210
Bangli	0,284	0,389	0,362	0,261	0,257	0,249	0,233
Karangasem	0,479	0,342	0,401	0,297	0,358	0,284	0,246
Buleleng	0,306	0,384	0,405	0,421	0,462	0,389	0,353
Kota Denpasar	0,313	0,271	0,348	0,212	0,303	0,288	0,200
Lombok Barat	0,572	0,570	0,598	0,574	0,549	0,565	0,538
Lombok Tengah	0,610	0,621	0,629	0,597	0,601	0,603	0,544
Lombok Timur	0,616	0,614	0,609	0,584	0,568	0,576	0,551
Sumbawa	0,576	0,501	0,413	0,315	0,432	0,350	0,373
Dompu	0,570	0,595	0,549	0,551	0,537	0,534	0,513
Bima	0,534	0,587	0,601	0,587	0,589	0,560	0,479
Sumbawa Barat	0,845	0,566	0,564	0,561	0,545	0,526	0,482
Lombok Utara	n/a	0,619	0,569	0,567	0,560	0,581	0,573
Kota Mataram	0,492	0,445	0,424	0,423	0,476	0,465	0,444
Kota Bima	0,477	0,485	0,458	0,495	0,480	0,482	0,458
Sumba Barat	0,414	0,429	0,406	0,441	0,417	0,346	0,278
Sumba Timur	0,535	0,492	0,466	0,433	0,464	0,447	0,416
Kupang	0,531	0,531	0,550	0,515	0,482	0,464	0,488
Timor Tengah Selatan	0,477	0,523	0,538	0,500	0,475	0,475	0,517
Timor Tengah Utara	0,513	0,806	0,797	0,506	0,544	0,519	0,443
Belu	0,442	0,453	0,481	0,362	0,399	0,290	0,362
Alor	0,564	0,574	0,565	0,531	0,551	0,543	0,535
Lembata	0,775	0,693	0,713	0,723	0,740	0,778	0,747
Flores Timur	0,754	0,486	0,503	0,532	0,395	0,448	0,676
Sikka	0,364	0,335	0,413	0,328	0,357	0,298	0,273
Ende	0,437	0,454	0,407	0,363	0,373	0,252	0,193
Ngada	0,289	0,372	0,346	0,263	0,297	0,673	0,665
Manggarai	0,512	0,461	0,500	0,454	0,454	0,462	0,465
Rote Ndao	0,611	0,845	0,836	0,813	0,815	0,808	0,810
Manggarai Barat	0,628	0,584	0,577	0,481	0,499	0,523	0,461
Sumba Tengah	0,817	0,809	0,807	0,751	0,758	0,775	0,430
Sumba Barat Daya	0,829	0,535	0,540	0,467	0,487	0,493	0,490
Nagekeo	0,732	0,645	0,738	0,736	0,698	0,660	0,350
Manggarai Timur	0,660	0,647	0,648	0,610	0,611	0,596	0,590

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sabu Raijua	0,588	0,546	0,500	0,524	0,534	0,497	0,484
Malaka	0,487	0,485	0,462	0,382	0,506	0,454	0,404
Kota Kupang	0,406	0,440	0,344	0,421	0,335	0,388	0,359
Sambas	0,539	0,535	0,531	0,474	0,413	0,487	0,414
Bengkayang	0,572	0,533	0,524	0,459	0,445	0,432	0,319
Landak	0,580	0,558	0,532	0,540	0,521	0,524	0,467
Mempawah	0,566	0,567	0,570	0,546	0,567	0,555	0,546
Sanggau	0,602	0,580	0,581	0,554	0,563	0,541	0,563
Ketapang	0,609	0,671	0,674	0,605	0,642	0,602	0,634
Sintang	0,611	0,612	0,592	0,587	0,585	0,591	0,561
Kapuas Hulu	0,576	0,620	0,586	0,619	0,574	0,498	0,398
Sekadau	0,678	0,675	0,668	0,676	0,659	0,661	0,856
Melawi	0,659	0,603	0,603	0,594	0,563	0,561	0,555
Kayong Utara	0,687	0,856	0,853	0,859	0,855	0,841	0,617
Kubu Raya	0,600	0,544	0,526	0,541	0,515	0,524	0,570
Kota Pontianak	0,440	0,314	0,454	0,425	0,339	0,286	0,239
Kota Singkawang	0,352	0,327	0,321	0,354	0,321	0,372	0,214
Kotawaringin Barat	0,531	0,554	0,554	0,518	0,527	0,524	0,483
Kotawaringin Timur	0,580	0,563	0,582	0,555	0,507	0,538	0,553
Kapuas	0,570	0,542	0,565	0,585	0,576	0,564	0,562
Barito Selatan	0,584	0,555	0,566	0,550	0,558	0,529	0,498
Barito Utara	0,550	0,569	0,559	0,558	0,522	0,533	0,527
Sukamara	0,530	0,550	0,535	0,518	0,544	0,499	0,518
Lamandau	0,659	0,549	0,523	0,564	0,532	0,564	0,509
Seruyan	0,588	0,600	0,622	0,601	0,575	0,616	0,624
Katingan	0,598	0,637	0,610	0,600	0,570	0,593	0,584
Pulang Pisau	0,546	0,554	0,558	0,532	0,544	0,501	0,500
Gunung Mas	0,582	0,573	0,560	0,553	0,549	0,572	0,574
Barito Timur	0,573	0,554	0,540	0,508	0,489	0,482	0,471
Murung Raya	0,616	0,622	0,624	0,628	0,618	0,598	0,619
Kota Palangka Raya	0,427	0,430	0,432	0,437	0,429	0,415	0,420
Tanah Laut	0,559	0,532	0,517	0,483	0,481	0,421	0,473
Kotabaru	0,576	0,577	0,584	0,588	0,597	0,571	0,551
Banjar	0,540	0,528	0,509	0,504	0,498	0,530	0,528
Barito Kuala	0,547	0,530	0,553	0,483	0,509	0,516	0,511

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tapin	0,596	0,610	0,605	0,586	0,581	0,563	0,577
Hulu Sungai Selatan	0,527	0,566	0,564	0,567	0,497	0,531	0,459
Hulu Sungai Tengah	0,521	0,489	0,521	0,436	0,482	0,360	0,390
Hulu Sungai Utara	0,560	0,531	0,518	0,494	0,445	0,458	0,465
Tabalong	0,531	0,514	0,523	0,529	0,504	0,503	0,421
Tanah Bumbu	0,592	0,582	0,591	0,573	0,570	0,557	0,533
Balangan	0,601	0,567	0,581	0,579	0,555	0,574	0,523
Kota Banjarmasin	0,391	0,368	0,356	0,459	0,422	0,400	0,284
Kota Banjar Baru	0,267	0,481	0,409	0,436	0,405	0,361	0,173
Paser	0,552	0,504	0,549	0,511	0,528	0,489	0,527
Kutai Barat	0,513	0,574	0,484	0,501	0,490	0,491	0,477
Kutai Kartanegara	0,571	0,540	0,556	0,511	0,540	0,490	0,439
Kutai Timur	0,520	0,561	0,530	0,518	0,552	0,532	0,517
Berau	0,487	0,523	0,493	0,467	0,380	0,502	0,421
Penajam Paser Utara	0,589	0,550	0,438	0,572	0,527	0,544	0,474
Mahakam Ulu	0,465	0,509	0,406	0,449	0,421	0,362	0,339
Kota Balikpapan	0,168	0,300	0,297	0,246	0,344	0,178	0,313
Kota Samarinda	0,411	0,320	0,311	0,222	0,197	0,237	0,243
Kota Bontang	0,261	0,253	0,235	0,348	0,253	0,314	0,313
Malinau	0,551	0,544	0,480	0,515	0,511	0,491	0,480
Bulungan	0,597	0,481	0,457	0,439	0,453	0,388	0,496
Tana Tidung	0,605	0,576	0,536	0,472	0,496	0,480	0,448
Nunukan	0,521	0,458	0,464	0,429	0,370	0,370	0,362
Kota Tarakan	0,443	0,372	0,344	0,410	0,244	0,367	0,352
Bolaang Mongondow	0,559	0,526	0,515	0,496	0,538	0,528	0,508
Minahasa	0,416	0,269	0,314	0,326	0,368	0,359	0,315
Kepulauan Sangihe	0,469	0,525	0,535	0,495	0,508	0,477	0,476
Kepulauan Talaud	0,579	0,542	0,481	0,454	0,499	0,494	0,484
Minahasa Selatan	0,481	0,474	0,432	0,419	0,447	0,445	0,406
Minahasa Utara	0,511	0,469	0,509	0,543	0,504	0,485	0,363
Bolaang Mongondow Utara	0,517	0,504	0,465	0,412	0,511	0,395	0,412
Siau Tagulandang Biaro	0,437	0,442	0,424	0,369	0,445	0,403	0,332
Minahasa Tenggara	0,496	0,504	0,391	0,466	0,501	0,207	0,355

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bolaang Mongondow Selatan	0,608	0,577	0,537	0,540	0,521	0,512	0,500
Bolaang Mongondow Timur	0,555	0,560	0,483	0,549	0,498	0,499	0,482
Kota Manado	0,344	0,327	0,167	0,360	0,208	0,167	0,148
Kota Bitung	0,467	0,416	0,480	0,479	0,369	0,451	0,394
Kota Tomohon	0,150	0,167	0,162	0,172	0,215	0,155	0,170
Kota Kotamobagu	0,413	0,463	0,423	0,358	0,237	0,329	0,383
Banggai Kepulauan	0,585	0,572	0,544	0,558	0,560	0,539	0,525
Banggai	0,529	0,525	0,522	0,501	0,463	0,479	0,450
Morowali	0,535	0,574	0,568	0,601	0,581	0,570	0,476
Poso	0,534	0,420	0,521	0,383	0,445	0,386	0,336
Donggala	0,633	0,571	0,571	0,576	0,559	0,600	0,530
Toli-Toli	0,531	0,516	0,480	0,537	0,458	0,371	0,365
Buol	0,491	0,540	0,517	0,446	0,454	0,438	0,349
Parigi Moutong	0,566	0,561	0,589	0,547	0,538	0,528	0,510
Tojo Una-Una	0,578	0,604	0,614	0,598	0,603	0,565	0,491
Sigi	0,598	0,548	0,560	0,502	0,470	0,517	0,444
Banggai Laut	0,651	0,621	0,622	0,583	0,573	0,575	0,542
Morowali Utara	0,576	0,505	0,516	0,491	0,458	0,472	0,435
Kota Palu	0,400	0,417	0,440	0,466	0,349	0,209	0,300
Kepulauan Selayar	0,528	0,479	0,431	0,400	0,379	0,377	0,379
Bulukumba	0,496	0,485	0,492	0,432	0,368	0,258	0,356
Bantaeng	0,504	0,487	0,490	0,465	0,392	0,348	0,416
Jeneponto	0,494	0,468	0,486	0,288	0,426	0,410	0,217
Takalar	0,415	0,446	0,411	0,276	0,396	0,192	0,329
Gowa	0,507	0,411	0,283	0,332	0,285	0,359	0,308
Sinjai	0,484	0,445	0,348	0,393	0,417	0,379	0,382
Maros	0,559	0,501	0,426	0,457	0,396	0,353	0,236
Pangkajene Dan Kepulauan	0,569	0,556	0,499	0,513	0,456	0,440	0,424
Barru	0,467	0,333	0,418	0,349	0,400	0,224	0,330
Bone	0,567	0,594	0,537	0,511	0,483	0,496	0,501
Soppeng	0,469	0,527	0,350	0,421	0,260	0,267	0,265
Wajo	0,487	0,469	0,467	0,391	0,428	0,475	0,419
Sidenreng Rappang	0,589	0,582	0,591	0,564	0,543	0,452	0,397

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	0,507	0,467	0,393	0,474	0,501	0,250	0,280
Enrekang	0,534	0,446	0,471	0,471	0,445	0,276	0,318
Luwu	0,551	0,576	0,565	0,545	0,540	0,535	0,393
Tana Toraja	0,485	0,481	0,430	0,476	0,504	0,501	0,523
Luwu Utara	0,576	0,835	0,831	0,606	0,582	0,512	0,443
Luwu Timur	0,550	0,556	0,510	0,440	0,447	0,431	0,465
Toraja Utara	0,551	0,506	0,454	0,482	0,473	0,454	0,225
Kota Makassar	0,394	0,344	0,330	0,198	0,188	0,186	0,356
Kota Parepare	0,403	0,225	0,215	0,184	0,210	0,207	0,166
Kota Palopo	0,407	0,190	0,329	0,286	0,289	0,273	0,204
Buton	0,557	0,617	0,576	0,571	0,541	0,528	0,518
Muna	0,601	0,580	0,578	0,571	0,517	0,529	0,551
Konawe	0,578	0,553	0,576	0,547	0,514	0,527	0,551
Kolaka	0,576	0,568	0,565	0,581	0,471	0,464	0,383
Konawe Selatan	0,529	0,598	0,598	0,581	0,425	0,410	0,449
Bombana	0,625	0,551	0,570	0,570	0,511	0,486	0,524
Wakatobi	0,561	0,540	0,546	0,505	0,500	0,429	0,430
Kolaka Utara	0,855	0,525	0,524	0,476	0,450	0,439	0,407
Buton Utara	0,615	0,567	0,507	0,491	0,506	0,482	0,452
Konawe Utara	0,575	0,591	0,570	0,569	0,542	0,558	0,524
Kolaka Timur	0,521	0,495	0,510	0,453	0,500	0,489	0,498
Konawe Kepulauan	0,595	0,608	0,592	0,570	0,586	0,562	0,505
Muna Barat	0,613	0,565	0,528	0,523	0,536	0,479	0,513
Buton Tengah	0,608	0,560	0,579	0,575	0,497	0,489	0,528
Buton Selatan	0,673	0,573	0,564	0,543	0,521	0,522	0,559
Kota Kendari	0,485	0,516	0,481	0,511	0,368	0,409	0,394
Kota Baubau	0,543	0,487	0,495	0,499	0,405	0,394	0,387
Boalemo	0,472	0,509	0,456	0,480	0,384	0,430	0,319
Gorontalo	0,480	0,420	0,508	0,449	0,437	0,350	0,242
Pohuwato	0,548	0,530	0,521	0,545	0,452	0,502	0,481
Bone Bolango	0,586	0,553	0,527	0,446	0,523	0,516	0,417
Gorontalo Utara	0,463	0,432	0,433	0,481	0,226	0,327	0,178
Kota Gorontalo	0,428	0,425	0,292	0,370	0,407	0,363	0,359
Majene	0,535	0,473	0,439	0,441	0,452	0,415	0,424
Polewali Mandar	0,492	0,513	0,479	0,493	0,484	0,430	0,467

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mamasa	0,601	0,567	0,565	0,527	0,506	0,488	0,480
Mamuju	0,577	0,594	0,581	0,596	0,524	0,546	0,501
Pasangkayu	0,590	0,544	0,524	0,482	0,504	0,474	0,461
Mamuju Tengah	0,492	0,501	0,535	0,475	0,499	0,491	0,489
Kepulauan Tanimbar	0,538	0,547	0,529	0,522	0,507	0,495	0,527
Maluku Tenggara	0,584	0,530	0,488	0,488	0,549	0,539	0,522
Maluku Tengah	0,612	0,604	0,588	0,576	0,582	0,561	0,522
Buru	0,605	0,645	0,629	0,575	0,595	0,559	0,535
Kepulauan Aru	0,624	0,617	0,595	0,592	0,616	0,614	0,592
Seram Bagian Barat	0,579	0,659	0,649	0,632	0,622	0,610	0,534
Seram Bagian Timur	0,626	0,668	0,653	0,644	0,652	0,642	0,611
Maluku Barat Daya	0,835	0,593	0,593	0,566	0,571	0,573	0,493
Buru Selatan	0,639	0,654	0,610	0,602	0,601	0,598	0,588
Kota Ambon	0,506	0,471	0,472	0,482	0,496	0,485	0,476
Kota Tual	0,826	0,585	0,584	0,553	0,561	0,562	0,569
Halmahera Barat	0,593	0,585	0,552	0,534	0,556	0,532	0,542
Halmahera Tengah	0,671	0,638	0,615	0,606	0,581	0,606	0,620
Kepulauan Sula	0,639	0,660	0,861	0,849	0,864	0,857	0,581
Halmahera Selatan	0,865	0,639	0,655	0,640	0,634	0,615	0,579
Halmahera Utara	0,585	0,581	0,585	0,572	0,584	0,560	0,509
Halmahera Timur	0,661	0,613	0,607	0,652	0,625	0,597	0,601
Pulau Morotai	0,643	0,590	0,606	0,588	0,569	0,556	0,480
Pulau Taliabu	0,606	0,590	0,583	0,608	0,613	0,617	0,577
Kota Ternate	0,369	0,475	0,430	0,410	0,375	0,406	0,438
Kota Tidore Kepulauan	0,536	0,483	0,514	0,465	0,480	0,471	0,414
Fakfak	0,540	0,543	0,533	0,492	0,533	0,524	0,448
Kaimana	0,539	0,539	0,512	0,471	0,532	0,511	0,524
Teluk Wondama	0,587	0,576	0,511	0,593	0,592	0,587	0,529
Teluk Bintuni	0,591	0,546	0,533	0,515	0,571	0,564	0,598
Manokwari	0,489	0,490	0,435	0,478	0,480	0,485	0,494
Manokwari Selatan	0,566	0,514	0,534	0,500	0,494	0,480	0,501
Pegunungan Arfak	0,593	0,691	0,662	0,689	0,645	0,651	0,637
Raja Ampat	0,555	0,603	0,600	0,616	0,619	0,622	0,601
Sorong	0,610	0,530	0,538	0,549	0,549	0,565	0,547
Sorong Selatan	0,583	0,535	0,565	0,569	0,581	0,576	0,641

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maybrat	0,563	0,849	0,837	0,828	0,799	0,803	0,459
Tambrauw	0,598	0,863	0,858	0,851	0,834	0,842	0,618
Kota Sorong	0,427	0,486	0,452	0,445	0,454	0,452	0,469
Jayapura	0,562	0,502	0,451	0,491	0,488	0,478	0,494
Kepulauan Yapen	0,638	0,547	0,544	0,549	0,553	0,580	0,630
Biak Numfor	0,525	0,474	0,451	0,482	0,458	0,392	0,448
Sarmi	0,557	0,570	0,506	0,454	0,457	0,439	0,362
Keerom	0,550	0,584	0,584	0,530	0,571	0,534	0,498
Waropen	0,581	0,867	0,661	0,641	0,684	0,634	0,619
Supiori	0,566	0,548	0,542	0,559	0,573	0,530	0,830
Mamberamo Raya	0,639	0,579	0,593	0,627	0,580	0,578	0,636
Kota Jayapura	0,351	0,390	0,388	0,413	0,374	0,290	0,350
Merauke	0,491	0,560	0,508	0,565	0,533	0,496	0,412
Boven Digoel	0,544	0,547	0,579	0,595	0,572	0,529	0,554
Mappi	0,615	0,638	0,636	0,640	0,633	0,638	0,616
Asmat	0,665	0,551	0,545	0,520	0,466	0,479	0,501
Mimika	0,577	0,580	0,552	0,581	0,556	0,513	0,392
Dogiyai	0,583	0,622	0,866	0,869	0,709	0,693	0,853
Deiyai	0,879	0,880	0,782	0,864	0,872	0,879	0,853
Nabire	0,508	0,518	0,500	0,500	0,508	0,496	0,482
Paniai	0,856	0,600	0,612	0,646	0,624	0,674	0,859
Intan Jaya	0,889	0,869	0,879	0,886	0,871	0,887	0,865
Puncak	0,870	0,700	0,679	0,614	0,372	0,694	0,614
Puncak Jaya	0,622	0,659	0,645	0,573	0,505	0,520	0,560
Nduga	0,615	0,719	0,583	0,853	0,606	0,622	0,625
Jayawijaya	0,478	0,572	0,552	0,537	0,503	0,509	0,491
Lanny Jaya	0,621	0,641	0,519	0,840	0,641	0,837	0,558
Tolikara	0,577	0,527	0,621	0,576	0,616	0,586	0,606
Mamberamo Tengah	0,686	0,425	0,449	0,546	0,518	0,512	0,505
Yalimo	0,582	0,629	0,591	0,827	0,827	0,824	0,604
Yahukimo	0,700	0,715	0,690	0,667	0,687	0,665	0,661
Pegunungan Bintang	0,650	0,607	0,652	0,666	0,681	0,676	0,668
Indonesia	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Lampiran 3 Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Aceh	0,089	0,197	91,03	8,97	50,14	45,09	80,68	49,62
Sumatera Utara	0,102	0,150	82,65	17,35	56,04	52,30	84,25	58,54
Sumatera Barat	0,073	0,163	84,62	15,38	47,61	49,83	82,75	57,75
Riau	0,138	0,197	86,15	13,85	47,02	43,46	84,80	47,05
Jambi	0,199	0,300	87,27	12,73	42,75	35,98	86,04	51,17
Sumatera Selatan	0,183	0,298	76,00	24,00	40,76	36,22	85,79	55,35
Bengkulu	0,048	0,301	77,78	22,22	45,67	40,34	85,10	57,74
Lampung	0,057	0,237	82,35	17,65	37,27	32,21	85,61	54,58
Kep. Bangka Belitung	0,038	0,310	77,78	22,22	41,51	38,05	86,20	50,57
Kepulauan Riau	0,030	0,114	86,05	13,95	61,60	58,65	85,73	52,15
Dki Jakarta	0,000	0,123	74,53	25,47	74,23	64,32	79,95	50,24
Jawa Barat	0,121	0,281	77,31	22,69	42,04	34,71	84,51	50,59
Jawa Tengah	0,018	0,249	82,35	17,65	35,72	29,61	85,66	61,82
D I Yogyakarta	0,000	0,140	83,64	16,36	53,72	48,98	83,27	66,59
Jawa Timur	0,032	0,247	80,00	20,00	39,84	32,24	86,52	60,64
Banten	0,086	0,241	86,00	14,00	47,20	38,34	82,95	48,90
Bali	0,003	0,197	81,82	18,18	54,45	43,51	83,77	70,49
Nusa Tenggara Barat	0,209	0,319	89,23	10,77	39,22	29,45	86,47	68,04
Nusa Tenggara Timur	0,125	0,189	76,92	23,08	32,31	29,75	84,70	70,40
Kalimantan Barat	0,190	0,324	76,92	23,08	35,55	30,77	86,05	53,95
Kalimantan Tengah	0,321	0,365	80,00	20,00	35,13	30,30	86,50	49,60
Kalimantan Selatan	0,167	0,303	80,00	20,00	39,43	32,42	84,71	55,52
Kalimantan Timur	0,066	0,258	87,27	12,73	56,32	50,23	83,75	49,07
Kalimantan Utara	0,060	0,272	82,86	17,14	46,15	40,60	86,51	52,14
Sulawesi Utara	0,081	0,305	54,76	45,24	48,18	50,82	81,91	49,59
Sulawesi Tengah	0,137	0,332	74,55	25,45	37,44	35,09	85,94	55,47
Sulawesi Selatan	0,044	0,271	75,00	25,00	44,38	40,98	82,52	52,68
Sulawesi Tenggara	0,160	0,331	71,11	28,89	42,31	37,40	85,03	60,30
Gorontalo	0,045	0,303	75,56	24,44	31,41	36,10	84,50	55,23
Sulawesi Barat	0,119	0,307	88,89	11,11	39,43	35,97	85,95	56,46
Maluku	0,458	0,222	86,67	13,33	52,41	50,58	76,62	56,25
Maluku Utara	0,329	0,303	71,11	28,89	44,06	38,33	82,40	54,98
Papua Barat	0,280	0,306	91,43	8,57	53,55	43,78	81,42	59,80
Papua Barat Daya	0,297	0,259	85,71	14,29	60,86	54,65	79,64	54,72

Lanjutan Lampiran 3

Provinsi	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Papua	0,168	0,253	84,44	15,56	64,17	55,75	79,01	56,45
Papua Selatan	0,196	0,347	88,57	11,43	51,53	41,40	82,39	59,70
Papua Tengah	0,188	0,293	90,00	10,00	33,14	26,50	85,03	59,32
Papua Pegunungan	0,533	0,249	91,11	8,89	24,45	15,48	90,37	85,71
Indonesia	0,094	0,248	77,54	22,46	43,78	37,64	84,66	56,42

Catatan: ¹Proporsi perempuan 15-49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan

²Proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun

³Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

L: laki-laki

P: Perempuan

**Lampiran 4 Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/
Kota, 2024**

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Simeulue	0,078	0,278	83,33	16,67	52,74	43,20	83,70	58,02
Aceh Singkil	0,177	0,269	88,00	12,00	45,09	38,24	76,25	39,11
Aceh Selatan	0,043	0,228	80,00	20,00	41,22	34,32	75,90	42,68
Aceh Tenggara	0,157	0,258	93,33	6,67	54,59	45,30	84,75	56,27
Aceh Timur	0,138	0,216	97,50	2,50	37,10	31,22	82,94	38,86
Aceh Tengah	0,088	0,229	86,67	13,33	50,83	49,92	87,23	67,40
Aceh Barat	0,000	0,196	88,00	12,00	57,25	46,71	73,18	47,15
Aceh Besar	0,013	0,194	95,00	5,00	55,31	53,95	82,41	51,59
Pidie	0,000	0,127	87,50	12,50	45,30	38,98	79,09	45,64
Bireuen	0,048	0,180	90,00	10,00	44,98	41,35	80,74	54,36
Aceh Utara	0,075	0,213	100,00	0,00	43,38	39,79	76,33	42,04
Aceh Barat Daya	0,027	0,204	96,00	4,00	42,62	38,93	83,08	37,63
Gayo Lues	0,414	0,307	96,00	4,00	40,39	32,56	87,06	71,43
Aceh Tamiang	0,245	0,164	82,86	17,14	49,64	44,74	85,19	53,99
Nagan Raya	0,065	0,233	100,00	0,00	45,71	43,38	84,63	43,00
Aceh Jaya	0,000	0,338	90,00	10,00	42,02	33,82	83,56	58,01
Bener Meriah	0,169	0,203	96,00	4,00	45,13	43,61	89,18	78,39
Pidie Jaya	0,029	0,126	96,00	4,00	42,98	42,02	76,32	43,90
Kota Banda Aceh	0,009	0,073	86,67	13,33	84,01	79,69	77,17	53,01
Kota Sabang	0,000	0,099	90,00	10,00	65,37	60,81	81,57	54,71
Kota Langsa	0,256	0,124	88,00	12,00	71,98	65,22	74,78	45,38
Kota Lhokseumawe	0,046	0,182	72,00	28,00	67,36	64,12	79,44	50,25
Kota Subulussalam	0,303	0,308	75,00	25,00	44,97	34,87	85,98	50,87
Nias	0,352	0,232	92,00	8,00	39,66	23,93	82,37	82,52
Mandailing Natal	0,225	0,173	92,50	7,50	45,44	40,12	77,52	51,63
Tapanuli Selatan	0,309	0,165	92,50	7,50	50,62	41,84	82,29	69,01
Tapanuli Tengah	0,237	0,158	77,14	22,86	44,64	43,01	84,62	66,75
Tapanuli Utara	0,040	0,080	94,29	5,71	60,47	53,01	85,91	81,48
Toba	0,164	0,087	86,67	13,33	64,68	59,37	88,17	77,05
Labuhan Batu	0,032	0,174	93,33	6,67	50,44	44,42	82,82	47,66
Asahan	0,134	0,161	84,44	15,56	45,57	40,01	84,09	50,98
Simalungun	0,145	0,102	92,00	8,00	56,10	51,18	79,95	62,63
Dairi	0,035	0,081	94,29	5,71	50,75	51,49	87,79	79,86

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Karo	0,041	0,180	77,50	22,50	55,27	59,64	89,61	78,82
Deli Serdang	0,010	0,122	94,00	6,00	60,54	58,77	85,69	49,47
Langkat	0,018	0,213	90,00	10,00	42,38	37,39	90,74	61,74
Nias Selatan	0,747	0,271	88,57	11,43	37,64	24,91	84,20	73,44
Humbang Hasundutan	0,128	0,082	83,33	16,67	55,30	54,49	88,46	84,60
Pakpak Bharat	0,028	0,096	95,00	5,00	51,38	46,99	89,91	80,89
Samosir	0,000	0,056	88,00	12,00	55,95	49,88	90,55	80,73
Serdang Bedagai	0,042	0,175	88,89	11,11	48,31	46,15	83,95	51,50
Batu Bara	0,046	0,183	88,57	11,43	42,03	38,94	89,52	54,60
Padang Lawas Utara	0,388	0,207	90,00	10,00	53,19	48,07	81,95	63,72
Padang Lawas	0,237	0,218	100,00	0,00	46,29	42,24	89,15	65,86
Labuhan Batu Selatan	0,248	0,200	91,43	8,57	46,30	45,49	87,22	55,86
Labuhan Batu Utara	0,123	0,224	97,14	2,86	44,36	41,80	85,45	43,87
Nias Utara	0,494	0,237	92,00	8,00	41,42	21,28	86,23	73,37
Nias Barat	0,253	0,218	85,00	15,00	44,86	27,80	84,66	78,02
Kota Sibolga	0,000	0,107	85,00	15,00	53,28	56,95	80,56	61,10
Kota Tanjung Balai	0,062	0,190	68,00	32,00	46,25	49,73	84,25	54,55
Kota Pematang Siantar	0,033	0,103	83,33	16,67	76,04	72,60	83,37	60,73
Kota Tebing Tinggi	0,000	0,124	88,00	12,00	61,02	63,03	82,19	51,30
Kota Medan	0,000	0,104	84,00	16,00	75,03	70,99	81,11	52,15
Kota Binjai	0,036	0,085	85,71	14,29	70,35	65,63	79,67	49,12
Kota Padangsidimpuan	0,015	0,110	70,00	30,00	63,88	62,09	80,00	56,85
Kota Gunungsitoli	0,066	0,134	84,00	16,00	53,16	39,92	81,61	61,45
Kepulauan Mentawai	0,558	0,385	100,00	0,00	43,88	32,75	86,66	80,01
Pesisir Selatan	0,061	0,215	95,56	4,44	39,43	48,64	83,70	48,31
Solok	0,057	0,194	88,57	11,43	32,34	39,40	86,63	66,93
Sijunjung	0,160	0,258	90,00	10,00	35,98	40,94	82,89	57,26
Tanah Datar	0,034	0,132	91,43	8,57	46,47	47,86	83,46	58,91
Padang Pariaman	0,058	0,063	100,00	0,00	40,46	40,43	76,80	57,53
Agam	0,057	0,093	91,11	8,89	45,30	45,41	80,99	57,84
Lima Puluh Kota	0,098	0,159	94,29	5,71	35,20	36,44	84,10	64,30
Pasaman	0,165	0,213	85,71	14,29	33,56	35,09	84,74	58,83

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Solok Selatan	0,162	0,292	100,00	0,00	39,17	41,72	87,17	65,91
Dharmasraya	0,052	0,333	93,33	6,67	39,75	45,63	89,72	58,76
Pasaman Barat	0,057	0,191	90,00	10,00	44,28	42,25	84,40	49,48
Kota Padang	0,000	0,077	91,11	8,89	70,16	71,90	80,18	54,25
Kota Solok	0,000	0,107	85,00	15,00	65,78	66,80	79,77	62,54
Kota Sawah Lunto	0,023	0,156	80,00	20,00	61,21	60,05	83,70	63,35
Kota Padang Panjang	0,000	0,044	80,00	20,00	71,45	75,49	76,35	56,34
Kota Bukittinggi	0,000	0,066	68,00	32,00	67,97	72,57	82,67	57,48
Kota Payakumbuh	0,000	0,129	88,00	12,00	61,63	63,98	80,57	60,51
Kota Pariaman	0,000	0,038	90,00	10,00	63,23	64,05	80,54	59,20
Kuantan Singingi	0,085	0,245	85,71	14,29	43,59	39,77	85,13	45,37
Indragiri Hulu	0,194	0,300	95,00	5,00	34,42	33,98	85,03	44,48
Indragiri Hilir	0,304	0,311	82,22	17,78	24,71	25,76	85,80	49,29
Pelalawan	0,266	0,241	95,00	5,00	43,99	39,53	88,40	44,74
Siak	0,163	0,134	95,00	5,00	53,21	46,16	86,21	46,91
Kampar	0,138	0,185	88,89	11,11	47,97	41,94	83,06	43,57
Rokan Hulu	0,082	0,246	93,33	6,67	38,12	33,97	88,42	47,03
Bengkalis	0,063	0,159	84,44	15,56	51,10	44,18	85,09	44,56
Rokan Hilir	0,154	0,231	88,89	11,11	40,83	35,05	85,85	44,31
Kepulauan Meranti	0,257	0,169	73,33	26,67	33,07	29,09	83,36	52,09
Kota Pekanbaru	0,023	0,066	82,00	18,00	71,64	71,76	80,58	53,92
Kota Dumai	0,000	0,142	94,29	5,71	58,57	50,77	84,75	44,80
Kerinci	0,024	0,320	93,33	6,67	46,43	31,57	88,64	66,71
Merangin	0,339	0,393	97,14	2,86	36,41	26,80	87,13	62,03
Sarolangun	0,234	0,297	86,67	13,33	37,56	31,93	87,17	48,41
Batang Hari	0,109	0,338	80,00	20,00	36,99	31,06	85,73	40,47
Muaro Jambi	0,171	0,312	90,00	10,00	36,69	31,60	89,04	50,60
Tanjung Jabung Timur	0,401	0,259	80,00	20,00	29,57	27,13	88,69	41,47
Tanjung Jabung Barat	0,426	0,305	85,71	14,29	34,05	25,27	86,55	47,76
Tebo	0,212	0,380	91,43	8,57	33,15	28,30	87,33	50,09
Bungo	0,045	0,371	85,71	14,29	39,47	29,66	85,79	49,82
Kota Jambi	0,072	0,102	84,44	15,56	72,09	66,50	81,18	51,59
Kota Sungai Penuh	0,028	0,226	100,00	0,00	68,29	56,44	79,44	53,30
Ogan Komering Ulu	0,197	0,332	97,14	2,86	43,28	37,11	84,94	56,98

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ogan Komering Ilir	0,197	0,396	86,67	13,33	24,08	18,69	88,03	50,50
Muara Enim	0,298	0,352	84,44	15,56	41,32	30,66	86,88	57,73
Lahat	0,216	0,287	82,50	17,50	42,96	42,34	85,02	60,39
Musi Rawas	0,242	0,310	82,50	17,50	25,25	24,49	89,56	59,03
Musi Banyuasin	0,189	0,356	88,89	11,11	32,59	27,56	86,04	52,71
Banyu Asin	0,341	0,310	86,67	13,33	27,26	24,84	87,78	41,94
Ogan Komering Ulu Selatan	0,453	0,307	87,18	12,82	36,11	28,48	92,37	66,58
Ogan Komering Ulu Timur	0,085	0,294	84,44	15,56	33,38	27,31	89,67	63,99
Ogan Ilir	0,186	0,264	87,50	12,50	32,52	26,19	88,71	67,11
Empat Lawang	0,302	0,349	77,14	22,86	28,60	27,68	85,96	69,56
Penukal Abab Lematang Ilir	0,440	0,402	100,00	0,00	33,62	23,09	88,09	69,85
Musi Rawas Utara	0,196	0,410	100,00	0,00	33,00	21,42	83,99	55,97
Kota Palembang	0,007	0,161	92,00	8,00	67,40	64,03	79,03	46,24
Kota Prabumulih	0,000	0,193	73,33	26,67	60,00	54,58	82,64	58,38
Kota Pagar Alam	0,116	0,253	82,61	17,39	46,78	46,37	88,35	67,43
Kota Lubuklinggau	0,021	0,291	70,00	30,00	49,78	44,38	82,51	59,92
Bengkulu Selatan	0,000	0,288	96,00	4,00	45,38	43,86	86,53	61,98
Rejang Lebong	0,048	0,346	80,00	20,00	38,29	35,46	85,73	63,72
Bengkulu Utara	0,036	0,277	96,67	3,33	38,52	34,33	86,86	56,21
Kaur	0,090	0,382	84,00	16,00	46,47	33,51	85,89	56,42
Seluma	0,119	0,320	86,67	13,33	38,91	30,69	89,18	56,69
Mukomuko	0,019	0,353	100,00	0,00	37,36	28,64	85,79	45,95
Lebong	0,094	0,304	72,00	28,00	42,57	34,23	87,70	54,66
Kepahiang	0,044	0,355	96,00	4,00	36,40	29,95	86,84	65,56
Bengkulu Tengah	0,106	0,349	80,00	20,00	44,11	29,79	86,52	50,39
Kota Bengkulu	0,001	0,181	77,14	22,86	71,63	70,55	77,73	59,29
Lampung Barat	0,051	0,321	85,71	14,29	37,47	32,49	90,91	74,07
Tanggamus	0,072	0,213	91,11	8,89	28,75	20,16	87,83	52,43
Lampung Selatan	0,053	0,280	76,00	24,00	32,83	26,93	83,37	50,67
Lampung Timur	0,006	0,216	86,00	14,00	38,35	29,78	86,73	50,62
Lampung Tengah	0,027	0,218	80,00	20,00	33,79	27,78	85,62	60,96
Lampung Utara	0,091	0,235	93,33	6,67	32,49	28,25	82,23	50,44

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Way Kanan	0,185	0,353	80,00	20,00	28,86	23,56	88,92	57,90
Tulangbawang	0,068	0,336	75,00	25,00	28,67	23,26	91,18	50,58
Pesawaran	0,155	0,254	85,00	15,00	32,88	26,96	86,32	54,13
Pringsewu	0,000	0,120	70,00	30,00	33,54	32,57	89,44	56,82
Mesuji	0,037	0,320	80,00	20,00	23,27	19,80	88,42	50,84
Tulang Bawang Barat	0,067	0,301	91,43	8,57	29,35	26,55	89,17	52,05
Pesisir Barat	0,210	0,228	88,00	12,00	35,64	29,37	86,12	57,58
Kota Bandar Lampung	0,000	0,142	75,51	24,49	63,55	61,93	79,91	52,19
Kota Metro	0,000	0,134	80,00	20,00	64,59	62,65	81,53	58,66
Bangka	0,039	0,274	85,71	14,29	45,31	38,45	84,55	50,26
Belitung	0,021	0,255	88,00	12,00	46,37	43,69	87,10	48,60
Bangka Barat	0,026	0,347	83,33	16,67	32,59	30,94	87,44	52,07
Bangka Tengah	0,056	0,388	80,00	20,00	24,45	24,93	88,18	50,98
Bangka Selatan	0,087	0,421	86,67	13,33	27,70	25,24	89,97	46,90
Belitung Timur	0,000	0,315	100,00	0,00	42,69	42,20	86,78	53,19
Kota Pangkal Pinang	0,000	0,172	86,67	13,33	69,97	59,75	81,02	52,73
Karimun	0,165	0,183	90,00	10,00	40,46	35,99	83,04	52,68
Bintan	0,105	0,155	60,00	40,00	46,13	47,32	84,38	50,91
Natuna	0,144	0,255	100,00	0,00	45,28	42,36	85,75	59,03
Lingga	0,184	0,189	84,00	16,00	28,55	27,09	81,30	41,72
Kepulauan Anambas	0,149	0,250	90,00	10,00	38,08	36,77	80,50	57,11
Kota Batam	0,000	0,093	90,00	10,00	70,54	67,09	87,98	51,48
Kota Tanjung Pinang	0,000	0,101	76,67	23,33	57,50	57,12	81,03	56,96
Kep. Seribu	0,000	0,229	74,53	25,47	52,21	39,95	84,91	60,42
Kota Jakarta Selatan	0,000	0,126	74,53	25,47	79,61	70,40	79,20	50,47
Kota Jakarta Timur	0,000	0,095	74,53	25,47	79,79	70,53	78,90	50,19
Kota Jakarta Pusat	0,000	0,110	74,53	25,47	75,69	70,61	79,49	50,44
Kota Jakarta Barat	0,000	0,146	74,53	25,47	69,10	57,37	79,81	48,39
Kota Jakarta Utara	0,000	0,134	74,53	25,47	65,31	53,52	83,10	52,34
Bogor	0,242	0,319	90,91	9,09	39,65	28,67	85,99	45,57
Sukabumi	0,180	0,398	82,00	18,00	21,02	12,55	85,69	53,44
Cianjur	0,265	0,430	78,00	22,00	19,88	14,17	88,86	55,61
Bandung	0,035	0,312	83,64	16,36	40,67	37,57	82,71	51,25
Garut	0,274	0,403	76,00	24,00	29,25	20,72	85,54	56,48

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tasikmalaya	0,309	0,337	88,00	12,00	22,93	20,23	83,98	53,26
Ciamis	0,072	0,211	90,00	10,00	25,41	20,78	80,80	55,64
Kuningan	0,116	0,216	68,00	32,00	26,42	20,52	80,57	50,85
Cirebon	0,061	0,225	72,00	28,00	33,76	24,49	86,46	51,86
Majalengka	0,047	0,346	86,00	14,00	25,99	18,40	85,24	54,11
Sumedang	0,000	0,328	76,00	24,00	30,94	27,03	83,74	54,65
Indramayu	0,031	0,271	72,00	28,00	27,50	21,80	84,71	48,21
Subang	0,085	0,289	78,00	22,00	28,40	23,29	87,76	55,83
Purwakarta	0,362	0,386	70,00	30,00	33,80	26,65	86,62	46,19
Karawang	0,097	0,286	84,00	16,00	36,82	28,92	83,56	43,48
Bekasi	0,026	0,237	78,18	21,82	59,75	49,11	85,51	44,34
Bandung Barat	0,171	0,372	80,00	20,00	31,57	22,10	87,12	48,84
Pangandaran	0,075	0,285	80,00	20,00	26,07	21,09	91,31	69,11
Kota Bogor	0,067	0,186	74,00	26,00	61,74	50,75	83,71	50,69
Kota Sukabumi	0,036	0,212	80,00	20,00	56,69	47,49	79,54	45,67
Kota Bandung	0,010	0,161	84,00	16,00	63,51	58,30	83,93	51,96
Kota Cirebon	0,108	0,180	65,71	34,29	61,88	54,37	82,41	54,77
Kota Bekasi	0,020	0,148	80,00	20,00	76,82	71,36	80,54	50,63
Kota Depok	0,000	0,142	76,00	24,00	74,86	66,26	78,90	46,83
Kota Cimahi	0,000	0,155	73,33	26,67	70,05	62,73	82,90	49,99
Kota Tasikmalaya	0,037	0,197	83,72	16,28	43,71	39,44	83,54	54,03
Kota Banjar	0,000	0,238	86,67	13,33	38,66	31,76	82,35	52,16
Cilacap	0,053	0,225	76,00	24,00	28,66	22,95	83,55	52,28
Banyumas	0,000	0,204	82,00	18,00	34,40	29,52	85,44	50,62
Purbalingga	0,006	0,331	70,00	30,00	25,96	20,96	86,48	62,25
BanjarNEGARA	0,000	0,412	86,00	14,00	21,53	14,57	87,45	58,96
Kebumen	0,049	0,161	76,00	24,00	31,51	26,10	88,08	66,46
Purworejo	0,014	0,215	77,78	22,22	45,68	34,86	84,64	62,87
Wonosobo	0,000	0,433	88,89	11,11	17,70	14,93	87,55	61,97
Magelang	0,007	0,235	90,00	10,00	32,64	26,18	87,51	67,90
Boyolali	0,011	0,216	73,47	26,53	39,94	29,51	84,67	65,85
Klaten	0,000	0,161	77,55	22,45	55,07	45,14	84,73	64,00
Sukoharjo	0,000	0,128	84,44	15,56	54,81	52,74	79,64	56,92
Wonogiri	0,058	0,189	76,00	24,00	32,23	27,29	88,00	67,63

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Karanganyar	0,013	0,197	81,82	18,18	48,93	38,70	85,07	64,27
Sragen	0,053	0,199	84,00	16,00	37,66	29,14	84,19	65,10
Grobogan	0,030	0,379	80,00	20,00	22,63	16,03	90,17	63,01
Blora	0,019	0,295	80,00	20,00	28,59	25,29	85,38	61,75
Rembang	0,000	0,307	86,67	13,33	29,05	22,44	87,23	61,76
Pati	0,000	0,287	86,00	14,00	35,07	28,67	88,61	65,08
Kudus	0,000	0,206	91,11	8,89	44,95	39,49	83,36	67,86
Jepara	0,024	0,280	80,00	20,00	34,34	26,86	86,16	57,69
Demak	0,012	0,252	90,00	10,00	35,61	26,76	86,06	58,56
Semarang	0,000	0,262	84,00	16,00	39,05	32,42	87,09	71,67
Temanggung	0,000	0,360	79,55	20,45	25,11	21,81	87,61	68,52
Kendal	0,003	0,216	82,00	18,00	32,89	28,08	87,16	66,45
Batang	0,012	0,317	80,00	20,00	22,94	16,88	88,96	66,81
Pekalongan	0,000	0,272	82,22	17,78	27,40	22,37	87,33	65,13
Pemalang	0,054	0,323	70,00	30,00	19,99	16,98	85,15	59,09
Tegal	0,043	0,155	74,00	26,00	31,43	22,38	82,33	64,47
Brebes	0,040	0,305	86,00	14,00	22,15	14,26	88,09	55,38
Kota Magelang	0,000	0,146	72,00	28,00	72,68	67,28	77,91	57,68
Kota Surakarta	0,000	0,156	82,22	17,78	70,53	64,82	78,93	56,45
Kota Salatiga	0,000	0,152	92,00	8,00	72,65	65,34	80,18	61,65
Kota Semarang	0,000	0,139	76,00	24,00	66,99	63,95	79,92	60,24
Kota Pekalongan	0,000	0,161	85,71	14,29	45,95	41,31	85,54	66,48
Kota Tegal	0,049	0,080	86,67	13,33	53,24	47,35	83,51	55,63
Kulon Progo	0,000	0,119	82,50	17,50	47,85	42,80	84,69	72,66
Bantul	0,000	0,106	80,00	20,00	51,24	50,82	82,77	67,15
Gunung Kidul	0,000	0,272	73,33	26,67	24,88	21,56	86,60	67,51
Sleman	0,000	0,094	74,00	26,00	70,37	62,40	82,86	63,99
Kota Yogyakarta	0,000	0,121	87,50	12,50	72,56	68,77	77,43	64,19
Pacitan	0,115	0,263	91,11	8,89	26,31	20,81	90,30	82,93
Ponorogo	0,000	0,145	82,22	17,78	33,43	29,40	87,19	70,46
Trenggalek	0,118	0,233	88,89	11,11	28,67	24,43	89,94	70,27
Tulungagung	0,037	0,169	86,00	14,00	37,15	32,65	87,99	63,29
Blitar	0,015	0,194	78,00	22,00	30,51	27,57	87,26	57,41
Kediri	0,000	0,184	78,00	22,00	37,96	33,20	86,69	55,76

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Malang	0,016	0,275	82,00	18,00	31,41	23,72	87,02	58,74
Lumajang	0,000	0,380	72,00	28,00	23,61	17,85	88,50	53,91
Jember	0,016	0,404	78,00	22,00	26,95	20,93	87,96	59,84
Banyuwangi	0,022	0,232	66,00	34,00	35,85	29,28	88,01	62,87
Bondowoso	0,061	0,474	82,22	17,78	27,56	17,81	89,86	60,97
Situbondo	0,091	0,366	80,00	20,00	34,03	22,29	89,85	64,13
Probolinggo	0,066	0,489	70,00	30,00	23,84	15,03	88,74	58,30
Pasuruan	0,019	0,277	86,00	14,00	32,38	21,98	87,51	63,27
Sidoarjo	0,000	0,130	86,00	14,00	70,40	64,66	82,54	54,23
Mojokerto	0,024	0,207	76,00	24,00	43,39	38,19	87,06	60,88
Jombang	0,009	0,196	80,00	20,00	44,87	35,11	85,48	58,20
Nganjuk	0,049	0,171	78,00	22,00	36,94	29,35	84,35	55,22
Madiun	0,000	0,120	75,56	24,44	38,58	29,32	85,40	59,73
Magetan	0,000	0,132	86,67	13,33	39,86	34,13	86,42	68,12
Ngawi	0,000	0,209	77,27	22,73	35,41	30,72	86,19	65,64
Bojonegoro	0,000	0,257	82,00	18,00	31,63	23,15	88,26	59,53
Tuban	0,002	0,251	78,00	22,00	33,11	23,43	89,92	59,41
Lamongan	0,000	0,185	84,00	16,00	38,89	31,02	89,00	60,78
Gresik	0,021	0,162	90,00	10,00	57,24	45,53	86,80	56,37
Bangkalan	0,301	0,263	98,00	2,00	17,77	11,63	84,17	57,37
Sampang	0,134	0,314	91,11	8,89	16,59	6,72	87,54	60,10
Pamekasan	0,062	0,330	97,78	2,22	33,63	22,17	87,27	71,42
Sumenep	0,158	0,392	92,00	8,00	30,96	19,15	87,24	69,82
Kota Kediri	0,000	0,105	72,41	27,59	66,22	55,85	80,99	60,55
Kota Blitar	0,000	0,154	88,00	12,00	61,60	56,61	82,02	59,23
Kota Malang	0,000	0,122	73,33	26,67	66,28	62,93	79,50	55,86
Kota Probolinggo	0,012	0,242	73,33	26,67	59,00	48,77	82,44	53,09
Kota Pasuruan	0,000	0,194	83,33	16,67	54,92	47,50	82,98	62,58
Kota Mojokerto	0,000	0,108	84,00	16,00	69,05	67,65	84,06	61,61
Kota Madiun	0,000	0,056	79,31	20,69	77,86	71,30	78,87	62,81
Kota Surabaya	0,000	0,168	80,00	20,00	70,27	62,81	81,92	59,48
Kota Batu	0,000	0,241	76,67	23,33	47,43	44,80	87,33	59,65
Pandeglang	0,186	0,323	80,00	20,00	15,83	13,91	83,45	49,49
Lebak	0,233	0,399	86,00	14,00	13,53	6,68	87,26	57,53

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tangerang	0,006	0,257	80,00	20,00	48,59	33,83	84,29	46,78
Serang	0,228	0,275	88,00	12,00	28,52	23,41	83,05	51,86
Kota Tangerang	0,025	0,144	88,00	12,00	70,54	61,01	82,13	49,79
Kota Cilegon	0,000	0,171	90,00	10,00	60,70	49,51	78,06	43,26
Kota Serang	0,271	0,221	91,11	8,89	37,56	31,55	84,38	53,21
Kota Tangerang Selatan	0,000	0,157	74,00	26,00	71,04	66,12	76,58	40,01
Jembrana	0,000	0,267	82,86	17,14	45,01	34,36	86,78	73,49
Tabanan	0,000	0,183	80,00	20,00	53,41	40,15	83,17	67,59
Badung	0,000	0,104	91,11	8,89	70,63	61,87	83,16	68,07
Gianyar	0,000	0,166	82,22	17,78	60,73	47,97	83,70	69,46
Klungkung	0,000	0,144	90,00	10,00	52,80	37,24	82,89	71,58
Bangli	0,000	0,300	86,67	13,33	34,43	27,15	88,02	76,49
Karangasem	0,000	0,306	86,67	13,33	29,36	18,18	87,41	80,11
Buleleng	0,017	0,330	88,89	11,11	34,28	22,74	84,77	74,78
Kota Denpasar	0,000	0,122	91,11	8,89	70,30	62,81	78,80	60,50
Lombok Barat	0,171	0,365	88,89	11,11	32,28	20,01	87,97	64,47
Lombok Tengah	0,205	0,407	88,00	12,00	32,48	20,44	86,88	71,38
Lombok Timur	0,358	0,356	86,00	14,00	31,59	26,30	86,95	69,94
Sumbawa	0,053	0,192	84,44	15,56	40,60	33,54	83,45	64,46
Dompu	0,178	0,216	93,33	6,67	51,27	40,10	86,66	73,96
Bima	0,263	0,201	82,22	17,78	45,89	39,99	86,81	69,23
Sumbawa Barat	0,171	0,199	88,00	12,00	47,53	37,36	87,81	63,59
Lombok Utara	0,116	0,348	96,67	3,33	28,40	18,04	91,84	69,91
Kota Mataram	0,119	0,298	75,00	25,00	56,77	41,84	82,48	61,41
Kota Bima	0,243	0,206	76,00	24,00	67,36	60,96	82,15	64,58
Sumba Barat	0,024	0,159	84,00	16,00	32,04	31,28	81,47	72,69
Sumba Timur	0,023	0,242	96,67	3,33	33,57	31,28	81,34	67,17
Kupang	0,147	0,192	91,43	8,57	27,40	24,69	82,91	55,44
Timor Tengah Selatan	0,195	0,196	95,00	5,00	25,75	24,59	93,20	81,81
Timor Tengah Utara	0,125	0,259	86,67	13,33	26,95	29,28	86,81	78,52
Belu	0,047	0,224	83,33	16,67	28,68	27,32	89,36	70,44
Alor	0,319	0,204	93,33	6,67	37,60	34,07	84,31	78,13
Lembata	0,033	0,182	100,00	0,00	39,42	27,23	88,57	79,08

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Flores Timur	0,001	0,186	100,00	0,00	32,97	25,62	81,56	67,42
Sikka	0,016	0,153	88,57	11,43	27,58	26,74	82,23	66,47
Ende	0,000	0,102	93,33	6,67	35,76	34,78	82,04	72,86
Ngada	0,014	0,072	100,00	0,00	32,52	29,97	89,36	83,57
Manggarai	0,111	0,221	91,43	8,57	32,69	26,39	88,28	78,04
Rote Ndao	0,143	0,277	100,00	0,00	31,72	24,79	82,42	61,14
Manggarai Barat	0,114	0,244	90,00	10,00	29,60	27,63	83,81	69,56
Sumba Tengah	0,075	0,221	90,00	10,00	30,60	25,84	83,82	69,10
Sumba Barat Daya	0,238	0,165	91,43	8,57	23,99	24,38	86,28	70,78
Nagekeo	0,053	0,090	92,00	8,00	30,12	28,24	85,11	67,33
Manggarai Timur	0,405	0,236	96,67	3,33	24,09	24,78	88,16	78,47
Sabu Raijua	0,263	0,163	90,00	10,00	24,02	24,52	82,85	71,68
Malaka	0,120	0,198	84,00	16,00	21,74	27,61	76,63	67,68
Kota Kupang	0,054	0,125	87,50	12,50	62,92	56,84	79,10	54,86
Sambas	0,092	0,234	80,00	20,00	21,80	20,51	85,20	59,91
Bengkayang	0,024	0,274	76,67	23,33	35,47	34,46	86,85	56,88
Landak	0,088	0,460	80,00	20,00	35,45	30,95	85,61	56,55
Mempawah	0,230	0,278	91,43	8,57	30,77	27,17	88,88	56,54
Sanggau	0,239	0,366	90,00	10,00	32,33	25,59	87,44	54,67
Ketapang	0,437	0,374	93,33	6,67	26,59	23,50	89,57	41,81
Sintang	0,249	0,421	90,00	10,00	34,19	28,80	85,87	63,22
Kapuas Hulu	0,019	0,352	93,33	6,67	37,90	31,19	86,15	65,25
Sekadau	0,575	0,342	100,00	0,00	31,98	22,76	90,71	61,41
Melawi	0,360	0,406	80,00	20,00	35,95	27,71	88,96	60,51
Kayong Utara	0,258	0,390	96,00	4,00	32,19	24,70	86,82	55,67
Kubu Raya	0,305	0,323	86,67	13,33	30,36	25,97	87,66	43,07
Kota Pontianak	0,011	0,170	80,00	20,00	62,76	55,74	78,59	50,68
Kota Singkawang	0,000	0,222	83,33	16,67	40,08	36,27	81,13	50,46
Kotawaringin Barat	0,113	0,365	80,00	20,00	36,81	33,45	88,89	47,87
Kotawaringin Timur	0,217	0,394	82,05	17,95	27,91	21,62	85,63	40,77
Kapuas	0,462	0,385	75,00	25,00	27,10	21,73	88,10	53,90
Barito Selatan	0,336	0,363	48,00	52,00	41,73	32,38	84,54	52,58
Barito Utara	0,405	0,391	64,00	36,00	30,23	27,24	84,87	55,61
Sukamara	0,204	0,378	80,00	20,00	28,61	24,33	85,39	52,27

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lamandau	0,281	0,374	66,67	33,33	35,36	32,09	87,99	53,78
Seruyan	0,615	0,396	88,00	12,00	27,75	21,69	89,33	48,06
Katingan	0,305	0,352	92,00	8,00	30,98	30,90	85,96	47,82
Pulang Pisau	0,161	0,383	76,00	24,00	32,10	24,55	90,03	53,13
Gunung Mas	0,710	0,443	60,00	40,00	36,16	36,57	87,72	47,35
Barito Timur	0,289	0,246	69,57	30,43	42,70	37,25	87,71	68,91
Murung Raya	0,582	0,444	82,61	17,39	28,84	24,30	82,49	37,92
Kota Palangka Raya	0,072	0,231	83,33	16,67	63,41	57,02	82,15	49,37
Tanah Laut	0,167	0,358	65,71	34,29	32,52	24,47	88,96	56,40
Kotabaru	0,388	0,351	71,43	28,57	28,11	21,10	85,02	45,25
Banjar	0,291	0,326	77,78	22,22	31,41	23,37	86,42	55,45
Barito Kuala	0,303	0,260	77,14	22,86	31,70	25,15	88,92	57,66
Tapin	0,217	0,360	92,00	8,00	36,19	23,09	83,28	53,03
Hulu Sungai Selatan	0,114	0,323	82,76	17,24	33,37	30,80	87,24	64,32
Hulu Sungai Tengah	0,042	0,261	86,67	13,33	34,68	28,92	85,50	63,51
Hulu Sungai Utara	0,165	0,295	76,67	23,33	30,91	25,77	84,75	63,09
Tabalong	0,101	0,286	73,33	26,67	43,26	35,94	85,03	63,08
Tanah Bumbu	0,133	0,380	88,57	11,43	36,68	28,81	87,02	46,80
Balangan	0,192	0,392	84,00	16,00	39,96	26,89	86,86	66,81
Kota Banjarmasin	0,020	0,220	73,33	26,67	57,02	50,32	77,16	50,93
Kota Banjar Baru	0,000	0,201	73,33	26,67	62,65	58,51	81,87	52,65
Paser	0,236	0,313	80,00	20,00	41,47	35,93	89,43	46,22
Kutai Barat	0,118	0,386	80,00	20,00	43,76	37,34	83,77	55,10
Kutai Kartanegara	0,087	0,292	73,33	26,67	46,22	37,18	83,85	44,86
Kutai Timur	0,136	0,374	85,00	15,00	47,17	42,89	86,25	43,71
Berau	0,055	0,313	80,00	20,00	46,60	42,86	86,02	46,32
Penajam Paser Utara	0,044	0,281	96,00	4,00	39,08	38,85	88,50	56,79
Mahakam Ulu	0,040	0,347	60,00	40,00	37,24	35,52	81,17	57,98
Kota Balikpapan	0,037	0,170	73,33	26,67	70,40	61,47	80,33	52,71
Kota Samarinda	0,005	0,177	91,11	8,89	72,43	65,31	80,87	49,70
Kota Bontang	0,001	0,214	96,00	4,00	68,20	63,77	84,11	50,72
Malinau	0,166	0,348	75,00	25,00	52,26	44,13	86,54	57,83
Bulungan	0,084	0,302	92,00	8,00	47,92	39,88	87,80	53,51
Tana Tidung	0,075	0,330	85,00	15,00	46,44	40,59	87,49	58,41

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nunukan	0,040	0,270	76,67	23,33	34,21	31,47	90,74	58,03
Kota Tarakan	0,029	0,230	80,00	20,00	52,78	47,13	81,88	44,00
Bolaang Mongondow	0,224	0,421	70,00	30,00	28,74	30,70	86,06	48,52
Minahasa	0,032	0,314	54,29	45,71	53,78	57,37	79,84	49,54
Kepulauan Sangihe	0,119	0,241	88,00	12,00	38,77	40,56	80,64	45,18
Kepulauan Talaud	0,197	0,264	84,00	16,00	48,37	49,17	80,40	57,74
Minahasa Selatan	0,080	0,311	66,67	33,33	43,70	47,15	84,00	48,62
Minahasa Utara	0,034	0,260	76,67	23,33	59,43	55,79	82,70	43,66
Bolaang Mongondow Utara	0,050	0,339	85,00	15,00	27,28	35,67	84,19	49,42
Siau Tagulandang Biaro	0,067	0,210	52,63	47,37	41,52	46,99	83,78	55,19
Minahasa Tenggara	0,053	0,314	60,00	40,00	34,47	37,14	87,19	57,93
Bolaang Mongondow Selatan	0,147	0,397	80,00	20,00	25,86	30,59	87,30	44,36
Bolaang Mongondow Timur	0,152	0,314	70,00	30,00	31,06	32,92	85,46	37,76
Kota Manado	0,000	0,266	45,00	55,00	65,26	68,94	76,34	50,09
Kota Bitung	0,049	0,303	80,77	19,23	50,22	50,80	82,61	52,39
Kota Tomohon	0,000	0,198	75,00	25,00	62,26	61,82	76,36	50,92
Kota Kotamobagu	0,036	0,334	83,33	16,67	49,88	52,24	86,25	55,52
Banggai Kepulauan	0,290	0,381	80,00	20,00	32,84	30,77	84,89	61,84
Banggai	0,160	0,308	65,71	34,29	34,00	31,88	86,46	56,41
Morowali	0,041	0,295	88,00	12,00	41,52	29,72	85,20	30,82
Poso	0,037	0,296	66,67	33,33	40,55	40,75	82,17	54,34
Donggala	0,260	0,375	80,00	20,00	26,06	24,93	85,01	50,77
Toli-Toli	0,026	0,359	76,67	23,33	39,29	33,19	87,54	49,58
Buol	0,036	0,359	64,00	36,00	37,86	36,70	85,95	54,36
Parigi Moutong	0,192	0,383	82,50	17,50	29,48	28,13	88,91	59,79
Tojo Una-Una	0,128	0,375	88,00	12,00	26,08	30,95	88,83	60,41
Sigi	0,152	0,335	66,67	33,33	34,92	33,01	86,93	64,43
Banggai Laut	0,317	0,351	80,00	20,00	32,01	26,60	85,20	52,51
Morowali Utara	0,104	0,319	72,00	28,00	37,18	33,42	84,72	54,50
Kota Palu	0,016	0,219	85,71	14,29	64,32	59,39	83,40	57,72
Kepulauan Selayar	0,080	0,159	80,00	20,00	43,35	38,61	79,84	55,25

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bulukumba	0,042	0,269	77,50	22,50	40,12	38,64	84,85	60,79
Bantaeng	0,115	0,269	71,43	28,57	34,18	29,42	88,05	69,11
Jeneponto	0,000	0,339	72,50	27,50	28,63	26,18	85,10	50,51
Takalar	0,021	0,319	68,57	31,43	39,95	33,09	85,30	44,93
Gowa	0,028	0,270	68,89	31,11	41,04	41,05	86,57	59,50
Sinjai	0,055	0,253	83,33	16,67	29,46	32,15	84,36	61,79
Maros	0,001	0,322	74,29	25,71	44,42	31,55	79,40	43,88
Pangkajene Dan Kepulauan	0,047	0,249	91,43	8,57	39,17	35,25	84,96	58,16
Barru	0,016	0,324	80,00	20,00	41,66	40,63	78,57	41,26
Bone	0,108	0,341	88,89	11,11	28,76	27,04	82,44	47,12
Soppeng	0,009	0,264	80,00	20,00	36,88	36,30	81,41	45,23
Wajo	0,041	0,261	90,00	10,00	30,12	26,06	84,58	52,19
Sidenreng Rappang	0,020	0,257	91,43	8,57	36,40	34,05	83,97	39,21
Pinrang	0,000	0,279	90,00	10,00	42,03	35,14	82,58	46,53
Enrekang	0,026	0,205	83,33	16,67	48,73	41,67	85,25	65,17
Luwu	0,039	0,250	88,57	11,43	44,00	41,03	81,73	54,78
Tana Toraja	0,189	0,258	93,33	6,67	48,74	40,44	80,71	71,72
Luwu Utara	0,057	0,361	85,71	14,29	37,60	32,59	84,96	53,34
Luwu Timur	0,077	0,324	88,57	11,43	43,12	41,34	86,06	53,55
Toraja Utara	0,002	0,305	86,67	13,33	44,56	43,19	78,75	66,07
Kota Makasar	0,036	0,202	84,00	16,00	68,46	67,19	77,44	47,06
Kota Parepare	0,000	0,191	76,00	24,00	63,65	60,69	81,42	58,30
Kota Palopo	0,000	0,245	80,00	20,00	66,48	62,82	80,45	52,02
Buton	0,349	0,265	76,00	24,00	44,57	31,23	81,17	57,19
Muna	0,378	0,270	90,00	10,00	37,48	33,67	78,23	62,68
Konawe	0,211	0,407	86,67	13,33	44,22	35,21	84,67	50,13
Kolaka	0,065	0,331	70,00	30,00	39,12	34,64	91,12	74,58
Konawe Selatan	0,059	0,408	80,00	20,00	38,76	28,67	88,63	51,12
Bombana	0,124	0,374	92,00	8,00	31,31	29,65	87,13	56,64
Wakatobi	0,158	0,223	72,00	28,00	33,63	29,75	83,86	61,69
Kolaka Utara	0,042	0,436	84,00	16,00	36,19	35,00	91,64	71,07
Buton Utara	0,155	0,337	75,00	25,00	38,73	35,47	87,13	76,31
Konawe Utara	0,202	0,412	85,00	15,00	41,40	33,92	87,92	67,75

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kolaka Timur	0,186	0,355	80,00	20,00	31,21	29,13	86,19	57,02
Konawe Kepulauan	0,159	0,358	85,00	15,00	45,29	30,16	89,62	72,73
Muna Barat	0,167	0,305	90,00	10,00	34,81	30,04	84,53	63,43
Buton Tengah	0,236	0,280	88,00	12,00	27,10	20,94	79,35	56,57
Buton Selatan	0,368	0,248	92,00	8,00	27,45	20,77	87,79	75,99
Kota Kendari	0,067	0,256	79,41	20,59	63,60	65,29	81,25	55,49
Kota Baubau	0,061	0,250	80,00	20,00	57,76	53,68	80,51	58,12
Boalemo	0,020	0,413	72,00	28,00	24,81	30,21	84,40	54,18
Gorontalo	0,001	0,273	90,00	10,00	28,80	34,12	86,05	56,83
Pohuwato	0,135	0,396	80,00	20,00	27,99	29,07	87,31	56,23
Bone Bolango	0,058	0,278	88,00	12,00	28,62	36,85	85,14	52,56
Gorontalo Utara	0,000	0,305	64,00	36,00	24,88	25,13	83,16	56,14
Kota Gorontalo	0,049	0,192	83,33	16,67	48,92	53,37	79,75	53,75
Majene	0,084	0,250	80,00	20,00	45,60	45,07	80,13	47,42
Polewali Mandar	0,157	0,266	80,00	20,00	37,17	32,12	83,99	57,47
Mamasa	0,170	0,254	86,67	13,33	40,04	40,16	86,93	63,75
Mamuju	0,116	0,340	90,00	10,00	42,59	36,57	88,45	61,92
Pasangkayu	0,083	0,387	83,33	16,67	34,21	34,29	88,81	54,11
Mamuju Tengah	0,079	0,353	88,00	12,00	38,87	33,11	89,21	47,53
Kepulauan Tanimbar	0,391	0,258	80,00	20,00	48,96	40,27	73,88	51,95
Maluku Tenggara	0,449	0,191	88,00	12,00	47,54	45,70	72,29	62,98
Maluku Tengah	0,520	0,203	82,50	17,50	47,04	47,58	74,52	57,48
Buru	0,303	0,331	84,00	16,00	39,48	37,23	86,05	58,34
Kepulauan Aru	0,735	0,201	88,00	12,00	38,74	37,88	81,54	40,89
Seram Bagian Barat	0,473	0,210	86,67	13,33	46,16	43,55	78,11	60,95
Seram Bagian Timur	0,727	0,264	92,00	8,00	38,06	31,17	71,34	50,33
Maluku Barat Daya	0,379	0,141	85,00	15,00	36,25	32,34	81,34	59,96
Buru Selatan	0,804	0,236	90,00	10,00	44,21	36,15	77,47	66,41
Kota Ambon	0,290	0,199	79,41	20,59	72,53	72,83	76,29	56,95
Kota Tual	0,384	0,239	90,00	10,00	55,82	47,22	77,53	44,42
Halmahera Barat	0,280	0,313	88,00	12,00	35,98	31,49	81,30	56,71
Halmahera Tengah	0,381	0,304	95,00	5,00	41,61	34,37	89,94	49,51
Kepulauan Sula	0,545	0,317	84,00	16,00	41,21	37,04	80,38	46,46
Halmahera Selatan	0,485	0,350	86,67	13,33	33,72	25,52	85,31	63,33

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Halmahera Utara	0,365	0,348	66,67	33,33	36,22	33,71	81,74	59,19
Halmahera Timur	0,215	0,363	95,00	5,00	43,41	30,52	86,74	50,93
Pulau Morotai	0,125	0,309	85,00	15,00	29,39	27,64	81,29	51,33
Pulau Taliabu	0,707	0,325	75,00	25,00	25,82	22,49	81,75	48,02
Kota Ternate	0,151	0,211	76,67	23,33	71,02	64,48	75,48	51,59
Kota Tidore Kepulauan	0,090	0,196	80,00	20,00	51,81	44,64	85,74	53,14
Fakfak	0,177	0,257	70,00	30,00	57,52	56,88	73,42	49,00
Kaimana	0,452	0,262	76,00	24,00	51,75	49,34	79,14	53,94
Teluk Wondama	0,564	0,277	72,00	28,00	46,82	37,10	79,50	64,84
Teluk Bintuni	0,227	0,340	95,83	4,17	57,16	45,44	81,70	52,88
Manokwari	0,161	0,307	84,21	15,79	53,40	41,36	81,74	58,51
Manokwari Selatan	0,139	0,355	88,00	12,00	57,51	42,17	87,77	74,15
Pegunungan Arfak	0,657	0,412	92,00	8,00	44,05	20,70	94,55	89,75
Raja Ampat	0,712	0,301	85,00	15,00	39,00	32,66	80,42	45,15
Sorong	0,258	0,314	88,00	12,00	48,74	39,70	84,46	53,71
Sorong Selatan	0,644	0,334	95,00	5,00	42,37	29,76	78,86	59,46
Maybrat	0,146	0,336	80,00	20,00	55,22	46,84	83,86	78,51
Tambrauw	0,583	0,266	95,00	5,00	54,19	39,73	87,47	71,13
Kota Sorong	0,159	0,206	86,21	13,79	72,99	69,16	76,23	50,71
Jayapura	0,196	0,259	83,33	16,67	65,30	54,58	77,00	51,68
Kepulauan Yapen	0,543	0,258	96,00	4,00	57,13	43,82	79,16	54,83
Biak Numfor	0,127	0,256	84,00	16,00	59,03	51,44	80,65	67,13
Sarmi	0,058	0,206	75,00	25,00	53,96	53,41	73,69	47,53
Keerom	0,142	0,411	85,00	15,00	41,24	36,35	89,21	67,15
Waropen	0,603	0,287	95,00	5,00	46,44	36,41	85,34	71,19
Supiori	0,276	0,311	100,00	0,00	43,63	35,58	74,61	56,34
Mamberamo Raya	0,749	0,289	90,00	10,00	33,87	24,74	73,03	35,33
Kota Jayapura	0,048	0,207	77,14	22,86	78,94	71,81	78,57	55,29
Merauke	0,059	0,338	80,00	20,00	58,80	49,71	84,72	61,17
Boven Digoel	0,171	0,310	95,00	5,00	65,71	54,08	80,89	61,59
Mappi	0,433	0,357	92,00	8,00	36,79	25,57	75,57	45,54
Asmat	0,269	0,381	69,57	30,43	32,67	23,34	84,78	70,14
Mimika	0,045	0,230	82,86	17,14	70,99	62,76	85,54	47,38

Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	MTF ¹	MHPK20 ²	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		TPAK ³	
			L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Dogiyai	1,000	0,248	100,00	0,00	14,58	9,94	93,58	92,75
Deiyai	0,339	0,116	100,00	0,00	17,25	3,56	72,41	41,31
Nabire	0,143	0,325	83,33	16,67	60,55	55,43	83,59	57,71
Paniai	0,571	0,277	100,00	0,00	17,70	11,33	86,80	48,63
Intan Jaya	0,357	0,514	100,00	0,00	16,96	7,32	79,01	55,03
Puncak	1,000	0,529	87,50	12,50	1,14	1,44	88,62	83,77
Puncak Jaya	0,372	0,200	93,33	6,67	19,05	16,12	86,32	63,37
Nduga	0,912	0,234	96,00	4,00	14,07	12,85	94,58	95,08
Jayawijaya	0,173	0,235	90,00	10,00	38,34	28,36	88,02	83,77
Lanny Jaya	0,959	0,154	84,00	16,00	29,49	16,52	93,69	93,41
Tolikara	0,559	0,217	93,33	6,67	17,80	7,94	91,33	85,85
Mamberamo Tengah	0,322	0,202	85,00	15,00	29,78	18,98	91,94	88,97
Yalimo	1,000	0,149	96,00	4,00	28,24	26,04	83,09	84,36
Yahukimo	0,339	0,431	97,14	2,86	13,27	5,60	90,21	80,21
Pegunungan Bintang	0,574	0,391	96,00	4,00	23,42	9,06	89,51	85,10
Indonesia	0,094	0,248	77,54	22,46	43,78	37,64	84,66	56,42

Catatan: ¹Proporsi perempuan 15-49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitasi kesehatan

²Proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun

³Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

L: laki-Laki

P: Perempuan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291, Faks. (021) 3857046

Homepage: <https://bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id